MANAJEMEN KURIKULUM PONDOK PESANTREN SALAFIYAH PENYELENGGARA WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN DI KABUPATEN BARITO KUALA

TESIS

OLEH

Hj. ST. MAU'IZATUL HASANAH
NIM. 10.0212.674

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
PROGRAM PASCASARJANA
BANJARMASIN
2012

MANAJEMEN KURIKULUM PONDOK PESANTREN SALAFIYAH PENYELENGGARA WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASARA 9 TAHUN DI KABUPATEN BARITO KUALA

TESIS

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Antasari
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Menyelesaikan Program Magister
Ilmu Pendidikan Islam

OLEH

Hj. ST. MAU'IZATUL HASANAH
NIM. 10.0212.674

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAM
KONSENTRASI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
BANJARMASIN
2012

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

N a m a	: Hj. St. MAU'IZATUL HASANAH
N I M	: 10.0212.674
Tempat dan tanggal lahir	: Marabahan, 3 Juli 1961
Program Studi	: Pendidikan Islam
Konsentrasi	: Manajemen Pendidikan Islam

menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis saya yang berjudul "Manajemen Kurikulum Pondok Pesantren Salafiyah Penyelenggara Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kabupaten Barito Kuala" adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 20 Desember 2012

Yang membuat pernyataan,

Hj. St. MAU'IZATUL HASANAH

PERSETUJUAN TESIS

MANAJEMEN KURIKULUM PONDOK PESANTREN SALAFIYAH PENYELENGGARA WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN DI KABUPATEN BARITO KUALA

Yang Dipersembahkan dan Disusun oleh

Hj. St. MAU'IZATUL HASANAH
NIM. 10.0212.674

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
Dapat Diajukan Kepada Dewan Penguji

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. H. KAMRANI BUSERI, MA	Dr. AHMAD SALABI, M.Pd
Tanggal : 20 Desember 2012	Tanggal : 20 Desember 2012

PENGESAHAN TESIS

MANAJEMEN KURIKULUM PONDOK PESANTREN SALAFIYAH PENYELENGGARA WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN DI KABUPATEN BARITO KUALA

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH:

Hj. St. MAU'IZATUL HASANAH

NIM. 10.0212.674

Telah Diajukan Kepada Dewan Penguji
Pada: Hari Selasa, Tanggal 22 Januari 2013

Dewan Penguji

Nama	Tanda Tangan
a. Prof. Dr. H. AHMADI HASAN, MH (Ketua)	1.
b. Prof. Dr. H. KAMRANI BUSERI, MA (Anggota)	2.
c. Prof. Dr. H. SYAIFUDDIN SABDA, M.Ag (Anggota)	3.
d. Dr. AHMAD SALABI, S.Ag, M.Pd (Anggota)	4.

Mengetahui,
Direktur

Prof. Dr. H. AHMADI HASAN, MH
NIP. 19580406 198703 1 001

ABSTRAK

Kata kunci: - Manajemen
- Kurikulum
- Pesantren

St. MAU'IZATUL HASANAH: *"Manajemen Kurikulum Pondok Pesantren Salafiyah Penyelenggara Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kabupaten Barito Kuala"*, Tesis, Program Studi Pendidikan Islam, Konsentrasi Manajemen Pendidikan Islam, Institut Agama Islam Negeri Antasari, di bawah pembimbingan (I) Prof. Dr. H. KAMRANI BUSERI, MA dan (II) Dr. AHMAD SALABI, M.Pd, 2012.

Dewasa ini pesantren dihadapkan pada banyak tantangan, termasuk di dalamnya modernisasi pendidikan Islam. Sistem dan kelembagaan pesantren telah dimodernisasi dan disesuaikan dengan tuntutan pembangunan, terutama dalam aspek kelembagaan yang secara otomatis akan mempengaruhi penetapan kurikulum yang mengacu pada tujuan institusional lembaga tersebut. Persoalan yang muncul adalah apakah pesantren dalam menentukan kurikulum harus melebur pada tuntutan jaman sekarang, atau justru ia harus mampu mempertahankannya sebagai ciri khas pesantren yang dalam banyak hal justru lebih mampu mengaktualisasikan eksistensinya di tengah-tengah tuntutan masyarakat.

Sejak tahun 2000, Pondok Pesantren Salafiyah dipercaya sebagai Penyelenggara Program Wajib Belajar 9 Tahun. Masuknya mata pelajaran umum dalam pembelajaran pesantren, secara tidak langsung cukup berpengaruh dalam pengalokasian waktu ketika menyusun jadwal pembelajaran; antara mata pelajaran umum dengan kajian kitab klasik. Keadaan ini tentu perlu untuk dikaji lebih jauh, agar ke depan pada masing-masing pesantren dapat mengelola kurikulum dengan selalu menjaga sinergitas antara kewajiban melaksanakan pembelajaran mata pelajaran umum dengan kajian keagamaan berupa pengajian kitab; yaitu bagaimana manajemen kurikulum dan usaha menata-kelola kurikulum pada Pondok Pesantren Salafiyah Penyelenggara Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di kabupatren Barito Kuala.

Penelitian ini dilatarbelakangi upaya mengenal manajemen kurikulum pendidikan di pesantren sebagai lembaga pendidikan tertua dalam kancah pendidikan nasional Indonesia. Dalam penelitian ini digunakan berbagai teori manajemen, pengembangan kurikulum dan kepesantrenan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan desain penelitian analisis kegiatan. Subyek penelitian adalah Pondok Pesantren Salafiyah Penyelenggara Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kabupaten Barito Kuala, dengan lokasi penelitian di tiga pesantren di Kecamatan Alalak dan Kecamatan Mekarsari. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, studi dokumentasi dan observasi.

Beberapa temuan yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa pesantren memiliki kurikulum baku yang tidak tertulis dan terdokumentasikan. Pesantrean memiliki keunggulan dalam model pendidikannya, pesantren dibangun oleh, dari dan untuk masyarakat sekitar. Dengan demikian, pesantren lebih memperhatikan kepentingan masyarakat yang mempercayakan pendidikan kepada pesantren, walaupun masih kurang memperhatikan kebutuhan masyarakat secara umum. Pendekatan pembelajaran pada pendekatan materi berdasarkan kitab kuning yang dikaji dengan mengedepankan konsep, nilai dan pemecahan masalah. Tujuan belajar mengajar tercapai apabila santri telah memahami kandungan kitab kuning yang dipelajarinya. Penentuan kitab kuning disesuaikan dengan materi pembelajran yang ditentukan pengajar.

Dengan hasil pengumpulan data dari narasumber diperoleh kondisi pesantren dalam pengelolaan kurikulumnya. Kesimpulan penelitian menyebutkan bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan otonom dan *indigenous* yang menganut model manajemen berbasis kitab kuning, model manajemen berbasis kyai dan model manajemen berbasis masyarakat. Menghadapi perubahan paradigma pendidikan masyarakat, pesantren dihadapkan pada berbagai kendala. Disarankan dengan manajemen kurikulum partisipatif dapat merekonstruksi kurikulum sesuai harapan masyarakat dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat pendidikan peduli pesantren, termasuk pemerintah melalui instansi yang terkait.

ABSTRACT

Keyword: - *Management*
- *Curriculum*
- *Salafiyah Boarding Shool*

***St. MAU'IZATUL HASANAH**: "Salafiyah Boarding School Curriculum Management Organizing 9-Year Compulsory Basic Education in Barito Kuala District",* Thesis, Program of Islamic Education, Islamic Education Management Concentration, Antasari State Islamic Institute, under the guidance (I) Prof. Dr. H. KAMRANI BUSERI, MA and (II) Dr. AHMAD SALABI, M.Pd, 2012.

At the time of boarding school now faced many problem; including the issue of modernization of Islamic education. Boarding and institutional system has been modernized and adapted to the demans of the development. Especially in the institutional aspects that directly affect the determination of the curriculum wich refers to institutional objectives the institution. The question that arises is weather in determining the curruculum of religious school must follow the progress of the times, or only retaining the curriculum as the hallmark of a boarding school which is better able to actualize its existence in the society.

Since 2000, Pesantren Salafiyah (Boarding School of Islamic traditional education) are tasked as organizer of 9 year compulsory basic education program. The inclusion of general subjects in study at the seminary indirectly influential in the allocation of time when preparing the schedule of learning, the general subjects to study the classic. This situation would need to be studied further, that in the future the individual shools can manage the curriculum by always keeping the synergy between teaching subjects perform duties common to the study of religious doctrine in the form of book, namely how to organize curriculum management and business-management curriculum at boarding school the Organizing of 9 –year Compulsory Basic Education in Barito Kuala Region.

This research is based on making efforts to know curriculum management in Pesantren (Boarding School of Islamic traditional education), as an oldest education model in Indonesian education system. In this study are used the theories of management, curriculum development and the meaning of pesantren itself. This study used a variety of management theories, curriculum development and some information and boarding school' affairs. The research method used in this research is descriptive qualitative approach to reseach design analysis activities. The Populations are the boarding school the Organizer of 9 Year Compulsory Basic education in Barito Kuala Region and sample using cluster sample in district Alalak and Mekarsari. Data gethering technical are interview, ducumentation studies, and observations.

Some of the findings obtained in this study that the schools have a standard curriculum that is unwritten and undocumented. Pesantren have a model

of excellence in education, schools built by, of and for the surrounding community. Thus, schools pay more attention to the interest of the people who entrust education to schools, although still less attention to the needs of society in general. The approach of teaching–learning processer is more to material approach based kitab kuning studied with submitting concept, value and problem solving. The goals of teaching – learning are achieved if 'santri' (the pesantren students) have been understanding 'kitab kuning' they had learnt. To determine kitab kuning to be learnt is decided by the teachers decisions.

There are general and special conclusions of this study. Pesantrens are the autonomous and indigenous education institutions that practice model of kitab kuning based management, kyai based management and communities based management. Facing the change of communities' paradigms of educations, pesantrens are up against a lot of difficulties and problems. It's proposed to use the participative management models to be able reconstruct his curriculum that suitable to communities hope with involving all components of communities who pay pesantren educations attention, included the goverment with interrelated departement.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

اَللّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ شُكْراً وَلَكَ الْمَنُّ فَضْلاً وَأَنْتَ رَبُّناَ حَقّا

وَنَحْنُ عَبِيْدُكَ رِقّاً وَأَنْتَ لَمْ تَزَلْ لِذاَلِكَ أَهْلاً

اللَّهُمَّ صَلِّى عَلى سَيِّدِناَ مُحَمَّدٍ وَ عَلى أَلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ

Atas perkenan dan restu Allah jualah, penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis ini. Sehingga selayaknyalah ucapan rasa syukur dihaturkan ke hadlirat Allah SWT; Tuhan yang Maha Rahman dan Maha Rahiem. Shalawat dan salam sepatutnya pula disampaikan kepada Sang Junjungan; Muhammad SAW, nabi terakhir yang telah mendedikasikan jiwa dan raga untuk kejayaan Islam.

Dalam penyelesaian tulisan ini, tentu tidak terlepas dari bantuan banyak pihak; untuk itu perkenankan kami menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Prof. Dr. H. AHMADI HASAN, M.H, Direktur Program Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, yang telah memberi semangat dan motivasi, bahkan sejak wawancara pertama seleksi masuk perkuliahan, disetiap perjumpaan dan terlebih disaat-saat penelitian dan penyusunan karya tulis ini;
- Bapak Prof. Dr. H. KAMRANI BUSERI, MA, dosen dan Dosen Pembimbing I penulis, yang dengan ketelitian memberikan pembimbingan penulisan, memberi petunjuk, telaahan dan berkenan mengajak berdiskusi dalam beberapa hal yang perlu penjelasan lebih lanjut;

- Bapak Dr. AHMAD SALABI, S.Ag, M.Pd, Ketua Program Studi Pendidikan Islam, dosen dan Dosen Pembimbing II penulis, yang dengan sabar membimbing penulis, bahkan dari kerangka awal proposal penelitian dan sampai selesainya karya tulis ini.

Selain itu, terima kasih dan penghargaan tidak lupa disampaikan kepada seluruh dosen; Bapak dan Ibu :

- Prof. Dr. H. ABDUL MUTHALIB, MA,
- Prof. Dr. H. ASMARAN. AS, MA,
- Prof. Dr. H. M. YUSERAN SALMAN, Lc,
- Prof. Dr. H. AHMAD FAHMI ARIEF, MA,
- Prof. Dr. H. AHMAD KHAIRUDDIN, M.Ag,
- Prof. Dr. H. SURATNO, M.Pd
- Dr. H. HADARIANSYAH, AB, MA,
- Dr. H. HUSNUL YAQIN, M.Ed,
- Dr. H. ZULKIFLI MUSABBA, M.Pd,
- Dra. Hj. SALAMAH, M.Pd dan
- Ibu NORLAILA, M.Ag, M.Pd;

semoga setiap jengkal ilmu yang diterima bisa memberi manfaat dan dapat diamalkan demi kemajuan bangsa dan banua tercinta.

Kepada para ‘administratur’ Pascasarjana, karyawan Prodi, para Pustakawan dan semua pihak yang banyak membantu keadministrasian, penulis mengucapkan terima kasih; semoga bantuan dan pelayanan yang diberikan tercatat sebagai amal ibadah di sisi-Nya.

Kepada Pemimpin, para Ustadz dan seluruh warga PPS Al-Amin (Desa Beringin – Kecamatan Alalak), PPS Nurussalam (Desa Tinggiran Darat – Kecamatan Mekarsari) dan PPS Tarbiyatul Furqan (Desa Tanjung Harapan – Kecamatan Alalak); yang telah berkenan berkali-kali menerima kedatangan

penulis, memberi banyak informasi dan data melalui wawancara penyiapan dokumentasi.

Untuk rekan-rekan se angkatan perkuliahan, yang telah banyak membantu penyelesaian penulisan, semoga kita semua dapat menyelesaikan perkuliahan kita sesuai rencana yang kita ikrarkan bersama, di minggu pertama pertemanan kita.

Akhirnya kepada keluarga kecil penulis; untuk suami tercinta, yang selalu siap menjadi ‘pengantar setia’ ke kampus bertahun lamanya, menjadi pendamping yang baik pada saat penelitian di lapangan. Untuk ananda terkasih, terima kasih atas bantuan pencarian bahan bacaan dan referensi melalui dunia maya; suatu hari kelak ananda mengerti arti arti dan manfaat berbakti kepada orangtua.

Marabahan, 5 Desember 2012

Penulis

TRANSLITERASI

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan	ظ	Zha	**Zh**	
أ	-	**A**	Dibaca A, huruf hidup	ع	‘Ain	**‘**	
إ	-	**I**	Dibaca I, huruf hidup	غ	Ghain	**Gh**	
ؤ	-	**U**	Dibaca U, huruf hidup	ف	Fa	**F**	
ب	Ba	**B**		ق	Qaf	**q**	
ت	Ta	**T**		ك	Kaf	**K**	
ث	Tsa	**Ts**		ل	Lam	**L**	
ج	Jim	**J**		م	Mim	**M**	
ح	Ha	**H**		ن	Nun	**N**	
خ	Kha	**Kh**		و	Waw	**W**	
د	Dal	**D**		ء	Hamzah	**…’…**	
ذ	Dzal	**Dz**		ي	Ya	**Y**	
ر	Ra	**R**		--َ	Fathah	**A**	
ز	Zai	**Z**		--ِ	Kasrah	**I**	
س	Sin	**S**		--ُ	Dhammah	**U**	
ش	syin	**Sy**		--ّ	Syaddah	Huruf ganda	Dibaca tebal Mis: Rabbana
ص	Shad	**Sh**					
ض	Dhad	**Dh**					
ط	Tha	**Th**					

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL …… ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN …… iii
PERSETUJUAN TESIS …… iv
PENGESAHAN TESIS ....…… v
ABSTRAK …… vi
KATA PENGANTAR …….. x
TRANSLITERASI …… xiii
DAFTAR ISI ……. xiv
DAFTAR TABEL …….. xvi
DAFTAR GAMBAR …… xvii
DAFTAR LAMPIRAN …… xviii

BAB I PENDAHULUAN…… 1

A. Latar Belakang…….. 1
B. Fokus Penelitian……... 10
C. Tujuan Penelitian…….. 10
D. Kegunaan Penelitian……. 11
1. Secara Teoretis
2. Secara Praktis
E. Definisi Operasional…… 12
F. Penelitian Terdahulu…… 13
G. Sistematika Penulisan …… 16

BAB II KAJIAN PUSTAKA…….. 18

A. Manajemen Kurikulum..…… 18
1. Manajemen…...…….. 18
2. Kurikulum ……. 26
3. Manajemen Kurikulum...…… 39
B. Program Wajar Dikdas 9 tahun...……. 48
C. Pesantren..……. 51
1. Pengertian ..…… 51
2. Sejarah Singkat Pondok Pesantren…..……. 52
3. Unsur Pondok Pesantren...…...……... 65
4. Tipologi……... 66
5. Manhaj dan Metode Pembelajaran…….. 68

BAB III METODE PENELITIAN…… 71

A. Jenis dan Pendekatan penelitian…… 71
B. Kehadiran Peneliti …… 74
C. Data dan Sumber Data…… 75
D. Prosedur Pengumpulan Data…….. 76
E. Analisis Data …… 81
F. Pengecekan Keabsahan Data …… 83

BAB IV PAPARAN DATA PENELITIAN …… 86

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian …… 86
1. Pesantren Al-Amin …… 86
2. Pesantren Nurussalam…… 87
3. Pesantren Tarbiyatul Furqan……..... 89

B. Hasil Penelitian di Pondok Pesantren …… 90

C. Temuan Penelitian …… 94
1. Kurikulum yang berlaku di pesantren…… 95
2. Kesesuaian kurikulum …… 107
3. Penerapan prinsip-prinsip manajemen …… 117
4. Rekonstruksi kurikulum …… 121

BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN …… 128
A. Kurikulum di pesantren dan perkembangannya…… 128
B. Kurikulum; antara kepentingan santri,
harapan masyarakat dan kualitas hasil didik …… 133
C. Prinsip dan pengembangan manajemen dalam
Pengelolaan kurikulum pesantren …… 137
D. Rekonstruksi kurikulum dari salafi ke semi modern …… 140

BAB VI PENUTUP…….. 147

A. Simpulan……... 147
B. Saran-saran …… 148

DAFTARPUSTAKA ……..... 150
LAMPIRAN – LAMPIRAN…… 155
RIWAYAT HIDUP PENULIS…… 173

DAFTAR TABEL

Tabel 1	MODIFIKASI LANGKAH MERANCANG MANAJEMEN KURIKULUM	134
Tabel 2	PENGEMBANGAN MANAJEMEN KURIKULUM PADA PPS WAJAR DIKDAS 9 TAHUN	135

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Hubungan Input, Proses dan Keluaran	25
Gambar 2	Kolaboratif Tujuan Pendidikan Nasional dan Pendidikan Islam	29
Gambar 3	Komponen Manajemen Sekolah	40
Gambar 3	Hubungan antara Ayat Quraniyah, Ayat Kauniyah Dengan Tujuan Pendidikan Sebagai Komponen Kurikulum Pendidikan Islam	62
Gambar 4	Analisis Data Model Interaktif Miles dan Huberman……	80

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kitab Kuning yng Digunakan Sebagai Kitab Rujukan Di Pesantren 154

Lampiran 2a Pedoman Wawancara 157

Lampiran 2b Pedoman Studi Dokumenter..... 160

Lampiran 3 SK Direktur Program Pasca Sarjana tentang Pengangkatan Pembimbing 161

Lampiran 4 SK Direktur Program Pasca sarjana tentang Surat Keterangan Riset……162

Lampiran 5 Surat Keterangan Penelitian 163

Lampiran 6 Standar Operasional Prosedur (SOP) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah di Kabupaten Barito Kuala 167

Lampiran 7 Data-data kepesantrenan……169

BAB I
PENDAHULUAN

Bab I ini menyajikan A. Latar Belakang Masalah, B. Fokus Penelitian, C. Tujuan Penelitian, D. Kegunaan Penelitian, E. Definisi Operasional, F. Penelitian Terdahulu dan G. Sistematika Penulisan; yang secara lengkap diuraikan pada bahasan berikut.

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan bidang pendidikan di Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa Indonesia. Dalam upaya pencerdasan kehidupan bangsa (seperti disebut dalam Pembukaan UUD 1945); masyarakat telah menunjukkan keterlibatan dan peransertanya, tidak saja dari segi material dan moral, namun telah pula memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam penyelenggaraan pendidikan.

Jika dibanding dengan sistem pendidikan di negara lain, maka pendidikan di Indonesia harus selalu menjadi perhatian serius pemerintah dan semua pihak. Sehingga *outcome* pendidikan diharapkan akan semakin bermutu dan mampu menghadapi berbagai tantangan kemajuan zaman dengan tetap menganut nilai, etika, moral dan kearifan lokal.

Munculnya berbagai lembaga atau perguruan swasta merupakan bentuk kepedulian dan penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat. Lembaga atau perguruan swasta tersebut dapat berbentuk jalur pendidikan sekolah atau jalur pendidikan luar sekolah. Dalam kaitan ini, lembaga Pondok Pesantren sebagai institusi pendidikan formal, termasuk kedalam jalur pendidikan luar sekolah yang

diselenggarakan dan dikembangkan oleh masyarakat. Keberadaan Pondok Pesantren mendapat pengukuhan lebih lanjut --dari pemerintah sebagai bagian dari pendidikan nasional-- dengan disahkannya UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.

Dalam perkembangan masyarakat sekarang ini, dituntut adanya pembinaan peserta didik yang dilaksanakan secara berkeseimbangan antara nilai dan sikap, pengetahuan, kecerdasaan, keterampilan, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat luas, serta peningkatan kesadaran terhadap alam lingkungannya. Asas pembinaan semacam inilah yang seharusnya ditawarkan oleh pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan agama Islam tertua di Indonesia, agar tetap 'dilihat' bahkan ketika modernitas dan iptek cenderung semakin maju.

Dalam kaitannya dengan manajemen; tidak dapat dibantah lagi bahwa manajemen merupakan aspek penting yang menyentuh, mempengaruhi dan bahkan merasuki seluruh aspek kehidupan manusia; karena dengan manajemen dapat diketahui kemampuan dan kelebihan serta dapat dikenali kekurangan suatu organisasi. Manajemen menunjukkan cara efektif dan efisien dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Manajemen dapat mengurangi hambatan dalam pencapaian tujuan serta memberikan prediksi dan imajinasi agar segera mengantisipasi dengan cepat perubahan lingkungan[1]. Demikian pula halnya dengan dunia pendidikan; maka peranan manajemen pendidikan sangat menentukan arah dan tujuan pendidikan. Pidarta merumuskan; manajemen pendidikan adalah aktivitas

[1] Sulistyorini, *Manajemen Pendidikan Islam; Konsep, Strategi dan Aplikasi* (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 7

memadukan sumber-sumber pendidikan agar terpusat dalam usaha untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya[2]. Sementara Tilaar berpendapat bahwa manajemen pendidikan adalah mobilisasi segala sumberdaya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan[3]. Manajemen pendidikan merupakan serangkaian kegiatan proses kerjasama suatu organisasi pendidikan dalam pencapaian tujuan yang wilayah pembahasannya sangat luas.

Salah satu komponen penting pada lembaga pendidikan formal yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan isi pengajaran, mengarahkan proses mekanisme pendidikan, tolok-ukur keberhasilan dan kualitas hasil pendidikan, adalah kurikulum[4]. Namun demikian, kurikulum seringkali tidak mampu mengikuti kecepatan laju perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan dan pembenahan kurikulum harus senantiasa dilakukan secara berkesinambungan.

Istilah kurikulum sebagaimana halnya lembaga pendidikan formal, tidak didapat pada pondok pesantren. Kecuali jika yang dimaksud sebagai *manhaj* (arah pembelajaran tertentu), maka pondok pesantren telah memiliki "kurikulum" melalui *funun* kitab-kitab yang diajarkan pada para santri[5]. Menurut Amir Hamzah, seperti dikutip Hasbullah; muatan *manhaj* pesantren lebih terkonsentrasi pada ilmu-ilmu agama, semisal sintaksis Arab, morfologi Arab, hukum Islam, sistem yurisprodensi Islam, hadits, tafsir, Al-Qur'an, teologi Islam, tasawuf, tarikh

[2] Made Pidarta, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1988), hal. 4
[3] H.A.R. Tilaar, *Manajemen Pendidikan Nasional*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), hal. 31
[4] Sarimuda Nasution, *Kurikulum dan Pengajaran* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hal. 13.
[5] Departemen Agama, *Pola Pengembangan Pondok Pesantren*, (Jakarta: Ditjen Kelembagaan Agama Islam – Proyek Peningkatan Pondok Pesantren, 2001), hal 43

dan retorika[6]. Senada dengan itu, Nurcholish Madjid menyatakan bahwa istilah kurikulum tidak dikenal di dunia pesantren, terutama masa prakemerdekaan, walaupun sebenarnya materi pendidikan sudah ada dan keterampilan itu ada dan diajarkan di pesantren. Kebanyakan pesantren tidak merumuskan dasar dan tujuan pesantren secara eksplisit dalam bentuk kurikulum. Tujuan pendidikan pesantren ditentukan oleh kebijakan Kiai, sesuai dengan perkembangan pesantren tersebut[7].

Dalam konteks keilmuan, pondok pesantren salafiyah merupakan jenis pesantren yang tetap mempertahankan pengajaran kitab-kitab klasik; sebagai inti pendidikannya[8]. Disiplin ilmu yang tidak berkaitan dengan agama (pengetahuan umum) tidak diajarkan. Selain itu, sistem pengajaran yang digunakan masih dengan metode klasik. Kurikulum di pesantren salafiyah tidak memakai bentuk silabus, tetapi berupa jenjang level kitab-kitab dalam berbagai disiplin ilmu; dengan pembelajaran yang menggunakan pendekatan tradisional pula. Beberapa pesantren tradisional melakukan praktek-praktek tasawuf atau hal-hal yang berbau sufistik menjadi subkultur pesantren hingga sekarang[9].

Secara umum; pondok pesantren bisa dibedakan atas pesantren *salafiyah* dan pesantren *khalafiyah.* Dalam konteks keilmuan, pondok pesantren salafiyah merupakan jenis pesantren yang tetap mempertahankan pengajaran kitab-kitab klasik; sebagai inti pendidikannya[10]. Disiplin ilmu yang tidak berkaitan dengan

---

[6] Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 26-27

[7]Nurcholis Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan* (Jakarta: Paramadina, 1997), h. 59.

[8] Yasmadi, *Modernisasi Pesantren : Kritik Nurcholis Madjid Terhadap Pendidikan Islam Tradisional,* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), Cet. I, hal. 70-71.

[9] Hasbullah, *loc.cit.*

[10]Yasmadi, *Modernisasi Pesantren : Kritik Nurcholis Madjid Terhadap Pendidikan Islam Tradisional,* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), Cet. I, hal. 70-71

agama (pengetahuan umum) tidak diajarkan. Selain itu, sistem pengajaran yang digunakan masih dengan metode klasik. Metode ini dikenal dengan istilah *sorogan* atau layanan individual (Individual Learning Process); dan *wetonan* (berkelompok); yaitu para santri membentuk *halaqah* dan Kyai berada di tengah untuk menjelaskan materi agama yang disampaikan. Kegiatan belajar mengajar ini berlangsung tanpa penjenjangan kelas dan kurikulum yang ketat; dan biasanya dengan memisahkan kelompok santri berdasarkan jenis kelamin[11]. Akibatnya, pesantren salafiyah cenderung mendapatkan stigma sebagai lembaga pendidikan yang *out of date,* konservatif, eksklusif dan teralienasi.

Dewasa ini pesantren dihadapkan pada banyak tantangan, termasuk di dalamnya modernisasi pendidikan Islam. Dalam banyak hal, sistem dan kelembagaan pesantren telah dimodernisasi dan disesuaikan dengan tuntutan pembangunan, terutama dalam aspek kelembagaan yang secara otomatis akan mempengaruhi penetapan kurikulum yang mengacu pada tujuan institusional lembaga tersebut. Selanjutnya, persoalan yang muncul adalah apakah pesantren dalam menentukan kurikulum harus melebur pada tuntutan jaman sekarang, atau justru ia harus mampu mempertahankannya sebagai ciri khas pesantren yang banyak hal justru lebih mampu mengaktualisasikan eksistensinya di tengah-tengah tuntutan masyarakat. Format kurikulum pesantren bagaimanakah yang memungkinkan bisa menjadi alternatif tawaran untuk masa yang akan datang?.

Menurut Azyumardi Azra dalam sebuah kata pengantar yang berjudul *"Pesantren : Kontinuitas dan Perubahan"* menyatakan; harus diakui bahwa

[11]Sulthon Masyhud, et.al, *Manajemen Pondok Pesantren,* ed. Mundzier Suparta, (Jakarta: Diva Pustaka, 2005), Cet. II, hal. 3

modernisasi paling awal dari sistem pendidikan Islam di Indonesia tidak bersumber dari kalangan Muslim sendiri. Pendidikan dengan sistim yang lebih modern justeru diperkenalkan oleh Belanda; melalui perluasan kesempatan bagi pribumi untuk mendapatkan pendidikan, pada paruh kedua abad XIX[12]. Berbeda dengan Azyumardi Azra, dalam pandangan Nurcholis Madjid; bahwa anggapan *modern* selalu dikonotasikan dengan *"Barat"* . Munculnya anggapan ini karena masih banyak yang meyakini bahwa nilai-nilai ke-*modern*-an didominasi nilai-nilai dari Barat. Padahal sebetulnya nilai-nilai kemodernan itu bersifat universal; dan sangat berbeda dengan nilai-nilai Barat yang lokal atau regional saja. Ketika Barat mengalami kemajuan, secara kebetulan akses informasi sudah berevolusi secara merata ke seluruh belahan dunia; hasilnya simbol modern melekat secara permanen. Yang menjadi arus bawah peradaban modern adalah ilmu pengetahuan dan teknologi; sehingga dapat dipastikan bahwa yang dimaksud dengan kemodernan adalah penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi[13].

Adapun karakteristik kurikulum yang ada pada pondok pesantren modern, mulai diadaptasikan dengan kurikulum pendidikan Islam yang disponsori oleh Kementerian Agama melalui sekolah formal (madrasah). Kurikulum khusus pesantren dialokasikan dalam muatan lokal atau diterapkan melalui kebijaksanaan sendiri. Gambaran kurikulum lainnya adalah pada pembagian waktu belajar, yaitu mereka belajar keilmuan sesuai dengan kurikulum yang ada di madrasah. Waktu selebihnya dengan jam pelajaran yang padat dari pagi sampai malam untuk

[12] Azyumardi Azra, *Esei-Esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998), Cet. 1 hal. 88

[13] Nurcholis Madjid, *op.cit*, hal. 89

mengkaji ilmu Islam khas pesantren (pengajian kitab klasik)[14]. Fenomena pesantren sekarang yang mengadopsi pengetahuan umum untuk para santrinya, tetapi masih tetap mempertahankan pengajaran kitab-kitab klasik merupakan upaya untuk meneruskan tujuan utama lembaga pendidikan tersebut, yaitu pendidikan calon ulama yang setia kepada paham Islam tradisional[15].

Dalam upaya melakukan meningkatkan kualitas pendidikan, pesantren perlu menata kembali kurikulum pesantren. Kurikulum pesantren yang terpaku kepada orientasi ilmu agama klasik menjadi tantangan dengan kemajuan dunia pemikiran masa kini, maka perlu adanya pengajaran dalam lingkungan pesantren yang mampu menelaah kemajuan pemikiran dan isu pemikiran yang *up to date* di dunia akademis.

Apakah dengan mempelajari ilmu Islam 'klasik'; pesantren dianggap berorientasi ke masa depan dan bagaimana pesantren menata kurikulumnya dalam upaya menelaah kemajuan pemikiran dan isu pemikiran akademik. Ini perlu sebuah kajian sehingga tidak memunculkan interpretasi yang berbeda dalam melihat pendidikan di pesantren. Zuhri menyatakan: "Oleh karena itu, mestilah diperlukan upaya-upaya cerdas untuk mengkonstruksi kembali sistem pendidikan pesantren dengan cara merumuskan kurikulum pendidikannya dalam sebuah sistem pendidikan yang padu dan komprehensif *(kaffah)*"[16].

Zuhri juga menyoroti kurikulum pesantren:

---

[14]Ainurrafiq, *"Pesantren dan Pembaharuan: Arah dan Implikasi"*, dalam Abuddin Nata, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001), hal. 155.

[15]Imam Bawani, *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam* (Surabaya: al-Ikhlas, 1998), hal. 95-96.

[16]Saefuddin Zuhri, *Pendidikan Pesantren di Persimpangan Jalan*. Dalam Marzuki Wahid dkk. (Ed). *Pesantren Masa Depan, Wacana Transformasi dan Pemberdayaan Pesantren*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999) hal. 205

> Praktek pendidikan pesantren yang diwarisinya sebagai kekayaan tradisi mestinya membuka peluang sinergi transformasi dan pemberdayaan masyarakat. Sisi strategi pesantren yang memiliki kemampuan melayani pendidikan bagi segenap golongan umur penting untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kurikulum pendidikannya. Demikian pula halya dengan realitas sosial, ekonomi, budaya, dan intelektual masyarakat plural yang kelak dihadapinya[17].

Pesantren sebagai pendidikan berbasis masyarakat dianggapnya belum mampu membangun pendidikan secara *kaffah,* artinya secara tersirat kurikulum pesantren sudah ada, yang mendesak adalah rekonstruksi kurikulum. Pesantren dengan segala kekayaan potensi yang dimilikinya, 'dianggap' belum mampu membuka peluang sinergi transformasi dan pemberdayaan masyarakat sehingga diperlukan upaya membangun sistem kurikulum dengan memperhatikan faktor-faktor yang melatarbelakanginya dan mengevaluasinya pada setiap tingkat satuan pendidikannya. Untuk kepentingan tersebut diperlukan adanya kajian manajemen kurikulum untuk melakukan analisis terhadap rekonstruksi kurikulum yang diperlukan di pesantren dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan peserta didik, masyarakat pengguna jasa pendidikan pesantren, dan para stakeholder pendidikan baik secara external maupun internal. Oleh karena itu penelitian ini dibatasi dengan kajian manajemen kurikulum di PPS Wajar Dikdas yang menyangkut tujuan pendidikan, materi pembelajaran, model dan strategi pembelajaran, evaluasi pembelajaran dan evaluasi kurikulum.

Dari 17 kecamatan di kabupaten Barito Kuala, maka terdapat 17 pesantren yang tersebar di 10 kecamatan. Lima pesantren diantaranya adalah Pondok Pesantren Salafiyah yang mengikuti program Wajib Balajar Pendidikan Dasar 9

[17]*Ibid.*

Tahun; selanjutnya disebut PPS Wajar Dikdas, yaitu PPS *Al-Amin* (Kecamatan Alalak), *Nurussalam* (Kecamatan Mekarsari), *Tabiyatul Furqan* (Kecamatan Alalak), *Al-Munawir* (Kecamatan Tamban) dan *Ibnul Ghaits* (Kecamatan Belawang). PPS *Ibnul Ghaits* baru resmi mengikuti program Wajar Dikdas 9 Tahun pada tahun 2010; sehingga masih belum pernah mengikuti Ujian Nasional (UN).

Dari pengamatan pendahuluan, kelima Pondok Pesantren tersebut melakukan pembelajaran berdasar metode yang mereka anut sejak awal berdirinya pesantren mereka. Mereka melaksanakan proses belajar-mengajar secara rutin dengan pengajian kitab dan pembelajaran mata pelajaran umum yang diujikan pada Ujian Nasional; secara paralel dan berdiri sendiri. Ketika penulis mengawali penelitian, empat dari lima PPS Wajar Dikdas dimaksud telah berhasil mengikuti Ujian Nasional (satu dari empat PPS tersebut baru pertama kali mengikuti UN); artinya mereka telah memenuhi kewajiban menyelenggarakan pembelajaran mata pelajaran umum yang akan diujikan; suatu lompatan pembaruan yang positif dari tradisi kepesantrenan salafiyah, sehingga dapat disebut sebagai keberanian yang menarik untuk dipertahankan; jika dilihat dari sisi pengembangan keilmuan.

Berdasarkan informasi awal dari para pemimpin pesantren; dalam pembelajaran mata pelajaran umum tersebut, mereka dibantu oleh tenaga pengajar yang sebagian berasal dari lembaga pendidikan lain di luar pesantren dan sebagian lainnya memang merupakan ustaz/ustazah dari pesantren masing-masing. Pembelajaran dimaksud berdasar standar kompetensi dan dan kompetensi dasar

mata pelajaran umum yang diterbitkan oleh Kementerian Agama yang berlaku secara nasional.

Masuknya mata pelajaran umum tersebut, secara tidak langsung cukup berpengaruh dalam pengalokasian waktu ketika menyusun jadwal pembelajaran; antara mata pelajaran umum dengan kajian kitab klasik. Keadaan ini tentu perlu untuk dikaji lebih jauh, agar ke depan pada masing-masing pesantren dapat mengelola kurikulum dengan selalu menjaga sinergitas antara kewajiban melaksanakan pembelajaran mata pelajaran umum dengan kajian keagamaan berupa pengajian kitab. Oleh karena itu permasalahan ini perlu diteliti lebih jauh, yang hasilnya akan dijadikan bahan untuk menyusun tesis berjudul : **Manajemen Kurikulum Pondok Pesantren Salafiyah Penyelenggara Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Di Kabupaten Barito Kuala**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka fokus penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen kurikulum pada PPS Wajar Dikdas di Kabupaten Barito Kuala ?
2. Bagaimana usaha menata-kelola kurikulum pada PPS Wajar Dikdas di kabupaten Barito Kuala?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan tujuan umum, secara rinci dijabarkan dalam tujuan-tujuan khusus. Tujuan khusus penelitian ini untuk mengetahui hal-hal berikut:

1. Untuk mengetahui manajemen kurikulum pada PPS Wajar Dikdas di kabupaten Barito Kuala.
2. Untuk mengetahui usaha menata-kelola kurikulum pada PPS Wajar Dikdas di kabupaten Barito Kuala.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan mendatangkan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Aspek teoritis; hasil penelitian ini selain diharapkan dapat memperluas serta memperkaya dan mengembangkan khazanah ilmu pendidikan dalam konteks manajemen pendidikan Islam; dan diharapkan pula mampu menambah wawasan tentang mengenai pengelolaan kurikulum di kalangan pondok pesantren.
2. Aspek praktis; hasil penelitian ini diharapkan juga bermanfaat dari segi praktis operasional:
    a. Sebagai bahan telaah bagi instansi Kementerian Agama; dalam menyiapkan kebijakan dan rencana strategis bidang pendidikan keagamaan khususnya pendidikan kepesantrenan.
    b. Sebagai bahan masukan bagi para Pengawas Pendidikan Agama Islam; agar merencanakan supervisi dan pembinaan edukatif dalam pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar di pondok pesantren salafiyah.
    c. Sebagai informasi penting bagi pengelola, pengurus maupun pihak yayasan sebagai penanggungjawab semua aktivitas pesantren; agar dapat lebih memahami pentingnya perencanaan, pembuatan dan

pengelolaan kurikulum sehingga diharapkan dapat memberi kontribusi bagi kemajuan pembelajaran pada pondok pesantren salafiyah.

d. Sebagai bahan pembelajaran bagi pemimpin dan para ustaz/ustazah dalam menyiapkan membuat dan mengelola kurikulum pada pondok pesantren.

e. Sebagai bahan referensi bagi para peneliti kepesantrenan selanjutnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menjelaskan maksud judul dan ruang lingkup penelitian, maka ditegaskan secara operasional sebagai berikut:

1. Manajemen Kurikulum; yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola dan memperlakukan kurikulum meliputi rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu[18]. Secara operasional, yang dimaksud dengan manajemen kurikulum dalam tulisan ini adalah manajemen kurikulum pondok pesantren salafiyah; yang diberi kepercayaan sebagai penyelenggara program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun; meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum.

[18] Rusman, *Manajemen Kurikulum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 3

2. Pesantren Salafiyah; adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat, baik sebagai satuan pendidikan dan/atau sebagai wadah penyelenggara pendidikan[19].
3. Pondok Pesantren Salafiyah Penyelenggara Program Wajib Belajar Wajar Pendidikan Dasar 9 Tahun; maksudnya adalah lembaga pendidikan pesantren tradisional yang mendapat piagam khusus dari Kementerian Agama; sebagai PPS yang siap mengikuti program Wajib Belajar 9 Tahun dan berkomitmen untuk memberi pengetahuan non-agama kepada para santrinya; sehingga mereka berhak mengikuti Ujian Nasional dan berhak pula mendapat Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan pembiayaan lainnya terkait dengan Ujian Nasional.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran ada beberapa hasil penelitian dan beberapa buku yang berkaitan dengan kurikulum pondok pesantren, yang diharapkan dapat membantu dalam penyusunan tesis ini nantinya, khususnya dari segi pengayaan teori, diantaranya:

Surya Sukti, menulis tentang *Penyelenggaraan Pendidikan di Pondok Pesantren Ibnul Amin – Pemangkih Hulu Sungai Tengah (Gagasan dan Kebijakan).* Substansi hasil penelitian ini, peneliti menyuguhkan ide dan

[19] Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, (Bab I Pasal 1 ayat (5)

kebijakan pesantren tentang proses belajar mengajar, aktivitas kesantrian dan prospek pengembangan pesantren[20].

Syaifuddin Sabda melakukan pula penelitian tentang *Tipologi Konsep Kurikulum Pesantren di Kalimantan Selatan*[21]. Penelitian ini menghasilkan gambaran tentang klassifikasi desain kurikulum yaitu konsep kurikulum tradisional yang melihat kurikulum sejumlah mata pelajaran yang harus disampaikan kepada para santri dan konsep kurikulum modern yang memandang bahwa kurikulum mencakup segala hal yang menyangkut pembentukan santri.

Dina Hermina menyusun hasil penelitian tentang *Pola Pengajaran Umum Pada Pondok Pesantren Darul Hijrah- Cindai Alus Martapura*[22], yang menghasilkan kupasan tentang pola pengajaran umum, bentuk hubungan ustaz dan santri serta berbagai unsur yang bermuatan proses belajar mengajar.

Pada tahun 2005 tesis yang ditulis oleh Mudhiah tentang *Dinamika Kurikulum Pesantren Manbaul'Ulum Kertak Hanyar Kabupaten Banjar*[23] yang mengangkat permasalahan dinamika landasan penetapan kurikulum berdasarkan dinamika ketokohan dan bagaimana dinamika dimensi kurikulum. Penelitian ini menghasilkan deskripsi tentang dinamika pada dimensi kurikulum pesantren Manbaul 'ulum Kabupaten Banjar yang meliputi empat aspek yakni dimensi ide, dimensi rencana tertulis, dimensi implementasi dan dimensi hasil belajar.

---

[20] Surya Sukti, *Penyelenggaraan Pendidikan di Pondok Pesantren Ibnul Amin – Pemangkih Hulu Sungai Tengah (Gagasan dan Kebijakan)*, (Banjarmasin: Puslit IAIN Antasari, 1996)

[21] Syaifuddin Sabda, *Tipologi Konsep Kurikulum Pesantren di Kalimantan Selatan*, (Banjarmasin: Puslit IAIN Antasari, 2000)

[22] Dina Hermina, *Dinamika Kurikulum Pesantren Manbaul'Ulum Kertak Hanyar Kabupaten Banjar*, (Banjarmasin: Puslit IAIN Antasari, 2000)

[23] Mudhiah, *Dinamika Kurikulum Pesantren Manbaul'Ulum Kertak Hanyar Kabupaten Banjar*, Tesis tidak diterbitkan, (Banjarmasin: IAIN Antasari, 2005)

Dwi Priyanto melakukan penelititan untuk tesisnya, dengan judul *Inovasi Kurikulum Pesantren (Memproyeksikan Model Pendidikan Alternatif Masa Depan)*[24], Tesis tersebut dapat menggambarkan dinamika kurikulum pesantren, kiprah pesantren dan tantangan modernitas, serta implementasi inovasi kurikulum dalam pendidikan pesantren.

Kemudian A. Malik menulis hasil penelitian[25] dengan judul *Inovasi Kurikulum Berbasis Lokal di Pondok Pesantren*. Substansi penelitian ini adalah mengupas aspek-aspek kepesantrenan, mulai dari karakteristik pesantren, ragam gaya *'kurikulum'* sampai wacana inovasi kurikulum berbasis lokal.

Berikutnya penelitian tentang *Sistem Pendidikan Pesantren di Kalimantan Selatan*[26], yang ditulis Husnul Yaqin. Buku yang diterbitkan berdasarkan penelitian disertasi penulis; berhasil memaparkan tentang sistem pendidikan kepesantrenan sebagai kesatuan elemen yang saling terkait dan saling mempengaruhi antara kurikulum pendidikan pesantren, proses pembelajaran serta manajemen pesantren di Kalimantan Selatan.

Penelitian untuk tesis yang dilakukan oleh Arpani di Pondok Pesantren Ibnu Mas'ud Putera di kabupaten Hulu Sungai Selatan[27]. Tesis ini menghasilkan ulasan deskriptif permasalahan bagaimana dinamika landasan dasar penetapan kurikulum berdasarkan dinamika ketokohan dan bagaimana dinamika dimensi

[24] Dwi Priyanto, *Inovasi Kurikulum Pesantren (Memproyeksikan Model Pendidikan Alternatif Masa Depan),* Tesis tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Universitas Nasional Yogyakarta, 2006)

[25] A. Malik, *Inovasi Kurikulum Berbasis Lokal di Pondok Pesantren,* (Jakarta: Balitbang-Depag, 2008)

[26] Husnul Yaqin, *Sistem Pendidikan Pesantren di Kalimantan Selatan,* (Banjarmasin: Antasari Press, 2009).

[27] Arpani, *Dinamika Dimensi Kurikulum pada Pondok Pesantren Ibnu Mas'ud Putera Kabupaten Hulu Sungai Selatan,* Tesis tidak diterbitkan, (Banjarmasin: IAIN Antasari, 2005)

kurikulum yang meliputi ide, rencana tertulis, implementasi dan hasil belajar berdasarkan dinamika pada pondok pesantren Ibnu Mas'ud Putera Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Penelitian yang penulis lakukan adalah mengetahui dan mengenal manajemen kurikulum, mengetahui usaha apa saja yang telah dan sebaiknya dilakukan dalam menata-kelola kurikulum pada Pondok Pesantren Salafiyah Penyelenggara Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di kabupaten Barito Kuala; bagaimana pengaturan antara pembelajaran dengan pengajian kitab-kitab keagamaan dengan tambahan pembelajaran mata pelajaran umum (sebagai konsekuensi keikutsertaan sebagai penyelenggara program).

Adanya sejumlah tesis, hasil penelitian dan beberapa buku yang memuat uraian tentang 'kurikulum' dan jatidiri pesantren tersebut diharapkan dapat membantu penulis dalam melengkapi kerangka teori penelitian. Penelitian ini dianggap penting karena dapat dijadikan salah satu parameter untuk mengukur efektivitas implementasi berbagai Peraturan Pemerintah yang mengatur keberadaan pondok pesantren dalam lingkaran Sistem Pendidikan Nasional serta pelaksanaan tugas penyelenggaraan wajib belajar 9 tahun.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini dibagi dalam lima bab, terdiri dari: Bab I; Pendahuluan yang meliputi latar belakang, perumusan masalah, definisi operasional, tujuan dan kegunaan penelitian, telah pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II. Tinjauan Teoretis; yang merupakan kerangka ideal teoretis yang dijadikan acuan untuk mengukur pengelolaan kurikulum yang baik; bab ini juga

memuat berbagai aspek tentang kepesatrenan dan tentang PPS yang dipercayakan menyelenggarakan program Wajib Belajar.

Bab III. Metodologi Penelitian, mengemukakan jenis dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data, serta tahapan penelitian. Bab ini merupakan kerangka penelitian lapangan untuk diketahui metode dan teknik penelitian.

Bab IV. Deskripsi Hasil Penelitian, menyajikan data hasil penelitian. Pada deskripsi lokasi penelitian disajikan gambaran umum dan sistem pembelajaran serta manajemen kurikulum ketiga pesantren yang diteliti,

Bab V. Pembahasan Hasil Penelitian, berisikan analisis atas hasil penelitian berupa gambaran dan permasalahan manajemen kurikulum pesantren secara kasus per kasus.

Bab VI. Penutup, berisikan simpulan dan saran-saran untuk peningkatan pemahaman akan manajemen kurikulum pada pondok pesantren pada masa-masa yang akan datang.

Demikian uraian Bab I ini, selanjutnya Bab II akan menyajikan kajian teoritis tentang Manajemen, Kurikulum, Program Wajar Dikdas dan Pesantren.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini, akan diuraikan beberapa topik yang merupakan kerangka dasar dan landasan teoritis terhadap masalah yang akan diteliti. Kajian kepustakaan ini meliputi; (A) Pengertian Manajemen, Kurikulum dan Manajemen Kurikulum; (B) Program Wajib Belajar 9 Tahun pada PPS dan (C) Masalah Kepesantrenan; meliputi pengertian dan sejarah singkat pondok pesantren, unsur dan tipologi pondok pesantren serta manhaj dan metode pembelajarannya.

A. Manajemen Kurikulum

1. Manajemen

Dari segi bahasa manajemen berasal dari bahasa Inggris dari kata *management* yang berarti pengelolaan, ketata laksanaan atau tata pimpinan. Dalam kamus Inggris-Indonesia kata *management* berasal dari akar kata *to manage* yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola dan memperlakukan.[28] Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia manajemen berarti penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran.[29] Senada dengan pengertian tersebut; Sondang P Siagian mengartikan manajemen sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka mencapai tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain[30].

[28] John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1995), h. 372
[29] *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, versi 1.1. http://ebsoft.web.id, *23 Mei 2012*
[30] Sondang P Siagian, *Filsafah Administrasi*, (Jakarta: CV. Mas Agung, 1990), hal. 5

Manajemen belum memiliki definisi yang mapan dan diterima secara universal.[31] Banyak para ahli yang memberi pandangan berbeda tentang batasan manajemen, sehingga tidak mudah membuat definisi yang diterima semua orang. Namun demikian, dari berbagai pemikiran para ahli tentang definisi manajemen, sebagian besar menyatakan bahwa manajemen merupakan suatu proses mendayagunakan orang atau sumber lainnya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan effisien. Beberapa pendapat tentang manajemen adalah seperti berikut ini:

Menurut Hoyle (dalam Bush) seperti dikutip Engkoswara; *management is a continous process through which members of an organization seek to coordinate their activities and utilize their resources in order to fulfil the various tasks of an organization as efficiently as possible*[32]. Pendapat lain dari Rue dan Byars: *management is a process of that guiding or directional group of people toward organizational goals or objectivities*[33].

Kemudian Mary Parker Follet, misalnya, mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi.[34] Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan

---

[31] Robbins, Stephen dan Mary Coulter. *Management, 8th Edition*. (New Jersey: Prentice Hall, 2007). *http://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen 23 Mei 2012*

[32] Engkoswara dan Aan Komariah, *Administrasi Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2010) hal. 86 **dari** Tony Bush. CM, *Leadership and Strategic Management in Education*, (London: Paul Chapment Publishing Ltd, 2000), hal. 4

[33] Engkoswara dan Aan Komariah, *Ibid*, **dari** Leslie Rue dan Lloyd Byars, *Management: Theory and Aplications*, (USA: Richard D Irwin, 1996) hal. 9

[34] Vocational Business: Training, Developing and Motivating People by Richard Barrett - Business & Economics - 2003. - Page 51. *http://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen 23 Mei 2012*

pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (*goals*) secara efektif dan efesien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal.[35]

Ramayulis menyatakan bahwa pengertian yang sama dengan hakikat manajemen adalah *al-tadbir* (pengaturan).[36] Kata ini merupakan derivasi dari kata *dabbara* (mengatur) yang banyak terdapat dalam Al Qur'an seperti firman Allah :

يُدَبِّرُ الأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ

"Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu" (Al Sajdah : 05).

Dari isi kandungan ayat di atas dapatlah diketahui bahwa Allah SWT. adalah *pengatur alam* (*manager*). Keteraturan alam raya ini merupakan bukti kebesaran Allah SWT dalam mengelola alam ini. Namun, karena manusia yang diciptakan Allah SWT telah dijadikan sebagai khalifah di bumi, maka dia harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah mengatur alam raya ini.

Sementara pengertian manajemen menurut istilah adalah proses mengkordinasikan berbagai aktivitas kerja sehingga dapat selesai secara efesien dan efektif dengan dan melalui orang lain[37]. Sedangkan Sondang P Siagian mengartikan manajemen sebagai kemampuan atau keterampilan untuk

[35] Griffin, R. 2006. Business, 8th Edition. NJ: Prentice Hall. *http://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen 23 Mei 2012*

[36] Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1992), h. 259

[37] Robbin dan Coulter, *Manajemen (*ed. kedelapan*)*, (Jakarta: PT Indeks, 2007), h. 8

memperoleh suatu hasil dalam rangka mencapai tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain[38]. Lebih jauh, Hills menyatakan: "*the term management to mean all those people who are responsible for achieving the organization's objectives, either by being responsible for other peoples work or for their own as specialists at the same level*"[39].

Menurut Stoner: "Manajemen adalah kebiasaan yang dilakukan secara sadar dan terus menerus dalam membentuk organisasi"[40]. Adapun organisasi adalah kumpulan sumber daya yang terdiri atas manusia, dana, sarana dan prasarana, sistem, gagasan, permasalahan, resiko dan lain-lain, dalam rangka mencapai tujuan. Secara sempit organisasi menurut Stoner adalah: "Dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam cara yang terstruktur untuk mencapai sasaran spesifik atau sejumlah sasaran"[41]. Stoner mendefinisikan manajemen secara klasik pada sekumpulan orang, karena sumber utama organisasi adalah orang.

Organisasi memberi kontribusi kepada kehidupan masa kini dalam membangun masa depan yang lebih baik dan membantu individu melakukan hal yang sama. Produk baru dihasilkan dan dikembangkan sebagai hasil kekuatan kreatif yang muncul melalui kerjasama yang menghubungkan manusia dengan masa lalunya sehingga mampu membangun sejarah manusia dengan sejarah organisasinya. Keistimewaan manajemen dalam organisasi adalah menangani

[38]Sondang P Siagian, *Filsafah Administrasi*, (Jakarta: CV. Mas Agung, 1990), h . 5

[39] Hills, PJ., *A Dictionary of Education*, (London: Routledge & Kegan Paul, 1982), hal. 54

[40] James AF Stoner, R. Edward Freeman dan Daniel R. Gilbert Jr, *Manajemen, (terjemahan Alexander Sindoro)*, (Jakarta: Prenhalindo, 1996) hal. 7

[41] *Ibid*, hal. 6

masalah waktu dan hubungan manusia, menurut Stoner[42]: Ide tentang waktu dalam organisasi mempunyai beberapa elemen berikut:

1. Manajemen adalah usaha menciptakana *masa depan yang lebih baik*, dengan melihat masa lalu dan masa kini.
2. Manajemen dipraktekkan di dalam dan refleksi dari *era sejarah tertentu*.
3. Manajemen adalah kegiatan yang menghasilkan konsekuensi dan pengaruh yang *muncul dengan berlalunya waktu*.

Proses pendidikan terjadi pada sistem organisasi dan tidak terlepas dengan terjadinya perubahan-perubahan sejalan dengan perubahan waktu yang melibatkan kepentingan internal dan external. Sebagai industri jasa, pendidikan harus memperhatikan kualitas demi kepentingan pelanggan dan stakeholder yang akan, sedang dan telah memberikan kontribusinya terhadap keberlangsungan dan kemajuan pendidikan itu sendiri. Dalam hal kualitas, menurut Sallis:

> Definisi relatif kualitas ini memiliki dua aspek. Pertama, adalah pengukuran pada spesifikasinya. Kedua, memenuhi keperluan pelanggan. Kualitas bagi prosedur adalah pencapaian produk atau pelayanan menjadi sesuatu yang spesifik dan memiliki gaya yang konsisten. Kualitas oleh produser didemonstrasikan dalam system, diketahui sebagai suatu jaminan kualitas sistem, di mana dicapai suatu konsistensi dan dapat memenuhi standar tertentu[43].

Sallis membagi kualitas atas kehendak pelanggan dan kebijakan manajemen. Mana yang didahulukan ketika terjadi sebuah nilai kontradiktif; karena tidak selamanya pandangan konsumen identik dengan produsen. Menurut Sallis[44]: "Organisasi yang mengikuti *Total Quality Management* (TQM) mendefinisikan kualitas sebagaimana yang didefinisikan oleh pelanggan.

[42] *Ibid*, hal. 8

[43] Edward Sallis, *Total Quality Management Dalam Konteks Pendidikan (Terjemahan Udin S. Saud)*, (Bandung: Program Studi Administrasi Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, 2005), hal. 14

[44] *Ibid*, hal. 15

Alasannya sederhana, pelangganlah yang akhirnya memutuskan kualitas, tanpa mereka organisasi tidak akan ada". Dalam konteks pendidikan yang mengadopsi dunia industri; Sallis berbicara tentang TQM, yang ada benarnya diterapkan ketika masyarakat menyadari makna, fungsi, dan tujuan pendidikan. Pendidikan tidak fokus pada kecerdasan akal dan kesempatan kerja saja, tapi juga pada pewarisan nilai-nilai kemanusiaan antar generasi. Apalagi pendidikan Islam tidak terlepas dari *eksistensi* Tuhan di dalamnya. TQM dalam konteks pendidikan Islam cenderung menawarkan kualitas program melalui partisipasi aktif orang tua dan stakeholder. Keterlibatan stakeholder dalam dunia pendidikan untuk dapat lebih saling tukar informasi antar dunia luar pendidikan dengan dunia pendidikan. Menurut Y.C. Cheng, seperti dikutip Abu Duhou[45]:

> Pada 1980-an, konsep partisipasi masyarakatdalam manajemen sekolah merupakan tema utama dalam reformasi pengelolaan sekolah di pelbagai sistem pendidikan. Para pembuat kebijakan mulai percaya bahwa "untuk meningkatkan kualitas pendidikan, merupakan keharusan untuk melakukan lompatan dari level pembelajaran kelas ke tingkat organisasi sekolah" dan mereformasi sistem struktur serta bentuk manajemen sekolah.

Dalam pendidikan mengandung arti kepentingan orang tua dan stakeholder menjadi prioritas utama. Terhadap partisipatif orang tua dan stakeholder lembaga pendidikan harus siap melayani secara akademis. Menurut Murgatroyd: *"There are three basic definitions of quality: quality assurance, contract conformance, and customer-driven"*[46].Tiga hal mendasar dalam persoalan *kualitas:* yaitu jaminan mutu, kesesuaian kontrak, dan kendali pelanggan. Agar terbentuk kualitas

[45] Ibtisam Abu Duhou, *School Base Management (Terjemahan: Noryamin Aini)*, (Jakarta: Logos, 2002), hal. 2

[46] Stephen Murgatroyd and Colin Morgan, *Total Quality Management and The School*, (Birmingham-Philadelphia: Open University Press, 1993), hal. 45

pendidikan; salah satunya disarankan upaya desentralisasi kebijakan pendidikan dari pusat menjadi berbasis sekolah. Tujuannya agar stakeholder dan orang tua mampu mengontrol secara langsung kualitas pendidikan. Problem muncul ketika tingkat kesadaran masyarakat belum cukup tinggi terhadap nilai-nilai pendidikan, karena nilainya lebih kepada pintu masuk ke dunia kerja, sehingga pendidikan kehilangan pewarisan nilai-nilai.

Implementasi manajemen berbasis sekolah (MBS) merupakan bagian dari usaha menyeimbangkan perbedaan, fleksibilitas, dan pengawasan lokal untuk menjamin penyelenggaraan dan kualitas pendidikan dapat merata, lintas geografis, lintas sosial-ekonomi, lintas perbedaan etnik dan lintas bangsa. MBS menuntut partisipasi lebih besar dari para pelaksana, orang tua dan stakeholder dalam proses pembuatan kebijakan dan keputusan sekolah. Keputusan dibuat secara kolektif dan kolegial sehingga diperoleh kesempatan peningkatan profesionalisme pelaksana dan kerjasama pelaksana dan orangtua dalam bidang pendidikan.

Kebersamaan orang tua dan stakeholder dalam menghasilkan keputusan-keputusan yang harus dilaksanakan manajer sekolah dalam mengendalikan institusi, tidak terlepas dari program jangka panjang terhadap program jangka menengah dan diimplementasikan dalam program jangka pendek. Keterlibatan staf pelaksana merupakan upaya sekolah mengembangkan sikap inovasi dan menumbuhkan motivasi para guru; seperti dalam TQM. Staf pelaksana, dalam konsep TQM adalah pelanggan internal yang setiap orang memiliki kepentingan terhadap kualitas yang dikehendakinya[47]. Hal ini memungkinkan adanya konflik

[47] Edward Sallis, *Op. cit*, hal. 22

dengan memburuknya hubungan internal yang berakibat kerja lembaga tidak harmonis. Dengan keterlibatan staf dalam menentukan kebijakan diharapkan hubungan internal menjadi lebih operasional dengan meminimalisasi konflik dan persaingan internal. Kondisi MBS identik dengan penerapan TQM di sekolah.

Apabila digambarkan bahwa peserta didik (siswa atau santri) dalam produksi pendidikan adalah subyek pendidikan[48]; seperti gambar berikut ini:

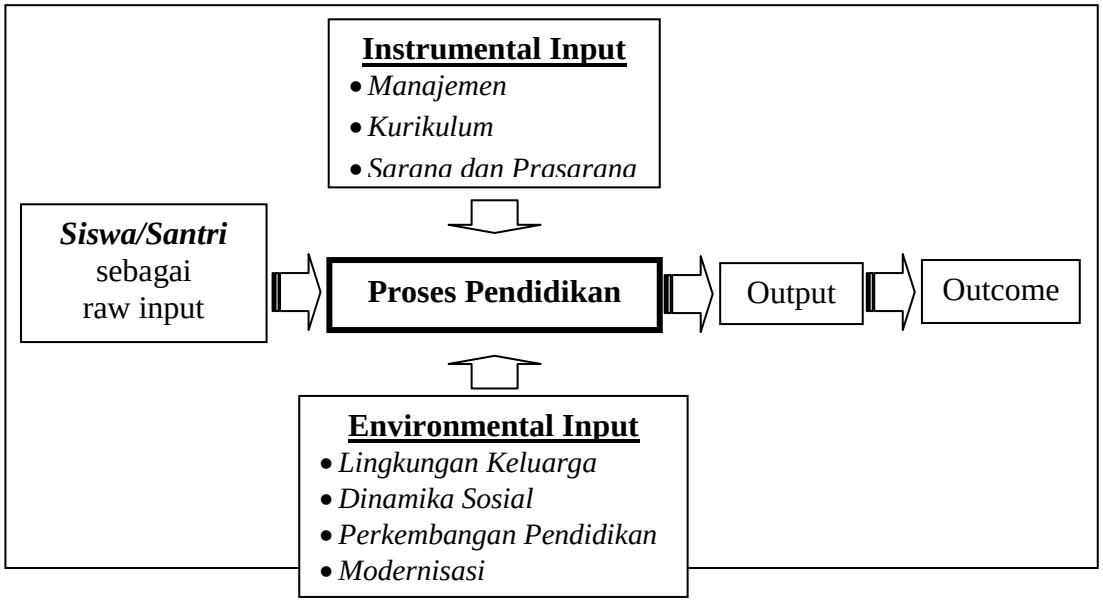

Gambar 1: Hubungan Input, Proses dan Keluaran

Karena itu, siswa harus dipandang dari dua sisi, sebagai subyek proses yang dibentuk dalam proses pendidikan agar menghasilkan keluaran yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Di sisi lain siswa sebagai pelanggan internal jasa pendidikan, digambarkan sebagai *customer yang paling akhir* penerima materi pembelajaran sehingga harus menerima pelayanan akademis sesuai dengan minat dan bakatnya.

[48] Ngalim Purwanto, *Psikologi Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), hal. 106

2. Kurikulum

a. Pengertian

Ada beberapa pendapat tentang arti kurikulum. Kurikulum berasal dari bahasa Latin, yaitu *curriculum* yang berarti 'bahan pengajaran'; yang berasal dari kata dasar *"currere"* yang artinya 'berlari cepat dan tergesa-gesa'[49]. Ada pula yang mengartikan *'perlombaan'* (race cause)[50]Pendapat lain, kurikulum berasal dari bahasa Perancis; *courier*; yang berarti 'berlari'[51]. Makna lainnya disebutkan bahwa kurikulum diartikan 'kumpulan subjek yang diajarkan di sekolah, atau arah suatu proses belajar[52]. Ada pula pendapat; kurikulum berasal dari bahasa Inggris "Curriculum" berarti 'susunan rencana pelajaran'[53].

Menurut istilah, ada beberapa pengertian kurikulum :

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 ayat 19: "Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan untuk mencapai tujuab pendidikan tertentu". Kurikulum merupakan syarat mutlak yang memiliki peran sentral dalam bidang pendidikan. Menurut Tilaar: "Kurikulum adalah keseluruhan program, fasilitas, dan kegiatan suatu lembaga pendidikan atau pelatihan untuk mewujudkan visi dan misi lembaganya"[54].

---

[49] Omar Mohammad al-Toumy al-Syaibany, *Falsafah Pendidikan Islam*, Terj. Hassan Langgulung, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997) hal. 519 -522

[50] Cebtral, Clifton F, *The Undergraduate Curriculum : A Guide to innovation and refarm*, (Colorado, Boulder, Westive Bless, 1978) hal.4

[51] Omar Mohammad al-Toumy al-Syaibany, *Loc.cit*

[52] William B. Ragan, *Modern Elementary Curriculum* (Revised Edition), (USA: Rinehart and Winston, Inc, 1960) Hal. 3, seperti dikutip A. Malik, *Inovasi Kurikulum Berbasis Lokal ……*, hal. 25

[53]WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976) hal. 543

[54] HAR. Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasi*onal, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000) hal. 177

Pendapat lain dari Rusman, yaitu: "Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu"[55]. Batasan lain tentang kurikulum ditulis oleh John Dewey dalam bukunya *'The Child and The Curriculum'* merujuk istilah kurikulum sebagai "pengajian di sekolah dengan mengambil kira kandungan dari masa lampau hingga masa kini". Pembentukan kurikulum menekankan kepentingan dan keperluan masyarakat[56]. Sementara menurut Jouhn S. Brobaeker dalam bukunya yang berjudul "*Modern Philosophice of Education*" yang dikutip oleh Syaifuddin Sabda, diartikan sebagai sejumlah bahan pelajaran (*a cause of study*) atau sejumlah mata pelajaran yang harus diberikan oleh guru untuk menuju tujuan pendidikan[57]. Selain itu Iskandar Wiryokusumo menyatakan, bahwa kurikulum adalah "Program pendidikan yang disediakan sekolah untuk siswa"[58]. Sementara menurut S. Nasution, kurikulum adalah "Suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar-mengajar di bawah bimbingan dan tanggung-jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajarnya"[59].

Menurut Sukmadinata: "Kurikulum merupakan rancangan pendidikan yang merangkum semua pengalaman belajar yang disediakan bagi siswa di sekolah atau di lembaga pendidikan lainnya. Terintegrasi didalamnya filsafat,

[55] Rusman, *Manajemen Kurikulum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 3

[56] Suji, *Perjalanan Kurikulum di Indonesia*, http://suji.student.fkip.uns.ac.id/2009/06/25/perjalanan-kurikulum-di-indonesia/ diakses: 01/11/11

[57] Syaifuddin Sabda, *Konsep Kurikulum Pendidikan Islam Refleksi Pemikiran Al-Ghazali*, (Banjarmasin, Antasari Pers. 2008) h. 59

[58] Iskandar Wiryokusumo dan Usman Mulyadi, *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1988), hal. 6.

[59] S. Nasution, Kurikulum, *Kurikulum dan Pengajaran* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hal. 5.

nilai-nilai, pengetahuan dan perbuatan pendidikan"[60]. Dengan kurikulum, manajemen sekolah dapat menentukan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan dalam tingkatannya. Kurikulum harus menyentuh aspek masa yang akan datang tiga unsur pembentuk essensial manusia yaitu qalbu, akal, dan fisik; dengan mempertimbangkan kepentingan stakeholder dan lingkungan masyarakat sekitar.

Fungsi pendidikan nasional tercakup dalam kurikulum yang mencakup orang yang berkepentingan dengan pendidikan. Maka fungsi kurikulum: (1) Bagi guru sebagai petunjuk dan pedoman pelaksanaan proses belajar-mengajar. (2) Bagi para kepala sekolah dan supervisor sebagai petunjuk dan pedoman bimbingan dan pengawasan. (3) Bagi orang tua sebagai petunjuk dan pedoman melakukan bibingan dan pengawasan terhadap para puteranya di rumah. (4) Bagi masyarakatdan stakeholder sebagai petunjuk dan pedoman untuk member bantuan pendidikan. (5) Bagi pengguna jasa pendidikan sebagai petunjuk dan pedoman untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian pendidikan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat di waktu yang akan datang. (6) Bagi dunia usaha sebagai petunjuk dan pedoman penilaian kesesuaian dunia pendidikan dengan kepentingan dunia kerja atau keterampilan. (7) Bagi siswa (yang menurut Alexander Inglis; seperti dikutip Hamalik[61]) sebagai: fungsi penyesuaian *(the adjustive function)*, fungsi integrasi *(the integrating function)* fungsi diferensiasi *(the differentiating*

[60] Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*: (Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 2010) hal. 150

[61] Oemar Hamalik, *Perkembangan Kurikulum: Dasar-dasar dan Perkembangannya*, (Bandung: Bandar Maju, 1990) hal. 221

function), fungsi persiapan *(the propaedeutic function),* fungsi pemilihan *(the selective function),* fungsi diagnostik *(the diagnostic function).*

Menurut Sukmadinata, komponen kurikulum meliputi empat hal pokok yang saling berkaitan[62]. Komponen yang ***pertama*** adalah tujuan kurikulum; yang dirumuskan berdasarkan dua hal: (1) perkembangan tuntutan, kebutuhan dan kondisi masyarakat, (2) didasari oleh pemikiran-pemikiran dan terarah kepada pencapaian nilai-nilai filosofis, terutama falsafah negara[63]. Sementara tujuan pendidikan nasional; seperti menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3, yang menyatakan:

> Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pendidikan nasional bertujuan menciptakan manusia berakhlak mulia, beriman, bertaqwa dan meyakini sebagai kebenaran dan membuktikan kebenaran itu dengan akal, rasa dan karsa pada setiap perbuatan dan tingkah lakunya sehari-hari.

Tujuan pendidikan nasional dan pendidikan Islam secara utuh berada pada posisi setara yang tidak perlu dipertentangkan. Kedua tujuan tersebut dapat dijabarkan menjadi tujuan institusional, tujuan pengajaran/kurikuler, dan tujuan instruksional[64]. Sehingga jika digambarkan seperti pada diagram di bawah ini:

---

[62] Nana Syaodih Sukmadinata, *Op Cit*: hal. 102
[63] *Ibid*, hal. 103
[64] Ahmad Tafsir, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), hal. 14

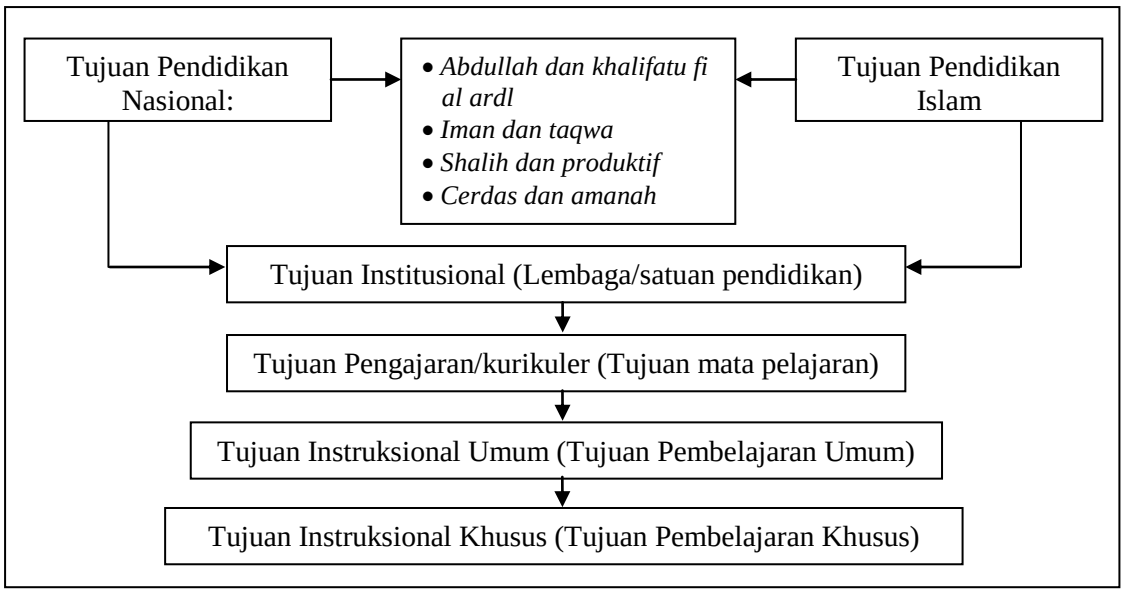

Gambar 2 : Kolaboratif Tujuan Pendidikan Nasional dan Pendidikan Islam

Komponen kurikulum yang ***kedua*** adalah isi atau materi kurikulum yang menentukan kualitas kurikulum. Untuk mencapai tujuan pengajaran yang telah ditentukan diperlukan bahan ajar. Bahan ajar tersusun atas berbagai topik dan subtopik tertentu. Tiap topik dan subtopik mengandung ide-ide pokok yang relevan dengan tujuan yang telah ditetapkan dan tersusun dalam rancangan tertentu yang membentuk rancangan bahan ajar[65]. Bahan ajar yang dipelajari siswa sebaiknya tidak hanya berdasarkan pada buku teks pelajaran. Perlu pula penggunaan dan mengembangkan berbagai bahan ajar melalui media dan sumber belajar yang sesuai dengan topik bahasan. Demikian juga dengan keterlibatan masyarakat sekelilingnya (*community based experiental learning*) harus mulai dikembangkan secara strategis supaya menghasilkan kemampuan siswa yang terintegrasi dengan lingkungan[66].

[65] Nana Syaodih Sukmadinata, *Op cit*, hal. 105
[66] Rusman, *Op.cit*, hal. 19

Komponen kurikulum ***ketiga;*** yaitu metode pembelajaran yang terkandung di dalamnya strategi dan teknik pembelajaran yang berkaitan dengan siasat, cara atau system penyampaian isi kurikulum. Menurut Rusman, bahwa pembelajaran di dalam kelas merupakan sarana untuk melaksanakan dan menguji kurikulum; yang didalam kegiatan tersebut semua konsep, prinsip, nilai, pengetahuan, metode, alat dan kemampuan guru diuji untuk mewujudkan bentuk kurikulum yang nyata (*actual curriculum – curriculum in action*)[67].

Komponen kurikulum ***keempat*** adalah evaluasi, ditujukan untuk menilai pencapaian kurikulum atau menilai proses implementasi kurikulum secara utuh yang pada akhirnnya dapat digunakan sebagai pertimbangan perbaikan dan penyempurnaan kurikulum di waktu yang akan datang. Seperti pendapat Groundlund; bahwa evaluasi kurikulum adalah proses yang sistematis meliputi pengumpulan analisis dan interpretasi informasi/data untuk menentukan sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran[68]. Evaluasi dapat juga dimanfaatkan sebagai masukan dalam penentuan pengambilan kebijakan dalam pengambilan keputusan tentang kurikulum dan pendidikan. Hopkins dan Antes menyebutkan bahwa evaluasi dimaksud adalah pemeriksaan secara terus menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, program pendidikan, dan proses belajar mengajar untuk mengetahui tingkat perubahan siswa dan ketepatan keputusan tentang gambaran siswa dan efektivitas program[69].

---

[67] *Ibid*, hal. 74

[68] Rusman, *Ibid*, hal. 93 – dari: Norman Groundlund, *Constructing Achievement Tes*, 3rd. (New York: Prentice Hall-Inc, 1982)

[69] *Ibid*

b. Pengembangan kurikulum

Pengembangan kurikulum adalah suatu proses yang menentukan bagaimana kurikulum akan dapat dilaksanakan. Bondi dan Wiles berpendapat bahwa pengembangan kurikulum yang terbaik adalah proses yang meliputi banyak hal[70], yakni 1) kemudahan suatu analisis tujuan, 2) rancangan suatu program, 3) penerapan serangkaian pengalaman yang berhubungan, dan 4) peralatan dalam evaluasi proses. Sementara menurut Dakir; ada empat unsur yang perlu diperhatikan dalam pengembangan, yaitu 1) merencanakan, merancang dan memprogramkan bahan ajar serta pengalaman belajar, 2) karakteristik peserta didik, 3) tujuan yang akan dicapai dan 4) kriteria-kriteria untuk mencapai tujuan[71].

Pengembangan kurikulum agar dapat berhasil sesuai dengan yang diinginkan, maka dalam pengembangan kurikulum diperlukan landasan-landasan pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum menurut Dimyati dan Mudjiono[72] mengacu pada tiga unsur, yaitu 1) nilai dasar yang merupakan falsafah dalam pendidikan manusia seutuhnya, 2) fakta empirik yang tercermin dari pelaksanaan kurikulum, baik berdasarkan penilaian kurikulum, studi, maupun survei lainnya, dan 3) landasan teori yang menjadi arahan pengembangan dan kerangka penyorotnya.

Pengembangan kurikulum mempunyai makna yang cukup luas, menurut Nana Syaodih Sukmadinata; pengembangan kurikulum bisa berarti penyusunan kurikulum yang sama sekali baru (*curriculum-construction*), bisa juga berarti menyempurnakan kurikulum yang telah ada (*curriculum improvement*)[73] . Sedangkan model adalah abstraksi dunia nyata atau representasi peristiwa kompleks atau sistem, dalam bentuk naratif, matematis, grafis serta lambang-lambang lainnya[74].

---

[70] Bondi, J., dan Wiles, J. 1989. *Curriculum Development: A Guide to Practice*. (Columbus: Merril Publishing Company, A Bell & Howel Information Company, 1989), hal. 87 dari : http://suji.student.fkip.uns.ac.id/2009/06/25/perjalanan-kurikulum-di-indonesia/ diakses : 01/11/11

[71] H. Dakir, *Perencanaan Pengembangan Kurikulum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 93

[72] Dimyati, dan Mudjiono. *Belajar dan Pembelajaran*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) hal. 268

[73] Nana Syaodih Sukmadinata, *Op cit,* hal. 1

[74] Wina Sanjaya, *Kajian Kurikulum dan Pembelajaran* (Jakarta : Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, 2007) hal. 177

Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan kurikulum agar menghasilkan rencana kurikulum yang luas dan spesifik. Proses ini berhubungan dengan seleksi dan organisasi berbagai komponen situasi belajar mengajar, antara lain penetapan jadwal, pengorganisasian kurikulum dan spesifikasi tujuan yang disarankan, mata pelajaran, kegiatan, sumber dan alat pengukur pengembangan kurikulum mengacu pada kreasi sumber-sumber unit, rencana unit, dan garis pelajaran kurikulum yang lainya, untuk memudahkan proses belajr mengajarnya.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa model pengembangan kurikulum adalah berbagai bentuk atau model yang nyata dalam penyusunan kurikulum yang baru ataupun penyempurnaan kurikulum yang telah ada. Dalam pengembangan kurikulum tidak dapat lepas dari berbagai faktor maupun aspek yang mempengaruhinya; seperti cara berpikir, sistem nilai (nilai moral, keagamaan, politik, budaya, dan sosial), proses pengembangan kebutuhan peserta didik, lingkup (*scope*) dan urutan (*sequence*) bahan pelajaran, kebutuhan masyarakat maupun arah program pendidikan[75].

c. Model dan Fungsi Pengembangan Kurikulum

1). Model Pengembangan Kurikulum

Berdasarkan perkembangan dan pemikiran para ahli kurikulum, maka pada saat ini telah diperkenalkan berbagai model pengembangan kurikulum. Setiap model tersebut memiliki karakteristik dan ciri khusus pada pola desain, implementasi, evaluasi dan tindak lanjut dalam pembelajaran. Wina Sanjaya membagi model pengembangan kurikulum menjadi empat bagian[76] yaitu: 1) Model Tyler, 2) Model Taba, 3) Model Oliva dan 4) Model Beauchamp.

a) *Model Ralph W. Tyler* menekankan rancangan kurikulum yang sesuai dengan tujuan dan misi institusi pendidikan. Empat langkah fundamental

[75] Sri Rahayu Chandrawati, Model-model Pengembangan Kurikulum dan Fungsinya bagi Guru, **http: //chandrawati.wordpress.com/2009/04/20/model-model-pengembangan-kurikulum-dan-fungsinya-bagi-guru/** diakses 01/11/11

[76] Wina Sanjaya, *Kurikulum dan Pembelajaran, Teori dan Praktik Pengembangan Kuirkulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)* (Jakarta; Fajar Interpratama Offset, 2008) hal. 82 - 91

Tyler: (1) berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai, (2) berhubungan dengan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan, (3) berhubungan dengan pengorganisasian pengalaman belajar, (4) berhubungan dengan pengembangan evaluasi.

b) *Model Hilda Taba* menitik beratkan pada pengembangan kurikulum sebagai proses perbaikan kurikulum. Lima langkah pengembangan kurikulum Model Hilda Taba: (1) Menghasilkan unit-unit percobaan, (2) Menguji coba unit eksperimen untuk memperoleh data dalam rangka menemukan validitas dan kelayakangunaannya, (3) Merevisi dan mengkonsolidasikan unit-unit eksperimen berdasarkan data yang diperoleh dalam uji coba, (4) Mengembangkan keseluruhan kerangka kurikulum, (5) Implementasi dan diseminasi kurikulum yang telah teruji.

c) *Model Oliva* menekankan kurikulum secara sederhana, komprehensif dan sistematik, dengan 12 langkah yang saling berkaitan: (1) menetapkan dasar filsafat yang digunakan dan pandangan tentang hakikat belajar, (2) menganalisis kebutuhan masyarakat tempat sekolah itu berada, (3) merumuskan tujuan umum kurikulum yang didasarkan pada kebutuhan seperti yang tercantum pada langkah sebelumnya, (4) merumuskan tujuan umum kurikulum yang merupakan penjabaran dari tujuan umum pendidikan, (5) mengorganisasikan rancangan implementasi kurikulum , (6) menjabarkan kurikulum dalam bentuk perumusan tujuan umum pembelajaran, (7) merumuskan tujuan khusus pembelajaran, (8) menetapkan dan menyeleksi strategi pembelajaran yang dimungkinkan dengan mencapai tujuan pembelajaran, (9)

menyeleksi dan menyempurnakan teknik penilaian yang digunakan, (10) mengimplementasikan strategi pembelajaran, (11) mengevaluasi pembelajaran, dan (12) mengevaluasi kurikulum.

d) *Model Beauchamp* menetapkan lima langkah proses pengembangan kurikulum: (1) menetapkan wilayah yang akan melakukan perubahan kurikulum, (2) menetapkan pihak-pihak yang akan terlibat dalam proses pengembangan kurikulum, (3) menetapkan prosedur yang akan ditempuh, (4) implemetasi kurikulum, (5) melaksanakan evaluasi kurikulum.

Model yang lebih variatif diperkenalkan oleh Nana Syaodih Sukmadinata yang membagi model-model pengembangan kurikulum menjadi *delapan model*[77] yaitu : 1) the Administrative (line staff model) Model, 2) the Grass Roots Model, 3) Beauchamp's System, 4) the Demonstration Model, 5) Taba's Inverted Model, 6) Rongers's Interpersonal Relation Model, 7) the Systematic Action Reseach Model, dan 8) Emerging Technical Model.

Sementara itu Ase Suherman dkk membagi model pengembangan kurikulum menjadi : 1) Model Ralph Taba, Model Administrative, 2) Model Grass Roots, 3) Model Demonstrasi, 4) Model Miller-Seller, dan 5) Model Taba's (Inverted Model)[78].

2). Fungsi Pengembangan Kurikulum

Berkenaan dengan model-model pengembangan kurikulum diatas, maka fungsi model pengembangan kurikulum adalah: a). Sebagai pedoman dan alternatif menilai model pengembangan yang sesuai dengan pelaksanaan pengembangan kurikulum di lapangan. b) Sebagai bahan pengetahuan untuk

[77] Nana Syaodih Sukmadinata, *Op.cit*, hal. 161, Lihat : Robert S. Zais (1976), Curriculum : *Principles and Foundations.*

[78] Ase Suherman, dkk. *Kurikulum dan Pembelajaran*, (TIM Pengembang Kurikulum dan Pembelajaran, Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan. Fak. Ilmu Pendidikan-Universitas Pendidikan Indonesia : Jakarta, 2006), hal. 60-66

melihat bagaimana sebuah kurikulum tercipta dari mulai perencanaan sampai pelaksanaan di lapangan, yang mungkin selama ini hanya diketahui bahwa kurikulum itu sebagai sesuatu yang siap saji., padahal melalui proses yang panjang sesuai dengan model yang dipilih oleh pengembang kurikulum atau pengambil kebijakan. c) Sebagai bahan untuk menyusun kurikulum yang sesuai dengan visi, misi, karakteristik dan sesuai dengan pengalaman belajar yang diharapkan atau dibutuhkan oleh siswa. d) Sebagai bahan untuk penelitian yang merupakan bagian tugas profesional guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerja seseorang sebagai guru; dan e) Sebagai bahan untuk melihat perbandingan dan keberhasilan tentang model pengembangaan kurikulum yang digunakan suatu sekolah, yang nantinya diharapkan untuk memperbaiki kurikulum yang dilaksanakan.

d. Pendekatan dan Langkah-langkah Pengembangan Kurikulum

1). Pendekatan Pengembangan Kurikulum

(a) Pendekatan administratif *(top down)*

Pengembangan kurikulum pesantren dapat dilakukan atas dasar inisiatif para penentu kebijakan di tingkat kementerian (Kementerian Pendidikan atau Kementerian Agama) secara hierarki, pengembangan kurikulum turun ke instansi dibawahnya sampai pada guru. Keberhasilan implementasinya sangat tergantung pada pemahaman guru sebagai pelaksana. Menurut Mulyasa: "Tidak jarang kegagalan implementasi kurikulum disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan guru dalam memahami tugas-tugas yang harus dilaksanakannya"[79]. Menurut Sukmadinata :

> Hambatan utama terletak pada guru. Guru kurang berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum. Hal tersebut disebabkan beberapa hal. Pertama

[79] E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum 2004; Panduan Pembelajaran KBK, (*Bandung: PT. Rosyda Karya, 2005) hal: 4

kurang waktu. Kedua kekurangsesuaian pendapat, baik antara sesama guru maupun dengan kepala sekolah dan administrator. Ketiga karena kemampuan dan pengetahuan guru itu sendiri[80].

Prosedur pengembangan proses pengembangan kurikulum pendekatan administratif, dimodifikasikan dari Sukmadinata[81] sebagai berikut:

Pertama : Pembentukan tim pengarah yang bertugas menyiapkan rumusan falsafah dan tujuan umum pendidikan, serta merumuskan konsep dasar dan garis –garis besar rumusan kebijakan. Tim pengarah ini biasanya terdiri dari para pejabat pengambil keputusan, pengawas pendidikan, ahli kurikulum, ahli disiplin ilmu, dan bias juga ditambah dengan para tokoh masyarakat.

Kedua : Pembentukan tim atau kelompok kerja untuk menjabarkan kebijakan atau rumusan-rumusan yang telah disusun oleh tim pengarah. Anggota kelompok kerja ini adalah ahli kurikulum, para ahli disiplin ilmu, ditambah dengan guru-guru yang telah berpengalaman melaksanakan kurikulum. Tugas pokok tim ini adalah merumuskan tujuan-tujuan yang lebih operasional, memilih dan menyusun urutan bahan pelajaran, memilih strategi pembelajaran , memilih media dan alat pembelajaran, menyusun pedoman evaluasi, serta menyusun pedoman-pedoman pelaksanaan kurikulum bagi guru.

Ketiga : Apabila kurikulum sudah selesai disusun oleh tim atau kelompok kerja, selanjutnya hasilnya diserahkan kepada tim perumus untuk dikaji dan diberi catatan-catatan atau direvisi. Bila dianggap perlu, kurikulum itu diujicobakan dan dievaluasi kelayakannya. Hasil uji coba itu digunakan sebagai bahan penyempurnaan.

Keempat : Menyebarluaskan serta memerintahkan kepada setiap sekolah untuk mengimplementasikan kurikulum yang telah tersusun ini.

(b) Pendekatan akar rumput *(bottom up)*

Ini terjadi di daerah otonomi pendidikan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pendidikan secara desentralisasi oleh tingkat kabupaten atau malah oleh sekolah dan guru. Pengembangan model ini mensyaratkan sikap profesionalisme guru yang tinggi dengan pemahaman yang baik terhadap seluk beluk pendidikan.

[80] Nana Syaodih Sukmadinata, *Op.cit,* hal. 160
[81] *Ibid,* hal. 161-162

Pendekatan akar rumput ini lebih efektif dalam membuat kurikulum karena lebih memperhatikan kebutuhan siswa dan kebutuhan masyarakat setempat.

(c) Pendekatan mata pelajaran

Pendekatan ini lebih mengemukakan bahwa setiap mata pelajaran berdiri sendiri terpisah satu sama lain. Pola kurikulum dengan pendekatan ini merupakan kurikulum yang terpisah-pisah dan implementasinya juga terpisah-pisah.

(d) Pendekatan interdisipliner

Pendekatan interdisipliner memadukan sejumlah pelajaran yang memiliki ciri yang sama dipadukan menjadi satu bidang study *(broadfield).* Pendekatan interdisipliner terdiri dari tiga jenis pendekatan, yaitu pendekatan struktural yang bertitik tolak dari suatu struktur ilmu tertentu, pendekatan fungsional bertitik tolak dari suatu masalah tertentu di masyarakat, dan pendekatan daerah bertitik tolak dari pemilihan suatu daerah tertentu sebagai subyek pelajaran.

(e) Pendekatan integratif

Manusia merupakan kesatuan utuh antara jasmaniyah, akal, qolbu dan ruh. Mata pelajaran adalah sebagian banyak hal yang mempengaruhi perkembangan anak. Dalam pendekatan integratif seluruh mata pelajaran merupakan sebuah kesatuan yang saling menguatkan tanpa batas satu sama lain.

2). Langkah-langkah Pengembangan Kurikulum

Langkah *pertama* menganalisis dan mendiagnosis kebutuhan siswa, orangtua, masyarakat, stakeholder dan harapan pemerintah. Pendekatan dilakukan dengan survey kebutuhan, studi kompetensi, dan analisis tugas. Hasil akhir

analisis dan diagnosis kebutuhan ialah deskripsi kebutuhan sebagai bahan masukan langkah selanjutnya.

Langkah *kedua* merumuskan tujuan, dari tujuan hirarki tertinggi atau yang paling umum sampai dengan tujuan hirarki terendah atau yang paling khusus dan yang paling operasional dengan dokumen, lembaga dan penanggung jawab.

Langkah *ketiga* pemilihan dan pengorganisasian materi, berkaitan dengan kegiatan memilih, menilai, dan menentukan bidang studi apa yang harus diajarkan pada suatu jenis jenjang persekolahan, kemudian pokok dan subpokok bahasan serta uraian materi secara garis besar termasuk *scope* (ruang lingkup) dan *sequence* (urutan). Patokan kegiatan tersebut ditentukan oleh tujuan-tujuan jenis dan jenjang sekolah yang bersangkutan.

3. Manajemen Kurikulum

Menurut Mulyasa, manajemen sekolah memiliki pengertian yang hampir sama dengan manajemen pendidikan; dengan luasan ruang lingkup dan bidang kajian yang berbeda. Manajemen pendidikan menjangkau seluruh sistem pendidikan; sedangkan manajemen pendidikan sekolah terbatas pada pengelolaan suatu lembaga pendidikan saja[82]. Ada beberapa komponen yang termuat dalam manajemen sekolah; a) meliputi kurikulum dan program pengajaran, b) tenaga pendidik dan kependidikan, c) kesiswaan, d) keuangan, e) sarana dan parasarana, f) hubungan sekolah dan masyarakat dan g) pelayanan khusus kelembagaan[83]. Seperti gambar berikut ini :

[82] E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah, (*Bandung: PT. Rosyda Karya, 2006) hal: 39
[83] Ibid

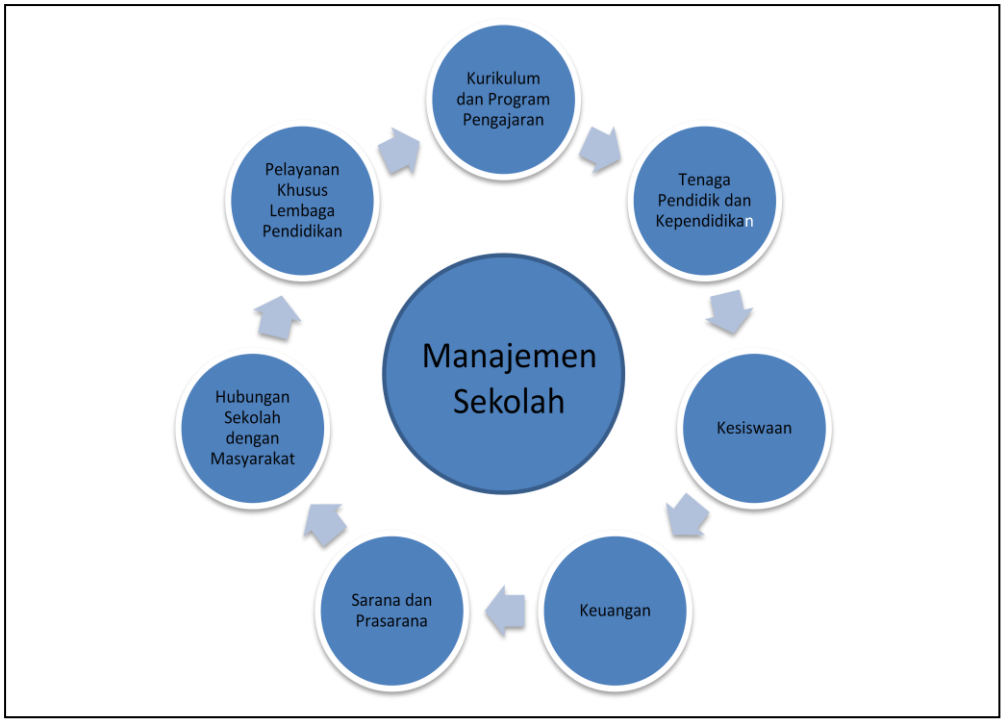

Gambar 3 : Komponen Manajemen Sekolah (menurut Mulyasa)

Salah satu dari komponen dimaksud adalah manajemen kurikulum, yang ruang lingkupnya meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum. Pada tingkat satuan pendidikan kegiatan kurikulum lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional (standar kompetensi/kompetensi dasar) dengan kebutuhan daerah dan kondisi lembaga pendidikan yang bersangkutan sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun dengan lignkungan dimana lembaga pendidikan itu berada[84].

Manajemen kurikulum adalah sebuah proses atau sistem pengelolaan kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik untuk mengacu ketercapaian tujuan kurikulum yang sudah dirumuskan.[85] Sekalipun

[84] Rusman, *op.cit*, hal. 4
[85] Dadang Suhardan dkk, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2009) hal : 191

dalam pelaksanaannya, manajemen kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan konteks manajemen yang berbasis sekolah dan sesuai tingkat satuan pendidikan dalam konteks otonom namun dikelola secara mandiri dengan memprioritaskan kebutuhan dan ketercapaian sasaran dalam visi dan misi lembaga pendidikan serta tidak mengabaikan kebijakan nasional yang telah ditetapkan[86].

Dalam proses manajemen kurikulum tidak lepas dari kerjasama sosial antara dua orang atau lebih secara formal dengan bantuan sumber daya yang mendukungnya. Pelaksanaanya dilakukan dengan metode kerja tertentu yang efektif dan efisien dari segi tenaga dan biaya, serta mengacu pada tujuan kurikulum yang sudah ditentukan sebelumnya.[87]

Dalam pelaksanaanya, pengembangan kurikulum harus berdasarkan dan disesuaikan dengan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).[88] Dengan pengertian, bahwa manajemen kurikulum itu memang atas dasar konteks desentralisasi pendidikan dan otonomi daerah. Suatu intitusi pendidikan diberi kebebasan untuk menentukan kebijakan dalam merancang dan mengelola kurikulum menurut kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Pemerintah hanya menetapkan standar nasional dan untuk pengembanganya diserahkan sepenuhnya kepada lembaga sekolah dan madrasah terkait.

E. Mulyasa mengatakan bahwa desentralisasi pendidikan dan otonomi daerah diberlakukan untuk memberikan keluasan pada sekolah dan perlibatan

[86] Rusman, *op.cit*, hal. 3
[87] Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: PT Remaja Rosyda Karya, 2006) hal :16
[88] Dandang Suhardan dkk, *Op.Cit*

masyarakat untuk mengelola sumber daya, sumber dana, sumber belajar dan mengalokasikanya sesuai prioritas kebutuhan dengan seefisien mungkin untuk mencapai hasil yang optimal. Tidak hanya itu dengan pemberdayaan sekolah lewat pemberian otonomi adalah bentuk tanggap dari pemerintah terhadap tuntutan masyarakat dan pemerataan pendidikan.[89]

Manajemen kurikulum adalah bagian dari studi kurikulum. Para ahli pendidikan pada umumnya telah mengenal bahwa kurikulum suatu cabang dari disiplin ilmu pendidikan yang mempunyai ruang lingkup sagat luas. Studi ini tidak hanya membahas tentang dasar-dasarnya, tetapi juga mempelajari kurikulum secara keseluruhan yang dilaksanakan dalam pendidikan.

Secara sederhana dan lebih mudah dipelajari secara mendalam, maka ruang lingkup manajemen kurikulum adalah sebagai berikut: (1) manajemen perencanaan, (2) manajemen pelaksanaan kurikulum, (3) supervisi pelaksanaan kurikulum, (4) pemantauan dan penilaian kurikulum, (5) perbaikan kurikulum, (6) desentralisasi dan sentralisasi pengembangan kurikulum.[90] Dari keterangan ini tampak sangat jelas bahwa ruang lingkup manajemen kurikulum itu adalah prinsip dari proses manajemen itu sendiri. Hal ini dikarenakan dalam proses pelaksanaan kurikulum punya titik kesamaan dalam prinsip proses manajemen. Sehingga para ahli dalam pelaksanaan kurikulum mengadakan pendekatan dengan ilmu manajemen. Bahkan kalau dilihat dari cakupanya yang begitu luas, manajemen kurikulum merupakan salah satu disiplin ilmu yang bercabang pada kurikulum.

[89] E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Propesional, (*Bandung: PT. Rosyda Karya, 2004) hal: 33
[90] Oemar Hamalik, 2006, *Op.Cit*, hal: 20-21

Dalam sebuah kurikulum terdiri dari beberapa unsur komponen yang terangkai pada suatu sistem. Sistem kurikulum bergerak dalam siklus yang secara bertahab, bergilir, dan berkesinambungan. Oleh sebab itu, sebagai akibat dari yang dianutnya, maka manajemen kurikulum juga harus memakai pendekatan sistem. Sistem kurikulum adalah suatu kesatuan yang di dalamnya memuat beberapa unsur yang saling berhubungan dan bergantung dalam mengemban tugas untuk mencapai suatu tujuan.

Prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum adalah sebagai berikut:

a. *Produktivitas*, hasil yang akan diperoleh dalam pelaksanaan kurikulum harus sangat diperhatikan. Output (peserta didik) harus menjadi pertimbangan agar sesuai dengan rumusan tujuan manajemen kurikulum.
b. *Demokratisasi*, proses manajemen kurikulum harus berdasarkan asas demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana dan subjek didik pada posisi yang seharusnya agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
c. *Kooperatif*, agar tujuan dari pelaksanaan kurikulum dapat tercapai dengan maksimal, maka perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terkait.
d. *Efektivitas dan efisiensi*, rangkaian kegiatan kurikulum harus dapat mencapai tujuan dengan pertimbangan efektif dan efisien, agar kegiatan manajemen kurikulum dapat memberikan manfaat dengan meminimalkan sumber daya tenaga, biaya, dan waktu.

e. *Mengarahkan pada pencapaian visi, misi, dan tujuan* yang sudah ditetapkan.[91]

Adapun fungsi-fungsi dari manajemen kurikulum adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumberdaya kurikulum, karena pemberdayaan sumber dan komponen kurikulum dapat dilakukan dengan pengelolaan yang terencana.
b. Meningkatkan keadilan dan kesempatan bagi peserta didik untuk mencapai hasil yang maksimal melalui rangkaian kegiatan pendidikan yang dikelola secara integritas dalam mencapai tujuan.
c. Meningkatkan motivasi pada kinerja guru dan aktifitas siswa karena adanya dukungan positif yang diciptakan dalam kegiatan pengelolaan kurikulum.
d. Meningkatkan pastisipasi masyarakat untuk membantu pengembangan kurikulum, kurikulum yang dikelola secara profesional akan melibatkan masyarakat dalam memberi masukan supaya dalam sumber belajar disesuaikan dengan kebutuhan setempat.[92]

4. Manajemen Perencanaan Kurikulum

Perencanaan kurikulum adalah suatu proses sosial yang kompleks dan menuntut berbagai jenis tingkat pembuatan keputusan kebutuhan untuk mendiskusikan dan mengkoordinasikan proses penggunaan model-model aspek penyajian kunci. Sebagaimana pada umumnya rumusan model perencanaan harus berdasarkan asumsi-asumsi rasionalitas dengan pemrosesan secara cermat. Proses

[91] Dadang Suhardan dkk, 2009, *Op.Cit*, hal 192
[92] *Ibid*

ini dilaksanakan dengan pertimbangan sistematik tentang relevansi pengetahuan filosofis (isu-isu pengetahuan yang bermakna), sosiologis (argumen-argumen kecenderungan sosial), dan psikologi (dalam menentukan urutan materi pelajaran). Perencanaan kurikulum dijadikan sebagai pedoman yang berisi petunjuk tentang jenis dan sumber peserta yang diperlukan, media penyampaian, tindakan yang perlu dilakukan, sumber biaya, tenaga, sarana yang diperlukan, sistem kontrol, dan evaluasi untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan perencanaan akan memberikan motivasi pada pelaksanaan sistem pendidikan sehingga dapat mencapai hasil yang optimal.[93]

5. Manajemen Pengorganisasian dan Pelaksanaan Kurikulum

Manajemen pengorganisasian dan pelaksanaan kurikulum adalah berkenaan dengan semua tindakan yang berhubungan dengan perincian dan pembagian semua tugas yang memungkinkan terlaksana. Dalam manajemen pelaksanaan kurikulum bertujuan supaya kurikulum dapat terlaksana dengan baik. Dalam hal ini manajemen bertugas menyediakan fasilitas material, personal dan kondisi-kondisi supaya kurikulm dapat terlaksana.[94]

Pelaksanaan kurikulum dibagi menjadi dua:

a. Pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah, yang dalam hal ini langsung ditangani oleh kepala sekolah. Selain dia bertanggung jawab supaya kurikulum dapat terlaksana di sekolah, dia juga berkewajiban melakukan kegiatan-kegiatan yakni menyusun kalender akademik yang akan berlangsung disekolah dalam satu tahun, menyusun jadwal pelajaran dalam satu minggu, pengaturan tugas dan

[93] Dadang Suhardan dkk, *Ibid,* hal: 191
[94] *Ibid,* hal 192

kewajiban guru, dan lain-lain yang berkaitan tentang usaha untuk pencapaian tujuan kurikulum.

b. Pelaksanaan kurikulum tingkat kelas, yang dalam hal ini dibagi dan ditugaskan langsung kepada para guru. Pembagian tugas ini meliputi; (1) kegiatan dalam bidang proses belajar mengajar, (2) pembinaan kegiatan ekstrakulikuler yang berada diluar ketentuan kurikulum sebagai penunjang tujuan sekolah, (3) kegiatan bimbingan belajar yang bertujuan untuk mengembangkan potensi yang berada dalam diri siswa dan membantu siswa dalam memecahkan masalah[95].

6. Manajemen Pemantauan dan Penilaian Kurikulum

Pemantauan kurikulum adalah pengumpulan informasi berdasarkan data yang tepat, akurat, dan lengkap tentang pelaksanaan kurikulum dalam jangka waktu tertentu oleh pemantau ahli untuk mengatasi permasalahan dalam kurikulum. Pelaksanaan kurikulum di dalam pendidikan harus dipantau untuk meningkatkan efektifitasnya. Pemantauan ini dilakukan supaya kurikulum tidak keluar dari jalur. Oleh sebab itu seorang yang ahli menyusun kurikulum harus memantau pelaksanaan kurikulum mulai dari perencanaan sampai mengevaluasinya.

Secara garis besar pemantauan kurikulum bertujuan untuk mengumpulkan seluruh informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan dalam memecahkan masalah. Dalam tataran praktis, pemantauan kurikulum memuat beberapa aspek, yaitu sebagai berikut:

[95] Dadang Suhardan, *Ibid*

1. *Peserta didik*, dengan mengidentifikasi pada cara belajar, prestasi belajar, motivasi belajar, keaktifan, kreativitas, hambatan dan kesulitan yang diahadapi.

2. *Tenaga pengajar*, dengan memantau pada pelaksanaan tanggung jawab, kemampuan kepribadian, kemampuan kemasyarakatan, kemampuan profesional, dan loyalitas terhadap atasan.

3. *Media pengajaran,* dengan melihat pada jenis media yang digunakan, cara penggunaan media, pengadaan media, pemeliharaan dan perawatan media.

4. *Prosedur penilaian:* instrument yang dihadapi siswa, pelaksanaan penilaian, pelaporan hasil penilaian.

5. *Jumlah lulusan:* kategori, jenjang, jenis kelamin, kelompok usia, dan kualitas kemampuan lulusan[96].

7. Perbaikan Kurikulum

Kurikulum suatu pendidikan itu tidak bisa bersifat selalu statis, akan tetapi akan senantiasa berubah dan bersifat dinamis. Hal ini dikarenakan kurikulum itu sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan yang menuntutnya untuk melakukan penyesuaian supaya dapat memenuhi permintaan. Permintaan itu baik dikarenakan adanya kebutuhan dari siswa dan kebutuhan masyarakat yang selalu mengalami perkembangan dan pertumbuhan terus menerus.[97]

Perbaikan kurikulum intinya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang dapat disoroti dari dua aspek, proses, dan produk. Kriteria proses menitikberatkan pada efisiensi pelaksanaan kurikulum dan sistem intruksional,

[96] Oemar Hamalik, *Op.Cit*, hal: 20-21
[97] Ibid

sedangkan kualitas produk melihat pada tujuan pendidikan yang hendak dicapai dan *output* (kelulusan siswa).[98]

Berkaitan dengan prosedur perbaikan, seluruh komponen sumber daya manusiawi, seperti: administrator, pemilik sekolah, kepala sekolah, guru-guru, siwaswa, serta masyarakat mempuanyai sangat berperan besar. Tanggung jawab masing-masing harus dirumuskan secara jelas. Selain itu aspek evaluasi juga harus dikaji sejak awal perencanaan program perbaikan kurikulum. Dengan evaluasi yang tepat dan data informasi yang akurat akan sangat diperlukan dalam membuat keputusan kurikulum dan intruksional.

Chamberlain telah merumuskan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam perbaikan: (1) mengidentfikasi masalah sebenarnya sebagai tuntutan untuk mengetahui tujuan, (2) mengumpulkan fakta atau informasi tambahan, (3) mengajukan kemungkinan pemecahan dengan keputusan yang optimal dan diharapkan, (4) memilih pemecahan sebagai percobaan,(5) merencanakan tindakan yang dikehendaki untuk melaksanakan penyelesaian, (6) melakukan solusi percobaan, (7) evaluasi.[99]

B. Program Wajar Dikdas

Pendidikan sebagai hak asasi manusia tercantum dalam pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 yang tertulis: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Selanjutnya, pada pasal 28 C ayat (1) ditulis: “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak

[98] Oemar Malik, 2006, *Op. Cit*
[99] *Ibid*

mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat serta ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia". Sejalan dengan ketentuan perundang-undangan tersebut, untuk memenuhi hak-hak warga Negara terhadap akses pendidikan yang bermutu; terutama bagi warga bangsa yang belum terlayani hak-hak dasar pendidikannya melalui satuan-satuan pendidikan formal, maka Pemerintah mengembangkan layanan melalui Pendidikan Kesetaraan.

Keberadaan Pendidikan Kesetaraan menjadi lebih penting lagi dalam meningkatkan pendidikan sepanjang hayat di Negara ini. Dalam perkembangan selanjutnya diperbarui melalui pemikiran kreatif dan inovatif; khususnya dalam diversifikasi pelayanan; mengingat luas dan heterogennya cakupan sasaran pendidikan kesetaraan. Dalam kaitan diversifikasi itulah, Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren – Ditjen Pendidikan Islam melakukan sejumlah *affirmative program*; sehingga dapat memberi layanan kepada santri Pondok Pesantren Salafiyah yang belum terjangkau oleh layanan pendidikan formal; yaitu dengan membuka Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah.

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah (PPS), terdiri dari tingkat Ula setara SD/MI dan tingkat Wustha setara SMP/MTs. Program Wajar Dikdas PPS dilaksanakan berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama RI, No. 1/U/KB/2000 dan No. MA/86/2000 tentang Pondok Pesantren Salafiyah Sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, dan

Keputusan Bersama antara Dirjen Binbaga Islam Depag dan Dirjen Dikdasmen No. E/83/2000 dan No. 166/C/KEP/DS-2000, tentang Pedoman Pelaksanaan Pondok Pesantren Salafiyah Sebagai Pola Pendidikan Dasar.

Dasar hukum penyelenggaraan Ujian Nasional program wajib belajar pada Pondok Pesantren Salafiyah sebagai berikut:

1. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama RI No. 1/U/KB/2000 dan No. MA/86/2000, tentang Pondok Pesantren Salafiyah Sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun;
3. Keputusan Bersama Dirjen Binbaga Islam Depag dan Dirjen Dikdasmen No. E/83/2000 dan No. 166/C/KEP/DS-2000, tentang Pedoman Pelaksanaan Pondok Pesantren Salafiyah Sebagai Pola Pendidikan Dasar.
4. Keputusan Bersama Dirjen Baga Islam Depag dan Kabalitbang Diknas No. Dj.II/526/2003 dan No. 6016/G/HK/2003 Tahun 2003, tentang Ujian Akhir Nasional Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Pada Pondok Pesantren Salafiyah.

Ruang lingkup Ujian Nasional PPS meliputi seluruh mata pelajaran umum pada jenjang pendidikan dasar, yang disampaikan secara tatap muka dan non-tatap muka. Mata pelajaran yang diujikan pada masing-masing tingkatan adalah; Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggeris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).

Materi soal Ujian untuk tingkat Ula dan Wustha mengacu kepada Standar Kompetensi Lulusan SD/MI dan SMP/ MTs. Sedangkan naskah soal ujian disiapkan oleh Pusat Penilaian Pendidikan Balitbang Depdiknas.

C. Pesantren

1. Pengertian

Bila didefinisikan, pengertian pesantren sangat luas mengingat pola pembelajaran di setiap pesantren sangat beragam dan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Secara terminologi 'pesantren' dimaknai sebagai : "Lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam, yang pada umumnya pendidikan dan pengajaran tersebut diimplementasikan dengan cara non-klasikal, dengan seorang Kyai mengajar santri berdasarkan kitab-kitab berbahasa Arab dari ulama-ulama besar sejak abad pertengahan, sedangkan para santrinya tinggal dalam asrama pesantren[100].

Sedangkan dari segi etimologi, menurut Zaini; ada pendapat yang menyebutkan bahwa pesantren berasal dari kata '*santri*' yang diberi awalan *pe-* dan akhiran *–an,* yang berarti : Sebuah pusat pendidikan Islam tradisional atau sebuah pondok untuk siswa muslim (santri) sebagai model sekolah agama Islam. Namun, ada juga yang menyebutkan bahwa kata '*santri*' diadopsi dari bahasa India `*shastri*` yang bermakna orang suci dalam agama Hindu. Agaknya keterkaitan bahasa ini tak lepas dari eksistensi kekuasaan kerajaan-kerajaan Hindu pra-Islam di nusantara yang secara tidak langsung meninggalkan jejak budaya[101]. Steenbrink menjelaskan secara terminologis bahwa dilihat dari bentuk dan

[100] Marwan Saridjo, et.al, *Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia,* (Jakarta: Dharma Bhakti, 1983). h. 9
[101] Zaini Muchtarom, *Santri dan Abangan di Jawa,* (Jakarta: INIS, 1998), Jilid II, hal. 6

sistemnya, pesantren dimungkinkan dari India[102], selain itu, kata '*pondok*' yang mendampingi kata 'pesantren' juga dimungkinkan berasal dari bahasa Arab `*funduq*` yang berarti tempat tinggal, hotel dan asrama[103].

Secara lebih tegas, Nurcholish Madjid membedah asal mula kata '*santri*' dan juga kyai, karena unsur ini senantiasa menyatu ketika berbicara mengenai pesantren. Cak Nur berpendapat bahwa kata 'santri' berasal dari kata `*sastri*` (bahasa Sansekerta), yang berarti *melek huruf*, sehingga dikonotasikan bahwa santri merupakan kelas *literary*, yaitu bagian dari komunitas yang memiliki pengetahuan agama yang dibaca dari kitab-kitab berbahasa Arab dan selanjutnya diasumsikan paling tidak santri mampu membaca Al-Qur`an. Kemudian *santri* juga diyakini berasal dari bahasa Jawa, `*cantrik*` yang berarti orang yang selalu mengikuti seorang guru ke manapun sang guru pergi dan menetap, dengan tujuan dapat belajar suatu keahlian. *Cantrik* juga terkadang diartikan sebagai orang yang menumpang hidup[104].

2. Sejarah Singkat Pondok Pesantren

Diantara berbagai lembaga pendidikan yang pernah ada di wilayah Indonesia, pendidikan keagamaan dalam bentuk pesantren merupakan sistem pendidikan tertua saat ini dan dianggap sebagai produk budaya bangsa yang asli dan *lebih pribumi*. Tumbuh dan berkembangnya pendidikan keagamaan Islam di Indonesia; tidak terlepas hubungannya dengan sejarah masuknya Islam di nusantara. Semula, pendidikan ini merupakan pendidikan agama Islam yang

[102] Karel. A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah*, (Jakarta: LP3ES, 1994), hal. 20

[103] Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren : Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta: LP3ES, 1982), hal. 18. Lihat: Kamus Al-Mufid, Versi 1.0, www.muslim.or.id

[104] Nurcholis Madjid, *Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*, (Jakarta: Paramadina, 1997), Cet. I, hal. 15-16

dimulai sejak munculnya masyarakat Islam di Indonesia pada abad ke-13[105]. Bermula ketika orang-orang yang masuk agama Islam ingin mengetahui lebih banyak isi ajaran agama yang baru dipeluknya; baik tatacara beribadah, membaca Al-Qur'an dan pengetahuan ke-Islaman lainnya. Mereka belajar di rumah, surau, langgar atau masjid secara langsung dan individual. Beberapa abad kemudian penyelenggaraan ini semakin teratur, dengan munculnya tempat-tempat pengajian. Bentuk ini kemudian berkembang dengan pendirian tempat-tempat menginap bagi para pelajar (santri); sehingga kemudian lembaga tersebut lebih dikenal dengan sebutan pesantren. Meskipun sistem dan bentuknya masih sangat sederhana, namun pada saat itu pendidikan ini dianggap lebih memiliki gengsi dan kewibawaan. Di lembaga inilah kaum muslimin Indonesia mendalami doktrin dasar Ke-Islaman; khususnya menyangkut praktek kehidupan keagamaan.

Sejarah pendidikan di Indonesia mencatat, bahwa pondok pesantren adalah lembaga pendidikan pribumi tertua di Indonesia. Ada dua pendapat mengenai awal berdirinya pondok pesantren di Indonesia[106] :

Pendapat **pertama;** menyebutkan bahwa pondok pesantren berakar dari tradisi Islam, dan pendapat **kedua;** mengatakan bahwa sistem pendidikan model pondok pesantren adalah asli Indonesia.

- Dalam pendapat *pertama*; ada dua versi :
  - Yang berpendapat bahwa pondok pesantren terinspirasi dari sejarah Rasulullah; yang pada masa awal dakwahnya, dilakukan secara

[105] Departemen Agama, *Pedoman Pengembangan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan*, (Jakarta: Direktoratt. Pendidikan Keagamaan dan Pontren, 2004), Hal. 1

[106] Departemen Agama – *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah*, op cit, hal 7

sembunyi-sembunyi dengan peserta sekelompok orang yang dilakukan di rumah-rumah; salah satu yang sangat dikenal yaitu rumah Arqam bin Abu Arqam. Sekelompok orang, yang tergolong dalam A*s-Sabiqul Awwalun*, inilah yang kelak menjadi perintis dan pembuka jalan penyebaran Islam di jazirah Arab, Afrika dan benua lain bahkan menyebar ke seluruh dunia.

- Yang menyebutkan bahwa; pondok pesantren mempunyai kaitan yang erat dengan tempat pendidikan yang khas bagi kaum *sufi*. Pendapat ini berdasarkan fakta bahwa penyiaran Islam di Indonesia pada awalnya lebih banyak dikenal dalam bentuk kegiatan *tarekat* yang melaksanakan amalan-amalan dzikir dan wirid tertentu. Pemimpin tarekat ini disebut *Kyai*, yang mewajibkan pengikutnya melaksanakan peribadatan khusus selama 40 hari dalam satu tahun dengan cara tinggal bersama jamaahnya di masjid untuk melakukan peribadatan dibawah bimbingan Kyai. Untuk keperluan ini, Kyai menyediakan ruangan khusus untuk menginap dan tempat memasak di kiri-kanan masjid.

➢ Pendapat *kedua* mengatakan, pondok pesantren yang dikenal sekarang ini pada mulanya merupakan pengambilalihan sistim *pengasramaan* yang diadakan penganut Hindu di nusantara. Hal ini berdasarkan fakta bahwa jauh sebelum datangnya Islam ke Indonesia, lembaga *mirip* pondok pesantren pada masa itu dimaksudkan sebagai tempat mengajarkan ajaran agama Hindu.

Pondok pesantren di Indonesia baru diketahui keberadaan dan perkembangannya setelah abad ke-16. Dalam naskah karya Jawa klasik (seperti

Serat Cabolek dan *Serat Centini*) mengungkapkan bahwa dijumpai lembaga-lembaga yang mengajarkan kitab Islam klasik dalam bidang fiqh, tasawuf dan menjadi pusat penyiaran Islam; yaitu pondok pesantren[107].

Pesantren dalam perjalanan panjangnya selalu berada di luar *mainstream* sistem pendidikan nasional. Ini tidak terlepas dari sejarah panjang penjajahan ketika pemerintah colonial Belanda akan melaksanakan pendidikan berdasarkan pribumi murni, secara teratur dan disesuaikan dengan masyarakat desa, yang dihubungkan erat pada pendidikan Islam yang sudah ada sebelumnya[108]. Kenyataannya pemerintah kolonial selalu menghindari memposisikan pesantren dan surau sebagai rujukan sistem pendidikan pribumi saat itu. Menurut Streenbrink, bahwa pada tahun 1865 setahun setelah menjabat sebagai Inspektur Pendidikan Pribumi yang pertama; Van der Chijs, menolak menyesuaikan pendidikan Islam (pesantren dan surau) berdasarkan alasan teknis pendidikan[109]. Ucapannya: "Walaupun saya setuju sekolah pribumi diselingi dengan kebiasaan pribumi, namun saya tidak menerimanya karena kebiasaan terlalu jelek, sehingga tidak dapat dipakai dalam sekolah pribumi". Kebiasaan jelek menurut Van Der Chijs adalah kebiasaan belajar membaca dan menghafal Al-Qur'an yang tidak disertai pengertian maknanya. Al-Qur'an yang menggunakan bahasanya sendiri dianggap bahasa asing oleh para Sarjana Pendidikan Belanda saat itu[110]. Prasangka Van Der Chijs dan Sarjana Barat lainnya lebih dilatarbelakangi

[107] *Ibid*, hal. 8
[108] Karel.A. Streenbrink, (1994) hal. 2
[109] Karel.A. Streenbrink, *Ibid*, hal. 3
[110] *Ibid*

kecurigaan terhadap agama dan umat Islam, karena perlawanan dan fatwa bahwa Belanda adalah penjajah. Akibat dari kondisi tersebut di atas, pada akhirnya:

> Sekolah Islam semenjak itu mengambil jalan sendiri, lepas dari gubernemen, tetap berpegang pada tradisinya sendiri, tapi terbuka untuk perubahan dalam tradisi tersebut. Demikianlah semenjak permulaan abad ini, pendidikan Islam mulai mengembangkan satu model pendidikan sendiri yang terpisah dari sistem Pendidikan Belanda, maupun sistem pendidikan yang dilaksanakan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia[111].

Lembaga pesantren mengalami perkembangan yang cepat, disebabkan adanya sikap non-kooperatif para ulama terhadap kebijakan "politik etis" pemerintah kolonial Belanda (pada akhir abad ke-19); yaitu kebijakan yang dimaksudkan sebagai balas jasa kepada rakyat Indonesia, dengan memberikan pendidikan modern termasuk budaya Barat. Namun pendidikan yang diberikan sangat terbatas, baik dari segi kuantitas peserta didik maupun dari segi kualitas dan tingkat pendidikan yang diberikan. Sikap ketidak-setujuan dan pembelotan para ulama itu kemudian ditunjukkan dengan mendirikan pesantren di daerah-daerah yang jauh dari kota, untuk menghindari intervensi pemerintah kolonial serta memberi kesempatan lebih banyak kepada rakyat yang belum memperoleh pendidikan[112].

Perkembangan pesantren yang begitu pesat juga diduga karena telah dibukanya Terusan Suez (pada tahun 1869), yang memungkinkan lebih banyak pelajar Indonesia mengikuti pendidikan di Mekkah. Sehingga sepulang mereka ke kampung halaman, para pelajar yang umumnya bergelar "haji" ini

[111] *Ibid*, hal 7.
[112] Departemen Agama, *Pedoman Pengembangan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan*, loc cit

mengembangkan pendidikan agama di tanah air yang bentuk lembaganya kemudian disebut pesantren atau pondok pesantren[113].

Pada permulaan berdirinya, bentuk pesantren sangatlah sederhana. Kegiatan pengajian diselenggarakan di dalam masjid oleh seorang kyai sebagai guru dengan beberapa santri sebagai muridnya. Kyai tadi umumnya sudah pernah mukim bertahun-tahun untuk mengaji dan mendalami pengetahuan agama Islam di Mekkah atau Madinah. Atau setidaknya pernah berguru kepada seorang wali, kyai maupun ulama terkenal alim di daerah lain. Kemudian ia bermukim disuatu desa dengan mendirikan langgar/surau yang dipergunakan sebagai tempat untuk shalat berjamaah dan pengajian agama. Awalnya, jamaah hanya terdiri dari beberapa orang saja. Pada setiap menjelang atau selesai shalat berjamaah, sang kyai biasanya memberikan ceramah berupa pengajian sekedarnya. Isi dan materi pengajian biasanya berkisar pada soal Rukun Iman, Rukun Islam serta pendidikan akhlaq yang lebih banyak menyangkut kehidupan sehari-hari.

Oleh karena cara pembelajaran dianggap menarik dan keikhlasan yang tinggi serta perilaku yang menunjukkan keshalehan; maka lama kelamaan jamaah santrinya bertambah banyak. Yang datang tidak saja dari warga desa itu, tetapi juga menarik perhatian warga desa lain di luar desa tersebut. Sebagian dari mereka yang ikut pengajian itu, ada yang ingin tinggal menetap; dekat dengan Kyai atau Ustadz, bahkan mulai ada beberapa orangtua yang menitip anaknya kepada kyai tersebut. Untuk menampung mereka semua, dibangunlah pondok atau asrama. Akhirnya terbentuklah sebuah pesantrian yang di dalamnya terdapat

[113] *Ibid*, hal. 3

pondok, masjid, kyai dan santri. Istilah Pesantrian ini akhirnya dikenal dengan sebutan Pesantren. Jauh sebelum masa kemerdekaan, sistem pendidikan pesantren telah menjadi model pendidikan nusantara; khususnya di pusat-pusat kerajaan Islam, telah terdapat lembaga pendidikan yang mirip dengan corak pesantren. Masing-masing wilayah memiliki sebutan beragam; misalnya *Meunasah* atau *Rangkang* di Aceh dan *Surau* di Minangkabau[114]

Para santri yang telah dianggap selesai dan pulang; kemudian mendirikan pesantren yang baru di kampung halamannya, sehingga bertambah banyaklah jumlah lembaga pesantren yang tumbuh dan berkembang dari masa ke masa sampai sekarang. Sekalipun demikian, beberapa pesantren yang didirikan/dibangun disetiap kurun waktu, ada yang masih memegang format tradisional, dan ada pula yang menyesuaikan dengan perkembangan pendidikan.

Pesantren dengan kemandiriannya akhirnya memiliki konotasi tersendiri dalam kemasyarakatan, bahkan dalam kesatuan ekonomis dan politis berlandaskan pada satu masyarakat pendidikan yang bernuansakan agama. Pesantren lahir dari masyarakat demokratis yang menghendaki pendidikan sesuai dengan yang dicitrakan dan dicita-citakannya. Meskipun pada akhirnya dalam pengembangan dan pengelolaannya lebih ditentukan oleh para kyai sebagai pendiri dan pemiliknya, sebenarnya kehidupan pesantren ditopang serta dibesarkan oleh masyarakat pendukungnya. Tilaar menyatakan: “Apabila dewasa ini kita berbicara mengenai inovasi pendidikan nasional untuk melahirkan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat *(community-based management)* maka pesantren merupakan

[114] Departemen Agama – *Pola Pengembangan Pondok Pesantren,* op cit, hal 12

model *archaic* dari pendidikan tersebut"[115]. Masih menurut Tilaar: "Pada akhirnya *community-based management* dari pendidikan akan bermuara pada manajemen berbasis sekolah *(school-based management)"*[116]. Pesantren merupakan cikal bakal pengelolaan pendidikan yang mengimplementasikan aktivitas dan kreativitas para pengajarnya dalam melaksanakan misi pendidikan secara otonom.

Ciri tradisional pesantren adalah menggunakan kitab kuning sebagai bahan rujukan legalitas formal, menurut Mochtar[117] :

> Umumnya, pesantren dipandang sebagai sub-kultur yang mengembangkan pola kehidupan yang unik menurut 'kaca mata' umum, modern. Di samping kepemimpinan Kyai, Kitab Kuning (KK) adalah faktor penting yang menjadi karakteristik sub-kultur tersebut. Selain sebagai pedoman bagi tata cara keberagamaan, KK difungsikan juga oleh kalangan pesantren sebagai referensi nilai universal dalam mensikapi segala tantangan kehidupan. Ketika KK digunakan permanen, dari generasi ke generasi, sebagai sumber bacaan utama bagi masyarakat pesantren yang cukup luas, sebuah proses pembentukkan dan pemeliharaan tradisi yang unik itu tengah berlangsung.

Dengan ketradisionalannya, pesantren memiliki perjalanan panjang sejarah pendidikan Indonesia. Sumbangsih kepada bangsa dan Negara bukan hanya dalam pendidikan tapi juga dalam perjuangan kemerdekaan sejak jaman penjajahan. Kelemahan pesantren, kalau dikatakan sebagai kelemahan, masih menganut ortodoksi dengan keengganan membuka pintu rekonstruksi system pendidikan dengan merumuskan kurikulum pendidikannya dalam sebuah sistem yang dipadu dan komprehensif *(kaffah).* Sistem pendidikan pesantren sebagai kekayaan tradisi dapat membuka peluang sinergi transformasi dan pemberdayaan masyarakat. Sisi

[115] HAR. Tilaar, (2000), *Op cit,* hal. 153
[116] *Ibid*
[117] Affandi Mochtar, *Membedah Diskursus Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalimah, 2001) hal. 48

strategis yang dapat dimanfaatkan sebagai sebuah subsistem pendidikan nasional adalah kemampuan melayani pendidikan bagi segenap golongan usia.

Pendidikan di pesantren memfokuskan materi pelajaran lebih pada rujukan kitab kuning yang meningkat dari kitab kuning yang uraiannya sangat sederhana sampai yang kompleks. Setiap penguasaan kitab rujukan berlangsung pada waktu yang tidak ditentukan, tergantung kesiapan pengajar dan kemampuan santri, bisa satu kali atau bahkan berkali-kali baru mampu memahami makna kitab yang dikajinya. Ini terkait latar belakang santri sehingga usia santri tidak menjadi ukuran dalam tingkat satuan pendidikan di pesantren.

Sebagaimana disinggung di depan bahwa kurikulum merupakan salah satu instrumen dari suatu lembaga pendidikan, termasuk pendidikan pesantren. Menurut Iskandar Wiryokusumo, kurikulum adalah "Program pendidikan yang disediakan sekolah untuk siswa"[118]. Sementara itu, menurut S. Nasution, kurikulum adalah "Suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar-mengajar di bawah bimbingan dan tanggung-jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajarnya"[119]. Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa kurikulum pada dasarnya merupakan seperangkat perencanaan dan media untuk mengantarkan lembaga pendidikan untuk mewujudkan lembaga pendidikan yang diidamkan. Pesantren dalam kelembagaannya, mulai mengembangkan diri dengan jenis dan corak pendidikannya yang bermacam-macam. Pada beberapa pesantren besar, di dalamnya telah berkembang madrasah, sekolah umum, sampai perguruan tinggi yang dalam proses pencapaian tujuan institusional selalu

[118]Iskandar Wiryokusumo dan Usman Mulyadi, *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum* (Jakarta: Bina Aksara, 1988), hal. 6.

[119]Sarimuda Nasution, *Kurikulum*, hal. 5.

menggunakan kurikulum. Tetapi, pesantren yang berpola salafi (tradisional), mungkin kurikulum belum dirumuskan secara baik.

Kurikulum pesantren "salaf" yang statusnya sebagai lembaga pendidikan non-formal hanya mempelajari kitab-kitab klasik yang meliputi: *Tauhid, Tafsir, Hadits, Fiqh, Ushul Fiqh, Tasawwuf,* Bahasa Arab (*Nahwu, Sharaf, Balaghah* dan *Tajwid), Mantiq* dan *Akhlak*. Pelaksanaan kurikulum pendidikan pesantren ini berdasarkan kemudahan dan kompleksitas ilmu atau masalah yang dibahas dalam kitab; sehingga dikenal tingkat awal (*ula*), menengah (*wustha*) dan tingkat lanjutan (*'ulya*). Gambaran naskah agama yang harus dibaca dan dipelajari oleh santri, menurut Zamakhsyari Dhofier mencakup kelompok "*Nahwu* dan *Sharaf, Ushul Fiqh, Hadits, Tafsir, Tauhid, Tasawwuf,* cabang-cabang yang lain seperti *Tarikh* dan *Balaghah*"[120]. Itulah gambaran sekilas isi kurikulum pesantren "salafi", yang umumnya keilmuan Islam digali dari kitab-kitab klasik, dan pemberian keterampilan yang bersifat pragmatis dan sederhana.

Untuk menentukan kitab-kitab mana yang akan dikaji merupakan otoritas kyai. Menurut Basyuni[121]: "… ketatnya kode etik pesantren yang bersumber pada kaidah riwayat lebih dipentingkan dari pada dirayat. Dengan demikian santri hanya dibenarkan mempelajari kitab-kitab yang bersanad saja". Posisi kyai dalam menentukan kitab-kitab yang seharusnya dikaji memang cukup kuat, ini merupakan upaya agar santri tidak diberikan faham-faham *ikhtilaf* pada saat dianggap belum siap menerimanya. Menurut Tholhah Hasan seperti dikutip Mastuki Hs:

[120]Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren* (Jakarta: LP3ES, 1982), hal. 50.

[121] Maftuh Basyuni, *Bangkitkan Tradisi Keilmuan di Pesantren*, (Media Pembinaan, No. 08/XXXIII November, 2006, hal. 19

> Ciri khas yang paling menyolok dalam tradisi intelektual pesantren adalah jaringan, silsilah, sanad, ataupun genealogi yang bersifat *musalsal* (berkesinambungan) untuk menentukan tingkat efisoterisitas dan kualitas keulamaan intelektual. Hal ini pula yang membedakan tradisi intelektual pesantren dengan-misalnya-tradisi intelektual di lingkungan kampus, dan bahkan lembaga-lembaga Islam lainnya. Tradisi intelektual pesantren seperti ini boleh dibilang melampaui linearitas eksotologis pengetahuan Islam yang bisa disebut dengan *'ilm jally* dalam prespektif ibn Qayyim Al-Jauzy[122].

Pesantren dalam kelembagaannya, mulai mengembangkan diri dengan jenis dan corak pendidikannya yang bermacam-macam. Beberapa pesantren besar, di dalamnya telah berkembang madrasah, sekolah umum, sampai perguruan tinggi yang dalam proses pencapaian tujuan institusional selalu menggunakan kurikulum. Tetapi, pesantren yang mengikuti pola salafi (tradisional), kurikulum belum dirumuskan secara baik.

Kurikulum pesantren salafiyah umumnya hanya mempelajari kitab-kitab klasik yang meliputi: Tauhid, Tafsir, Hadits, Fiqh, Ushul Fiqh, Tasawwuf, Bahasa Arab (Nahwu, Sharaf, Balaghah dan Tajwid), Mantiq dan Akhlak. Pelaksanaan kurikulum pendidikan pesantren ini berdasarkan kemudahan dan kompleksitas ilmu atau masalah yang dibahas dalam kitab. Sehingga dikenal ada istilah tingkat awal, menengah dan tingkat lanjutan.

Gambaran naskah agama yang harus dibaca dan dipelajari oleh santri, menurut Zamakhsyari Dhofier mencakup kelompok "Nahwu dan Sharaf, Ushul Fiqh, Hadits, Tafsir, Tauhid, Tasawwuf, cabang-cabang yang lain seperti Tarikh dan Balaghah"[123]. Itulah gambaran sekilas isi kurikulum pesantren tentang

[122] Mastuki HS dan M. IshomEl-Saha, *Intelektualisme Pesantren: Potret Tokoh dan Cakrawala Pemikiran di Era Keemasan Pesantren (seri I)*, (Jakarta: Diva Pustaka, 2003) hal. vii)

[123] Zamakhsyari Dhofier, (1982), *Op cit*, hal. 50.

"salafi", yang umumnya keilmuan Islam digali dari kitab-kitab klasik, dan pemberian keterampilan yang bersifat pragmatis dan sederhana.

Adapun karakteristik kurikulum yang ada pada pondok pesantren modern, mulai diadaptasikan dengan kurikulum pendidikan Islam yang disponsori oleh Departemen Agama melalui sekolah formal (madrasah). Kurikulum khusus pesantren dialokasikan dalam muatan lokal atau diterapkan melalui kebijaksanaan sendiri. Gambaran kurikulum lainnya adalah pada pembagian waktu belajar, yaitu mereka belajar keilmuan sesuai dengan kurikulum yang ada di perguruan tinggi (sekolah) pada waktu-waktu kuliah. Waktu selebihnya dengan jam pelajaran yang padat dari pagi sampai malam untuk mengkaji ilmu Islam khas pesantren (pengajian kitab klasik)[124].

Fenomena pesantren sekarang yang mengadopsi pengetahuan umum untuk para santrinya, tetapi masih tetap mempertahankan pengajaran kitab-kitab klasik merupakan upaya untuk meneruskan tujuan utama lembaga pendidikan tersebut, yaitu pendidikan calon ulama yang setia kepada paham Islam tradisional[125]. Kurikulum pendidikan pesantren modern merupakan perpaduan antara pesantren salaf dan sekolah (perguruan tinggi), diharapkan akan mampu memunculkan output pesantren berkualitas yang tercermin dalam sikap aspiratif, progresif dan tidak "ortodoks" sehingga santri bisa secara cepat beradaptasi dalam setiap bentuk perubahan peradaban dan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat karena mereka bukan golongan eksklusif dan memiliki kemampuan yang siap pakai.

[124] Ainurrafiq, (2001), *Loc cit*
[125] Imam Bawani: *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam* (Surabaya: al-Ikhlas, 1998), hal. 95-96.

Manusia produktif dengan keshalihan harus dilihat dari dua sisi, *'abdun* dan *khalifah*. Apabila nilai shalih dan produktif tidak lagi saling terkait, maka nilai kekhalifahan bukan lagi menjadi milik umat Islam dan kehambaan manusia kepada al-Khaliq tidak lagi memiliki makna. Diagram berikut ini dapat memberi gambaran bagaimana tujuan pendidikan dapat dinilai dari dua sisi yang berbeda :

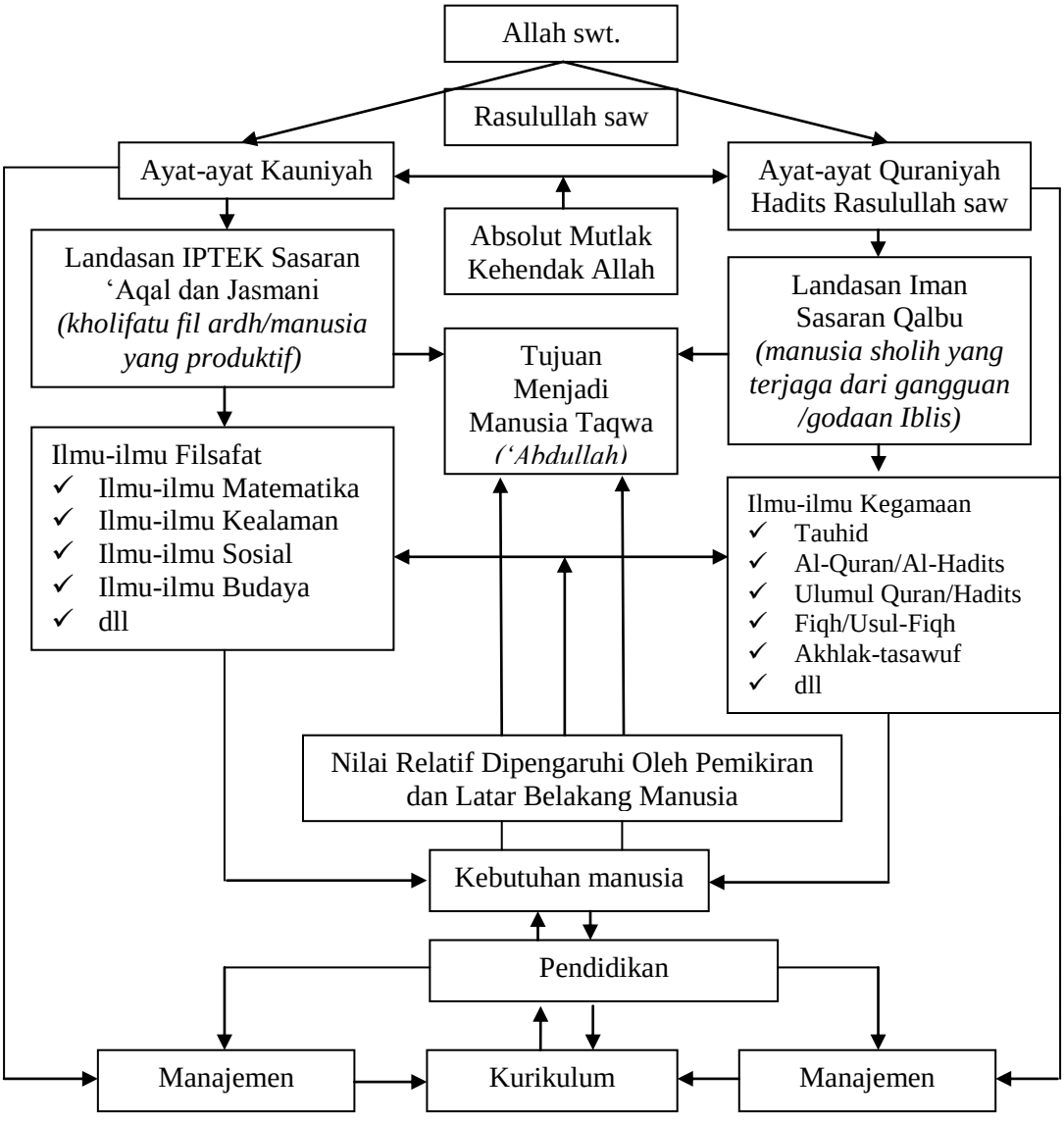

Gambar 4. *Hubungan antara Ayat Quraniyah, Ayat Kauniyah dengan Tujuan Pendidikan Sebagai Komponen Kurikulum Pendidikan Islam*

Mencermati hal di atas, bentuk pendidikan pesantren yang hanya mendasarkan pada kurikulum "salafi" dan mempunyai ketergantungan yang berlebihan pada Kiai tampaknya merupakan persoalan tersendiri, jika dikaitkan dengan tuntutan perubahan jaman yang senantiasa melaju dengan cepat ini.

Bentuk pesantren yang demikian akan mengarah pada pemahaman Islam yang parsial karena Islam hanya dipahami dengan pendekatan normatif semata. Belum lagi output (santri) yang tidak dipersiapkan untuk menghadapi problematika modern, mereka cenderung mengambil jarak dengan proses perkembangan jaman yang serba cepat ini.

Pesantren dalam bentuk ini, hidup dan matinya sangat tergantung pada kebesaran kiainya, kalau di pesantren tersebut masih ada Kiai yang "mumpuni" dan dipandang mampu serta diterima oleh masyarakat, maka pesantren tersebut akan tetap eksis. Tetapi sebaliknya, jika pesantren tersebut sudah ditinggal oleh kiainya dan tidak ada pengganti yang mampu melanjutkan, maka berangsur-angsur akan ditinggalkan oleh santrinya. Oleh karena itu, inovasi dalam penataan kurikulum perlu direalisasikan, yaitu merancang kurikulum yang mengacu pada tuntutan masyarakat sekarang dengan tidak meninggalkan karakteristik pesantren yang ada sebab kalau tidak, besar kemungkinan pesantren tersebut akan semakin ditinggalkan oleh para santrinya.

3. Unsur Pondok Pesantren

Secara historis, pesantren memiliki karakter utama[126], yaitu : 1) Pesantren didirikan sebagai bagian dan atas dukungan masyarakatnya sendiri. 2) Dalam

[126] Departemen Agama, *Pola Pembelajaran di Pesantren*, (Jakarta: Ditjen Kelembagaan Agama Islam – Proyek Peningkatan Pondok Pesantren, 2001), hal. 7

penyelenggaraan pendidikan, Pesantren menerapkan kesetaraan santrinya, tidak membedakan status dan tingkat kekayaan orangtuanya. 3) Pesantren mengemban missi "menghilangkan kebodohan", *tafaqquh fi al-din* dan men-*syiar*-kan Islam.

Dalam sejarah perkembangannya, fungsi pokok pesantren adalah mencetak ulama dan ahli agama. Sampai sekarang paradigma tersebut masih dipelihara, dipertahankan dan dipegang teguh oleh para pendiri dan pengasuh pondok pesantren. Namun, seiring perkembangan zaman, selain kegiatan pendidikan dan pengajaran agama; beberapa pesantren telah melakukan pembaharuan dengan pengembangan komponen pendidikan lainnya; seperti penambahan sistim kemadrasahan atau adanya penambahan mata pelajaran selain mata pelajaran agama. Namun, bahwa pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam; tetap dengan ciri khusus[127]; yaitu :

- *Masjid*; sebagai pusat pendidikan dan pusat kompleksitas kegiatan pesantren.
- *Pondok* atau *Asrama*; sebagai tempat tinggal santri,
- *Pengajian*; sebagai bentuk pengajaran kyai terhadap para santri,
- *Santri*; yang tinggal di asrama dan belajar pada kyai, dan
- *Kyai*; sebagai pemimpin pondok pesantren.

Dari semua unsur ini, segala aktivitas dan kegiatan pondok pesantren tercakup dalam "Tri Dharma Pondok Pesantren"[128]; yaitu :

a. Peningkatan keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah SWT,
b. Pengembangan keilmuan yang bermanfaat, dan
c. Pengabdian terhadap agama, masyarakat dan Negara.

[127] Zamakhsyari Dhofier, *op cit*, hal. 17-18
[128] Departemen Agama – *Pola Pengembangan Pondok Pesantren*, op cit, hal 40

4. Tipologi

Selama ini orang sering membuat kategorisasi pesantren di Indonesia secara sederhana menjadi dua bentuk; yaitu *Pesantren Salaf* dan *Pesantren Khalaf*. Pesantren Salaf sering diidentikkan dengan pesantren tradisional, sehingga pesantren yang tidak tergolong *salaf* dikategorikan sebagai pesantren modern.

Tipologi pesantren yang ada selama ini, menampakkan berbagai variasi dari salaf dan non-salaf. Dilihat dari aspek materi dan metode pendidikan yang diterapkan dalam perkembangan selanjutnya, maka Menteri Agama menetapkan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1979, tentang bentuk pondok pesantren; yang dibagi menjadi *empat tipe*[129] yautu:

Pondok Pesantren Tipe A; yaitu pondok pesantren tempat para santri belajar dan bertempat tinggal di asrama di lingkungan pesantren, dengan pengajaran yang bersifat tradisional.

Pondok Pesantren Tipe B; yaitu pondok pesantren yang menyelenggarakan pengajaran klasikal (madrasiy). Pengajaran oleh kyai bersifat aplikatif dan diberikan pada waktu tertentu. Para santri tinggal di asrama lingkungan pesantren.

Pondok Pesantren Tipe C; yaitu pondok pesantren yang hanya merupakan asrama, sedang para santrinya belajar di luar (madrasah atau sekolah umum), sedangkan kyai hanya merupakan pengawas dan Pembina mental para santri.

[129] *Ibid*, hal 24

Pondok Pesantren Tipe D; yaitu pondok pesantren yang menyelenggarakan sistem pembelajaran bergaya pesantren salaf dan sekaligus sistem sekolah atau madrasah.

Beberapa bentuk pesantren seperti yang disebut dalam Peraturan Menteri Agama tersebut, hanyalah merupakan upaya Pemerintah memberi batasan atau pemahaman yang lebih terarah dan khas tentang eksistensi pesantren. Walaupun demikian, perkembangan pesantren tidak terbatas pada *empat bentuk* tersebut saja, namun dapat lebih beragam banyaknya. Bahkan untuk tipe yang samapun bisa saja terdapat perbedaan tertentu yang menyebabkan masing-masing pesantren tidak sama dan memiliki kekhasan tersendiri.

5. Manhaj dan Metode Pembelajaran

Jika yang dimaksud dengan kurikulum sebagaimana halnya lembaga pendidikan formal, dapat dikatakan bahwa pondok pesantren belum memiliki kurikulum. Namun sesungguhnya, jika yang dimaksud sebagai *manhaj* (arah pembelajaran tertentu), maka pondok pesantren tentu memiliki "kurikulum" melalui *funun* kitab-kitab yang diajarkan pada para santri[130]. Menurut Amir Hamzah, seperti dikutip Hasbullah; muatan *manhaj* pesantren lebih terkonsentrasi pada ilmu-ilmu agama, semisal sintaksis Arab, morfologi Arab, hokum Islam, sistem yurisprodensi Islam, hadits, tafsir, Al-Qur'an, teologi Islam, tasawuf, tarikh dan retorika[131].

[130] Departemen Agama, *Ibid,* hal 43

[131] Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 26-27

Dalam pembelajaran, pondok pesantren mempergunakan suatu bentuk *"kurikulum"* tertentu yang telah lama dipergunakan. Yaitu dengan cara pengajaran tuntas kitab yang dipelajari *(kitabi)* yang berlandaskan pada kitab pegangan sebagai rujukan utama suatu pesantren untuk masing-masing bidang studi yang berbeda. Sehingga akhir sistem pembelajaran yang diberikan oleh pondok pesantren berstandar kepada tamatnya buku atau kitab yang dipelajari, bukan pada pemahaman secara tuntas untuk suatu topik (*maudlu`i).* Penamaan batasan perjenjanganpun berbagai istilah. Ada yang memgunakan istilah *marhalah, sanah*, dan lainnya. Bahkan ada yang *seakan* bertingkat seperti madrasah formal, *Ibtida'i, Tsanawy* dan *`Aly* atau menggunakan istilah *Ula, Wustha* dan *'Ulya.*

Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk menyampaikan ajaran sampai ke tujuan; antara lain :

a. Metode Wetonan atau Bandongan (collective learning process)

Metode *wetonan/bandongan*; adalah cara penyampaian ajaran /kitab kuning; yaitu seorang guru, kyai atau ustadz membacakan dan menjelaskan isi ajaran/kitab kuning tersebut, sementara santri, murid atau siswa mendengarkan, memaknai dan menerima.

b. Metode Sorogan (individual learning process)

Dalam metode *sorogan*, atau layanan perorangan; santri menyodorkan kitab *(sorog)* yang akan dibahas, sang guru mendengarkan, setelah itu beliau memberikan komentar dan bimbingan yang dianggap perlu bagi santri.

b. Metode Hapalan (Tahfidz).

Metode ini telah menjadi ciri yang melekat pada sistem pendidikan tradisional, termasuk pesantren. *Tahfidz* dianggap penting pada sistem keilmuan yang lebih mengutamakan argumen *naqli*, transmisi dan periwayatan (normatif).

c. Metode Diskusi (mudzakarah).

Metode ini berarti penyajian bahan pelajaran dilakukan dengan cara santri membahasnya bersama-sama melalui tukar pendapat tentang suatu topik atau masalah tertentu yang ada dalam kitab peganganSementara kyai atau ustaz bertindak sebagai ”moderator”. Kegiatan *mudzakarah*, dapat diartikan sebagai pertemuan ilmiah yang membahas masalah diniyah, di beberapa pesantren metode ini disebut pula dengan *majlis bahtsul masaa'il*.

d. Metode Majelis Taklim (musyawarah / munazharah)

Metode yang dipergunakan adalah pembelajaran dengan cara ceramah, biasanya disampaikan dalam kegatan tabligh, atau kuliah umum.

Demikian uraian Bab II ini sebagai kajian teoritis yang merupakan dasar bagi penelitian lapangan. Selanjutnya uraian tentang metodologi penelitian disajikan pada Bab III berikut ini.

BAB III
METODE PENELITIAN

Pada bab ini, akan diuraikan tentang metode penelitian, meliputi; (A) Jenis dan Pendekatan Penelitian; (B) Kehadiran Peneliti; (C) Data dan Sumber Data; (D) Prosedur Pengumpulan Data; (E) Analisis Data dan (F) Pengecekan Keabsahan Data.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Sukmadinata menyatakan: "Metode penelitian merupakan rangkaian cara atau kegiatan pelaksanaan penelitian yang didasarkan oleh asumsi-asumsi dasar, pandangan-pandangan filosofis dan ideologis, pertanyaan dan isu-isu yang dihadapi"[132] Metode penelitian bertujuan untuk memandu peneliti dalam kegiatan penelitian. Menurut Suharto:

> "Metode penelitian merupakan pilihan wacana berpikir, berbuat, yang dipersiapkan secara baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian dipergunakan syarat-syarat yang penting agar dapat memberikan garis dan bimbingan yang cermat dan teliti. Dengan demikian, penelitian akan memperoleh hasil yang tepat, benar dan memenuhi kriteria-kriteria nilai ilmiah"[133].

Penelitian ini berupaya menggambarkan manajemen kurikulum di Pondok Pesantren Salafiyah Penyelenggara Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun (selanjutnya disebut PPS Wajar Dikdas) di Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya dianalisis dan dibangun menjadi model yang dapat dipedomani, maka digunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif dengan tata-pikir analisis kegiatan. Mengutip Sukmadinata: "Penelitian deskriptif dalam bidang pendidikan dan kurikulum merupakan hal yang cukup penting, mendeskripsikan fenomena-

[132]Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 52
[133]Bohar Suharto, *Pengertian, Fungsi, Format, Bimbingan Karya Ilmiah*, (Bandung: Karsito, 1993) h. 77

fenomena kegiatan pendidikan, pembelajaran, implementasi kurikulum pada berbagai jenis, jenjang dan satuan pendidikan"[134]. Selanjutnya Sukmadinata menyatakan: "Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena dari sudut atau perspektif partisipan. Partisipan adalah orang yang diajak berwawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, persepsinya"[135]. Menurut Nasution: "Penelitian kualitatif pada hakekatnya ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya[136]". Dalam penelitian kualitatif peneliti turun ke lapangan untuk melakukan wawancara, studi dokumenter dan observasi. Menurut Sukmadinata:

> Penelitian kualitatif menuntut perencanaan yang matang untuk menentukan tempat, partisipasi dan memulai pengumpulan data. Rencana ini bersifat emergent atau berubah dan berkembang sesuai dengan perubahan dalam temuan di lapangan. Desain yang berubah atau emergent tersebut bersifat sirkuler karena penentuan sampel yang bersifat purposive, pengumpulan data dan analisis data dilakukan secara simultan dan merupakan langkah yang bersifat interaktif bukan terpisah-pisah[137].

Dalam penelitian kualitatif, peneliti diharapkan mampu berbaur dengan responden dan mengerti apa yang dikehendaki dan tidak dikehendaki mereka. Nasution menyatakan: "Dengan metode kualitatif peneliti akan mengamati keadaan di lapangan, berinteraksi dengan para responden, memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang lingkungannya. Untuk itu, peneliti perlu turun ke lapangan berada di lingkungan mereka[138]".

---

[134]Nana Syaodih Sukmadinata, *Op.cit*, hal 72

[135] *Ibid*, hal. 94

[136] Sarimuda Nasution, Metode Penelititan Naturalistik Kualitatif, (Bandung: Jemmars, 1988) hal. 5

[137] Nana Syaodih Sukmadinata, *op.cit*, hal. 99

[138] Sarimuda Nasution, (1988) *loc.cit*

Desain penelitian analisis kegiatan, menurut Sukmadinata: "Analisis kegiatan diarahkan untuk menganalisis kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan suatu tugas atau pekerjaan[139]", dalam hal ini analisis kegiatan manajemen kurikulum pada PPS Wajar Dikdas di Kabupaten Barito Kuala.

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Secara harfiah penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi dan kejadian secara sistematis, faktual dan akurat. Artinya, penelitian deskriptif adalah akumulasi data dasar dengan cara deskripsi semata-mata, tanpa perlu mentest hipotesis, membuat ramalan atau mendapatkan makna implikasi.[140]

Moleong mengistilahkan penelitian ini sebagai penelitian kualitatif deskriptif, untuk mendapatkan data berupa kata-kata, informasi tertulis dan lisan serta keadaan dari pelaku yang sedang diteliti.[141] Beberapa jenis metode deskriptif dalam penelitian adalah penelitian survey, studi kasus, studi korelasi, studi komparatif, penilaian, metode historis dan sejenisnya. Data kualitatif yang digali berupa nilai berdasarkan penilaian peneliti, bukan berupa data angka (numerik).[142]

Penelitian ini bersifat studi kasus, dengan meneliti masing-masing PPS Wajar Dikdas di Kabupaten Barito Kuala, yaitu berkenaan dengan tatakelola kurikulum. Penelitian kasus adalah penelitian mendalam mengenai unit sosial tertentu yang hasilnya merupakan gambaran yang cukup lengkap dan

[139] Nana Syaodih Sukmadinata, *loc.cit*.

[140] Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 76.

[141] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung; Remaja Rosdakarya, 1994), h. 3.

[142] Nana Sudjana dan Awal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru, 2002), h. 85.

terorganisasi. Tujuan penelitian kasus adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, baik individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.[143]

Melalui pendekatan kualitatif ini akan dihasilkan data berupa kata-kata yang terulis atau lisan dari para responden atau informan pelaku yang dapat diamati. Metode penelitian kualitatif ini populer dan meluas ke berbagai disiplin ilmu sosial, diantaranya dalam dunia pendidikan. Metode ini pada hakikatnya adalah mengamati orang dan lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa mereka serta penafsiran mereka terhadap dunia sekitarnya.

B. Kehadiran Peneliti

Adapun lokasi sebagai tujuan kehadiran peneliti ini adalah tiga dari lima PPS Wajar Dikdas yang ada di kabupaten Barito Kuala. Pemilihan ketiga PPS tersebut dengan pertimbangan bahwa ketiganya merupakan PPS yang telah cukup lama diberi kepercayaan sebagai Penyelenggara Wajar Dikdas; sehingga ketiga PPS dimaksud telah berhak mengikuti Ujian Nasional tingkat Wustha; sedangkan dua PPS lainnya belum memiliki siswa Wustha yang duduk di tahun ketiga. Adapun ketiga PPS dimaksud adalah:

- Pondok Pesantren Al-Amin; Jl. Trans Kalimantan KM 14,9 Desa Beringin - Kecamatan Alalak
- Pondok Pesantren Nurussalam; Desa Tinggiran Darat – Kecamatan Mekarsari

[143] Sumadi Suryabrata, *op.cit*., hal. 80.

- Pondok Pesantren Tarbiyatul Furqan; Desa Tanjung Harapan – Kecamatan Alalak.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Dari wawancara dan observasi diperoleh data primer berupa kata-kata, kejadian dan tindakan. Data primer yang digali dalam penelitian ini terdiri dari permasalahan pokok yang mencakup model ‘kurikulum’ PPS Wajar Dikdas, faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen kurikulum serta usaha menata-kelola kurikulum pada PPS Wajar Dikdas. Data primer digali melalui wawancara dan angket.

Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber tertulis yang berasal dari buku, majalah dan dokumen resmi yang ada di sekolah yang diteliti terutama berkaitan dengan:

a. Gambaran umum lokasi penelitian.
b. Identitas para ustaz dan santri.
c. Sarana dan fasilitas yang ada.
d. Keadaan lingkungan pesantren

2. Sumber Data

Sumber data terdiri dari:

a. Kyai, para ustaz sebagai pengajar pesantren, serta santri.
b. Alumni pesantren, orang tua santri, masyarakat setempat.
c. Kegiatan pesantren dalam kurun waktu yang tertentu.
d. Dokumen-dokumen di pesantren.

D. Prosedur Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Moleong, Penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dengan peran dan kedudukan peneliti sebagai bagian dari instrumen penelitian, ciri-cirinya antara lain : responsive pada lingkungan, adaptasi tinggi, memproses data secara cepat.[144]

Untuk mengumpulkan data lapangan, digunakan teknik-teknik berikut;

a. Wawancara

Wawancara yang digunakan wawancara semi terstruktur. Peneliti menggunakan pedoman wawancara sebagai patokan berupa topik-topik pembicaraan yang mengacu kepada tema sentral dalam penggalian data yang berhubungan dengan manajemen kurikulum di PPS[145]. Pedoman wawancara disusun terlebih dahulu, walaupun pada situasi tertentu peneliti dapat berimprovisasi disesuaikan dengan keadaan responden yang terdiri atas pimpinan pesantren, para ustaz dan santri dan stakeholder. Peneliti datang ke tiga PPS pada beberapa kesempatan dan pada waktu tertentu; karena jarak antara ketiganya tidak cukup berdekatan. Wawancara dilakukan kepada Pemimpin Pondok, ustadz, pengajar mata pelajaran umum, santri dan orangtua santri; berkisar pada perencanaan dan pengorganisasian kurikulum, penunjukan staf pengajar dan

[144] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001) halaman 117-123

[145] Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta, Salemba Humanika, 2010), hal. 123-124

syarat-syarat yang diperlukan, proses pembelajaran, implementasi kurikulum di lapangan, alat evaluasi kurikulum, perencanaan kurikulum berkesinambungan, dan kualitas hasil didik.

Agar terwujud wawancara yang dan lancar dan berhasil maka penulis berusaha menjalin hubungan akrab dengan subjek penelitian jauh sebelum penelitian lapangan dilakukan[146]. Wawancara dilakukan di samping dibantu alat-alat tulis, penulis juga menggunakan alat perekam, sehingga memudahkan dalam mengingat dan mengulang-ulang data yang digali.

b. Studi Dokumentasi

Menurut Sukmadinata; studi dokumentasi adalah "merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen"[147]. Dokumen, menurut Moleong: "Sangat penting dan bermanfaat dalam penelitian, karena dapat berfungsi untuk menguji, menafsirkan dan membuat satu ramalan. Ia menjadi bahan yang kaya, stabil, alamiah, kontekstual, murah dan dapat sebagai bukti bagi satu penelitian".[148] Peneliti mengumpulkan berbagai data tertulis dari informan secara cermat yang dianggap mendukung, melengkapi dan memperkaya data penelitian yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Data yang dikumpulkan adalah data ustadz dan para pengajar, data santri, jadwal pembelajaran, satuan acara pembelajaran, Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar mata pelajaran umum, berbagai kitab kuning sebagai bahan rujukan, catatan para ustaz dan data alumni.

[146]Amirul Hadi dan Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan,* (Bandung: Pustaka Setia, 2005), halaman 135.

[147] Nana Syaodih Sukmadinata, *op.cit*, hal. 221

[148] Lexy Moleong, (2001), *op.cit*, hal. 161

c. Observasi

Menurut Sukmadinata; observasi adalah "Merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung".[149] Observasi bisa dilaksanakan dengan cara partisipatif, atau nonpartisipatif.[150]

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang terlihat pada subjek dan objek penelitian. Observasi yang dilakukan bersifat langsung, yaitu peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan langsung di lokasi penelitian. Dengan kelebihan dan kekurangannya penulis memilih metode observasi nonpartisipatif, untuk mengetahui para ustaz melaksanakan perancangan dan proses belajar mengajar, serta melakukan penilaian. Peneliti mengamati dan mencatat segala aktivitas sejak persiapan ustadz sebelum memulai pembelajaran sampai selesai proses pembelajaran. Pencatatan dilakukan secara interpretatif, yang dilakukan sambil memberikan interpretasi terhadap gejala yang timbul atau data yang diperoleh.[151]

2. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data, ditentukan berdasarkan data yang diperlukan dari sejumlah subyek dan teknik-teknik yang digunakan. Gambaran kebutuhan data dari sejumlah sampel, maka alat pengumpul data tambahan digunakan:

---

[149] Nana Syaodih Sukmadinata, *op.cit*, hal. 220

[150] James A Black dan Dean J Champion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, (Terjemahan: E. Koswara dkk), (Bandung: Replika Aditama, 2011, hal. 289. Lihat pula: Lexy Moleong, *op.cit*, hal. 270 dan Nana Syaodih Sukmadinata, *Ibid*,

[151] Amirul Hadi dan Haryono, *op.cit*, hal. 129 dan 131

a. Catatan wawancara, alat ini digunakan agar wawancara yang sedang berlangsung dapat lebih terfokus kepada topik yang diteliti.
b. Daftar isian, untuk kemudahan penggalian data; dalam hal pencatatan kitab-kitab kuning yang dipergunakan, maka kepada responden dilakukan wawancara tertulis dan disediakan daftar isian.
c. Catatan observasi dan studi dokumen. Catatan ini diperlukan untuk memudahkan proses pengamatan yang seksama mengenai manusia ataupun non manusia yang terkait dengan topik penelitian.
d. Laporan kegiatan lapangan; yang berisi deskripsi informasi dari sejumlah data yang diperlukan berdasarkan kelompok dan sumber data.

1. **Tahapan Penelitian**

Dalam proses penelitian ini penulis melewati beberapa tahapan, yaitu:

a. Tahap Orientasi

Pada tahap ini penulis melakukan persiapan penelitian lapangan, dengan rincian sebagai berikut:

1) Penjajagan awal ke lapangan dalam rangka pembuatan proposal tesis, waktu yang diperlukan dua minggu. Dalam tahap ini penulis mengadakan pendekatan kepada lembaga terkait guna mendapatkan gambaran umum tentang topik penelitian.

2) Membuat proposal tesis dan berkonsultasi dengan Tim Dosen Program Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, waktu yang diperlukan dua

minggu. Mengajukan proposal kepada Pengelola Program Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, waktu yang diperlukan sesuai jadual yang ditetapkan

3) Persiapan untuk penelitian lapangan meliputi perlengkapan surat-surat penelitian dan menghubungi pihak-pihak yang diteliti, waktunya dua minggu. Dalam hal ini penulis menghubungi para responden dan informan guna mengadakan negosiasi untuk mendapatkan persetujuan mengenai pelaksanaan penelitian dan mengatur jadwal penelitian sesuai dengan kesepakatan.

b. Tahap Eksplorasi

Pada tahap ini penulis melaksanakan penelitian lapangan yang sesungguhnya, dengan rincian sebagai berikut:

1) Menyusun dan menentukan sumber data yang dapat dipercaya dan menjadi prioritas untuk diteliti lebih dahulu.
2) Penelitian lapangan, selama dua bulan. Dalam penelitian ini digunakan teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi.
3) Mengolah hasil penelitian dan menyusun naskah tesis, waktunya selama tiga minggu.

c. Tahap Pengecekan

Tahap ini merupakan upaya mengecek kebenaran dari data dan informasi yang telah dikumpulkan agar diperoleh hasil penelitian yang dapat dipercaya. Tahap ini terdiri dari:

1) Menganalisis data yang terkumpul dan mengkonfirmasikannya dengan para responden dan informan agar terdapat kesesuaian antara data yang diperoleh dengan maksud dari pemberi data.

2) Meminta penjelasan lebih lanjut ketika dianggap perlu guna melengkapi data dan informasi.

E. Analisis Data

Analisis data, menurut Patton (dalam Moleong) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar[152]. Sedangkan menurut Bogdan dan Biklen mendefinisikan analisis data sebagai proses merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide)[153].

Pada dasarnya semua teknik analisis data kualitatif meliputi prosedur pengumpulan data, *input* data, analisis data, penarikan kesimpulan dan verifikasi yang diakhiri dengan penulisan hasil temuan dalam bentuk narasi[154]. Salah satu teknik analisis data adalah model interaktif oleh Miles dan Huberman; teknik analisis data tersebut terdiri atas empat tahapan; yaitu pengumpulan data, reduksi data, *display* data dan tahap penarikan kesimpulan dan/atau tahap verifikasi[155].

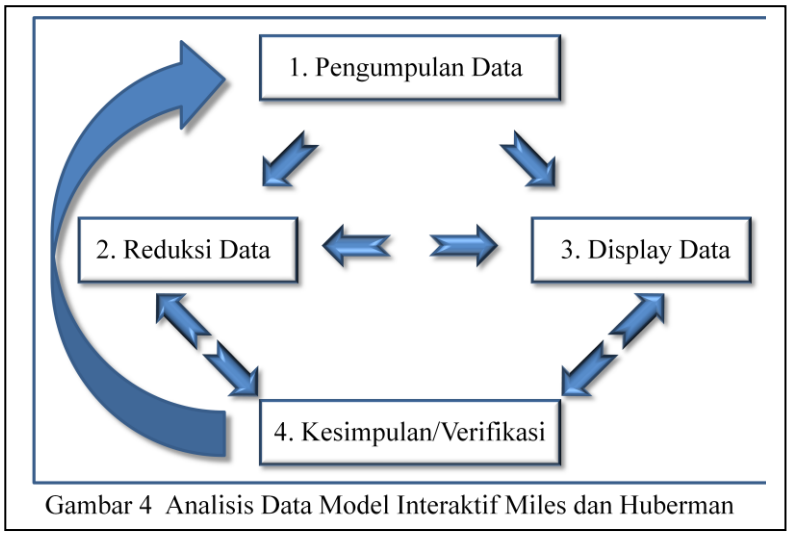

Gambar 4 Analisis Data Model Interaktif Miles dan Huberman

[152] L *ion Methods,* (Beverly H

[153] L *ve Research for Educati*

[154] Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial,* (Jakarta, Salemba Humanika, 2010), hal. 123-124

[155] Haris Herdiansyah, *Ibid*, hal 164 – dari: MB. Miles dan AM. Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. 2nd ed., (California: Sage Publications, 94)

1. Pengumpulan Data; pada penelitian kualitatif proses pengumpulan data dilakukan sebelum penelitian, pada saat pelaksanaan dan di akhir penelitian; bahkan sebaiknya proses pengumpulan data sudah dilakukan ketika penelitian masih berupa konsep[156].

Bahkan Creswell menyarankan bahwa peneliti kualitatif sebaiknya sudah berpikir dan melakukan analisis tema dan pemilahan tema pada awal penelitian[157].

2. Reduksi data, yaitu proses penggabungan dan penyeragaman bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan (script) yang akan di analisis. Data-data yang sudah terkumpul diolah untuk menemukan hal-hal pokok berkaitan dengan manajemen kurikulum, misalnya data manajemen yang diperoleh sesuai atau ada hubungan dengan kurikulum. Termasuk pula mengecek kebenaran data dengan membandingkan data dengan sumber lain.

3. Display data yaitu merangkum data yang diperoleh dengan susunan yang sistematis dengan pengklasifikasian data sehingga setiap pertanyaan penelitian dapat terjawab. Pemeriksaan seluruh data dan informasi untuk mengetahui kelengkapan dan keabsahannya. Apabila masih kurang, maka perlu dilengkapi lagi. Menyusun daftar *check,* yakni setiap akhir wawancara atau pembahasan satu topik diusahakan untuk menyimpulkan secara bersama dengan sumber data, juga dilakukan konfirmasi narasumber terhadap laporan hasil wawancara, sehingga apabila ada kekeliruan pendapat dapat diperbaiki atau bila ada kekurangan dapat

[156] Haris Herdiansyah, *Ibid*
[157] Haris Herdiansyah, *Ibid*

ditambah dengan informasi baru. Dengan demikian, data yang diperoleh sesuai dengan yang dimaksud oleh narasumber.

4. Penarikan kesimpulan; yaitu tahap penafsiran data sesuai dengan tujuan penelitian. Peneliti memberi makna dan arti sesuai dengan pandangan dan pemikiran peneliti untuk mencapai satu kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Verifikasi data, langkah untuk menguji validitas data terhadap teori-teori yang relevan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan manajemen kurikulum. Validitas hasil penelitian ini dilakukan dengan menetapkan tingkat kepercayaan dan kebenaran, menurut Nasution: validitas tergantung pada kredibilitas (validitas internal), dipendabilitas (reabilitas), transferabilitas (validitas eksternal), dan konfirmabilitas (objektifitas).[158]

1. Kredibilitas

Kredibilitas atau kebenaran data penelitian dan mencari kecocokan antara konsep penelitian dengan konsep responden diperoleh dengan kegiatan:

a. Memperpanjang masa observasi, bila mungkin.
b. Pengamatan yang terus menerus dan berkesinambungan.
c. Triangulasi yaitu mengecek kebenaran data dengan menggunakan sumber berbeda. Menurut Burns: *Triangulation may be defined as the use of two or more methods of data collection in the studi of some aspect of humam behavior*[159]. Triangulasi menurut Burns didefinisikan

[158] Sarimuda Nasution, (1988) *op.cit*, hal. 144
[159] Robert B Burns, *Introduction to Research Method*, (Melbourne: Longman Pty Ltd, 1995) hal. 272

sebagai penggunaan dua atau lebih metode pengumpulan data dalam penelitian beberapa aspek sifat atau perilaku manusia.

d. Membicarakan dengan orang lain, misalnya membahas catatan lapangan dengan rekan atau pejabat di lingkungan akademik atau instansi terkait lainnya yang berkepentingan dengan penelitian ini.
e. Penggunaan bahan referensi untuk meningkatkan kepercayaan terhadap kebenaran penelitian dengan menggunakan rekaman, dokumen, dan catatan hasil penelitian, serta berbagai buku sebagai landasan teoritis.
f. Mengadakan memberi check untuk menghindari perbedaan-perbedaan persepsi antara peneliti dengan responden. Kegiatan ini dilakukan setelah peneliti membuat rangkuman penelitian dibicarakan kembali dengan informan. Misalnya dengan kyai mengecek ulang data standar kurikulum dan kajian utama serta kajian pelengkap dan dengan para ustaz mengecek ulang data tentang pengembangan sylabus mata pelajaran.

2. Dependabilitas

Menurut Moleong, dependabilitas atau kekurangan, sama dengan reliabilitas dalam penelitian nonkualitatif.[160] Sedangkan menurut Nasution: "Dependibility menurut istilah konvensional disebut reliabilitas"[161]. Artinya peneliti sebagai alat utama penelitian memenuhi syarat realibilitas hasil penelitian yang digantungkan kepadanya. Sarat realibilitas apabila penelitian dilakukan berulang kali terhadap obyek sama menghasilkan data yang sama pula.

[160] Lexy Moleong, (2001), *op.cit*, hal. 190
[161] Sarimuda Nasution, (1988) *op.cit*, hal. 119

3. Konfirmabilitas

Berkenaan dengan objektivitas hasil penelitian, pengujian objektivitas data dilakukan melalui konfirmabilitas dengan cara *audit trial*, melakukan pemeriksaan ulang untuk meyakinkan pokok-pokok yang dilaporkan. Untuk memperoleh konfirmabilitas penelitian, dilakukan langkah-langkah penelitian secara sistematis agar ketika perlu ada perubahan segera dapat dilakukan. Yaitu dengan membuat catatan data, menganalisis data, mencatat hasil sintesis data, dan catatan proses yang digunakan. *Cek and recek,* yaitu upaya mengontrol, mengkonfirmasikan, dan mengevaluasi kepastian hasil penelitian dengan responden dan subjek terkait.

4. Transferabilitas

Sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan ditempat atau situasi lain. Transferabilitas berkenaan dengan generalisasi, dalam penelitian kualitatif transferabilitas tergantung kepada pengguna. Dapatkah hasil penelitian digunakan dalam konteks dan situasi tertentu, tergantung pada pemakai. Peneliti menyampaikan hasil penelitian ini kepada Direktor Pendidikan Keagamaan Dan Pondok Pesantren (Pekapontren) pada Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia; melalui Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan menggunakan metode penelitian pada Bab III ini, selanjutnya disajikan pada Bab IV tentang gambaran umum pesantren, temuan penelitian dan pembahasan yang menguraikan analisis hasil penelitian.

BAB IV
PAPARAN DATA PENELITIAN

Hasil penelitian yang diperoleh di dua kecamatan pesantren sampel disajikan pada Bab IV ini. Selain deskripsi temuan-temuan penelitian, penafsiran dan pembahasan data yang diperoleh dalam penelitian tersebut, disajikan sekilas gambaran umum tentang ketiga pesantren tersebut.

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Pesantren Al-Amin[162]

Pesantren Al-Amin didirikan pada tahun 1982 oleh H. Habib Salmin Al-Baghaits, Baidawi HMA dan Sya'rani Abdullah. Dalam perkembangan selanjutmya, operasionalnya dijalankan oleh H. Muhlan Matnuh bersama-sama Bapak Baidawi HMA, di bantu dua orang ustazd senior, 31 orang ustadz dan 13 orang ustadzah dan dua orang petugas Tata Usaha dan Pustakawan. Latar belakang pendirian pesantren membina dan mengembangkan ilmu-ilmu agama kepada masyarakat untuk membentuk generasi muda yang agamis dan berakhlaq mulia.

Pesantren Al-Amin terletak di Desa Beringin; Jalan Trans Kalimantan KM 14,9 Kecamatan Alalak – Kabupaten Barito Kuala . Kajian utama adalah Fiqh dan Ushul Fiqh, dan kajian pendukung adalah Nahwu-Sharaf (gramatika Bahasa Arab), Tauhid, Hadits-Ilmu Hadits, Tafsir dan 'Ulumul Qu'ran, Akhlak-Tasawuf, Ilmu Falak serta Balaghah dan Mantiq.

[162] Dokumen Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala serta hasil *Studi Dokumentasi*, Sabtu, 12 Mei 2012 dan Wawancara: Baidawi, HMA, *Pimp. PPS Al-Amin*, Desa Beringin: Tanggal 12, 13 dan 17 Mei 2012 serta 18 Juli 2012

Pesantren Al-Amin berada di bawah pengelolaan Yayasan Pondok Pesantren Al-Amin yang didirikan pada tahun 1982; dan telah terdaftar di Kementerian Agama RI dengan Nomor Statistik 510063040008. Sejak tahun 2002, pesantren ini dipercaya sebagai Pondok Pesantren Salafiyah (PPS) Penyelenggara Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 Tahun.

Santri kebanyakan datang dari penduduk desa di kecamatan Alalak, sebagian kecil dari luar kecamatan. Santri yang belajar di pesantren tersebut (menurut data Juli 2011) berjumlah 544 orang; yaitu 285 santri (L) dan 259 santriwati (P), terdiri dari: a) tingkat Ula: L = 177 dan P 150, b) tingkat Wustha: L = 68 dan P = 74 serta c) tingkat 'Ulya: L = 40 dan P = 35. Mereka merupakan santri *kalong* yaitu istilah untuk para santri yang tidak mondok di asrama. Tidak banyak santri yang *mondok*; yaitu menuntut ilmu di pesantren tersebut dengan menginap di asrama yang telah tersedia, hal ini disebabkan karena sebagian besar para santri berasal dari penduduk sekitar yang tempat kediamannya tidak terlalu jauh dari pesantren. Para orang tua santri memiliki pekerjaan yang beragam; PNS, petani, buruh tani, wiraswasta dan pedagang; dengan latar belakang ekonomi rata-rata menengah kebawah.

b. Pesantren Nurusalam[163]

Pesantren Nurusaalam didirikan pada tahun 1982 oleh H. Abdullah; secara operasional sampai tahun 1983 pondok ini dipimpin oleh Basuni Jamal. Pada tahun pertama, santri yang terdaftar hanya 15 orang. Perjalanan selanjutnya

[163] Dokumen Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala serta hasil *Studi Dokumentasi*: Sabtu, 19 Mei 2012 dan Wawancara: Ajidan Thalib, *Pimp. PPS Nurussalam*, Tinggiran: Tanggal 19 dan 20 Mei 2012, tanggal 17 dan 24 Juni 2012

dikembangkan oleh H. Ladi Nawidi. Sejak tahun 2003 pesantren ini diresmikan sebagai Pondok Pesantren Salafiyah Penyelenggara Wajar Dikdas 9 Tahun yang sejak tahun 2011 secara operasional di bawah tanggungjawab seorang ustadz senior Bapak Ajidan Thalib, S.Ag yang dibantu dua orang ustazd senior dan 12 orang ustadz dan tiga orang ustadzah serta satu orang karyawan kesekretariatan. Pesantren ini terletak di Desa Tinggiran Darat Anjir Subarjo, Kecamatan Mekarsari. Kajian keagamaan yang menjadi pusat pembelajaran di pesantren yang berada di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Nurussalam ini, antara lain; Tauhid, Fiqh/Ushul Fiqh, Hadits, Al-Qur'an/Tafsir, dan Akhlak. Para santri kebanyakannya berasal dari desa sekitar, namun ada pula beberapa santri yang berasal dari provinsi Kalimantan Tengah.

Pesantren yang terdaftar dengan Nomor Statistik 510063040007 ini sejak tahun 2004 telah menyelenggarakan pula pendidikan kesetaraan Kelompok Belajar (Kejar) Paket C; kemudian pada tahun 2010 telah pula diresmikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Nururssalam; yang siswanya sebagian besar berasal dari para santri lulusan Wustha serta siswa lulusan SMP/MTs terdekat. Santri yang sekarang (Juli 2011) berjumlah 72 orang (L = 35 dan P = 37); semuanya adalah santri tingkat Wustha. Latar belakang pekerjaan orang tua santri: PNS, buruh, petani, pedagang dan wiraswasta; dengan latar belakang ekonomi rata-rata golongan menengah kebawah.

Sejak tahun 1994, terbentuk Majlis Taklim Nururssalam yang dilaksanakan setiap hari Jum'at pagi dihadiri secara variatif oleh 50 sampai dengan 60 *mustami'* laki-laki dan perempuan. Pada setiap pagi, warga sekitar terbantu dengan telah

dibukanya (2006) lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak (TK) Islam, sedangkan pada sore harinya dilaksanakan pembelajaran Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ).

c. Pesantren Tarbiyatul Furqan[164]

Pesantren Tarbiyatul Furqan yang terletak di Desa Tanjung Harapan Ray V RT 5 Kecamatan Alalak, didirikan pada tahun 1995 oleh H. Abdussalam. Secara khusus, pesantren ini dibawah kendali Ahmad Husni, yang kemudian diteruskan oleh putera beliau Ahmad Fauzi; serta dibantu 2 orang ustazd senior dan 8 orang ustadz, 6 orang ustadzah. Latar belakang pendirian pesantren adalah pengembangan da'wah dan syi'ar Islam serta mencetak kader-kader `ulama yang berkualitas unggul dan berakhlakul karimah.

Pesantren Tarbiyatul Furqan yang terdaftar di Kementerian Agama dengan Nomor Statistik 510063040010 dan dibawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Tarbiyatul Furqan ini menetapkan kajian keagamaan adalah Fiqh-Ushul Fiqh, Lughat al'Arabiyah, Akhlak-Tasawuf, Tauhid, `Ulumul Quran dan Tafsir, serta Hadits/Ilmu Hadist. Santri datang dari beberapa desa sekitar dan sebagian kecil dari luar kecamatan.

Data terakhir (Juli 2012) santri di pesantren ini berjumlah 82 orang; yaitu 43 santri (L) dan 39 santriwati (P), terdiri dari: a) tingkat Wustha: L = 41 dan P = 32 serta b) tingkat 'Ulya: L = 2 dan P = 7. Latar belakang orang tua santri: PNS,

[164] Dokumen Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala serta hasil *Studi Dokumentasi*: Sabtu, 26 Mei 2012 dan Wawancara Ahmad Fauzi, *Pimp. PPS Tarbiyatul Furqan*, Tanjung Harapan: tanggal 26 dan 27 Mei 2012 serta tanggal 9 dan 16 Juni 2012

buruh, petani, pedagang, dan wirausaha. Latar belakang ekonomi rata-rata golongan menengah kebawah.

B. Hasil Penelitian di Pondok Pesantren

Hasil penelitian ini merupakan ringkasan dari wawancara, studi dokumentasi dan observasi yang dilakukan di tiga pesantren tempat penelitian dilaksanakan.

1. Pondok Pesantren Al-Amin

a. Secara formal tidak ditemukan tujuan pendidikan tertulis dan terdokumentasikan, namun di lapangan diperoleh petunjuk tujuan pendidikan secara instruksional.
b. Metode yang digunakan adalah wetonan; cara penyampaian materi oleh ustadz dengan membacakan dan menjelaskan materi, sementara santri menyimak, dan digunakan pula metode sorogan; seorang atau beberapa santri datang kepada ustadz dengan kitab yang dikajinya.
c. Pesantren belum mengenal silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP); Belum ada tuntunan khusus bagi pesantren dalam menentukan kurikulum, kecuali atas kebijakan dan pertimbangan pimpinan pesantren dan para pengajar serta kepentingan santri.
d. Evaluasi pembelajaran umumnya masih menggunakan evaluasi lisan dengan tanya jawab sebelum dan sesudah proses belajar mengajar (PBM), ustadz atau santri senior menilai jawaban santri tersebut secara kumulatif dan tidak tertulis, tapi hanya dalam ingatan ustadz atau santri senior.

e. Pembelajaran keagamaan atau pengajian kitab dilakukan pada pagi hari dan mata pelajaran umum mengambil waktu siang hari dilakukan pada hari-hari tertentu (Mata pelajaran Bahasa Indonesia dan PKn pada hari **Senin**, IPS dan Matematika setiap hari **Rabu**; sedangkan IPA dan Bahasa Inggris pada hari **Sabtu**). Hari libur pada hari Jum'at.
f. Dalam hal materi ajar pada mata pelajaran umum, pihak pengajar di pesantren tidak mendapat kesulitan, karena mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional.
g. Kendala yang dihadapi oleh pengembangan manajemen di pesantren adalah sumber daya manusianya, dan belum siap merekonstruksi '*kurikulum'* dengan perubahan paradigma pendidikan dan tuntutan masyarakat.
h. Pemberian honorarium dibedakan antara guru mata pelajaran umum dan para ustadz internal; guru pelajaran umum diberi honor dari dana BOS; yaitu Rp. 20.000,- perhari/datang atau Rp. 4.000,- per jam pelajaran; sedangkan para ustadz dibayar dengan padi yang diwakafkan santri 100 kaleng, yang dibagi untuk beberapa ustadz) sesuai jam mengajar.
i. Kajian utama adalah Fiqh dan Ushul Fiqh, dan kajian pendukung adalah Nahwu-Sharaf (gramatika Bahasa Arab), Tauhid, Hadits-Ilmu Hadits, Tafsir dan 'Ulumul Qu'ran, Akhlak-Tasawuf, Ilmu Falak serta Balaghah dan Mantiq.

2. Pondok Pesantren Nurussalam

a. Tidak ada tuntunan khusus bagi pesantren dalam menentukan kurikulum, namun diserahkan pada kebijakan dan kepentingan santri menurut pertimbangan pimpinan pesantren dan para pengajar.
b. Tujuan pendidikan disesuaikan dengan kitab-kitab yang dikaji, pendidikan di pesantren berjalan tanpa perencanaan tertulis, namun perencanaan pembelajaran lebih berdasarkan pada instuisi.
c. Melakukan pembenahan manajemen diperlukan dana yang tidak sedikit baik untuk pelatihan sumber daya manusianya, maupun untuk keperluan peralatan administrasinya.
d. Pesantren tidak mengabaikan keduniawian, sebagai bagian penting dalam kehidupan. Namun, karena masalah *ibadah kifayah* yang berhubungan dengan keduniaan sudah ada institusi yang menggarapnya, maka pesantren belum merasa sangat mendesak untuk hal-hal tersebut.
e. Pesantren belum disangkutpautkan dengan dunia kerja, padahal sangat dipahami bahwa perlu antisipasi atas terjadinya perubahan paradigma masyarakat terhadap pendidikan akibat perkembangan zaman memang diperlukan dalam menyusun kurikulum yang tujuannya untuk kepentingan pesantren sendiri.
f. Kajian keagamaan yang menjadi pusat pembelajaran di pesantren ini, antara lain; Tauhid, Fiqh/Ushul Fiqh, Hadits, Al-Qur’an/Tafsir, dan Akhlak.

3. Pondok Pesantren Tarbiyatul Furqan

a. Pendidikan di pesantren berjalan tanpa perencanaan tertulis, namun perencanaan pembelajaran lebih berdasarkan pada instuisi. Otoritas Pemimpin pesantren cukup tinggi dalam menentukan arah pendidikan;
b. Sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaan pendidikan tidak terdokumentasikan, sehingga tidak cukup mudah untuk meneliti dokumen pesantren.
c. Tujuan pendidikan di pesantren adalah untuk membentuk kader-kader masyarakat yang shalih.
d. Kegunaan manajemen kurikulum dapat dipahami, karena sesuai dengan motto pesantren, memelihara tradisi dan pengalaman lama yang baik dan mengambil konsep dan strategi baru yang lebih baik; namun diakui belum ada tenaga ahli yang mau terjun ke pesantren,
e. Rekonstruksi kurikulum belum dikatagorikan sesuatu yang mendesak, karena materi keislaman yang terkandung dalam kitab kuning dirasa masih sangat relevan dengan situasi peribadatan saat ini.
f. Di pesantren Tarbiyatul Furqan, honorarium para ustadz adalah 100 kaleng padi pertahun. Namun nilai 100 kaleng padi sering dikonversi menjadi dana tunai yang nilainya fluktuatif sesuai harga pasar padi; sehingga umumnya setiap ustadz menerima honor berkisar antara Rp. 65.000,- sampai Rp. 70.000,- perbulan.
g. Kajian keagamaan adalah Fiqh-Ushul Fiqh, Lughat al'Arabiyah, Akhlak-Tasawuf, Tauhid, `Ulumul Quran dan Tafsir, serta Hadits/Ilmu Hadist.

C. Temuan Penelitian

Untuk memperoleh informasi dalam penelitian ini, di tiga Pondok Pesantren Salafiyah Penyelenggara Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun terdapat: 10 orang ustazd senior, 73 orang ustadz. Pada pendidikan santri muda; khususnya di Pesantren Al-Amin yang memiliki santri tingkat Ula, maka santrinya (yang berusia antara 6 atau 7 tahun) arah pembelajarannya lebih ditekankan pada hapalan, peniruan, dan pembiasaan melalui hal-hal yang dapat dicerna oleh pancaindera. Menurut hasil wawancara dengan para ustadz, bahwa anak seusia tersebut masih memiliki daya hapal dan daya ingat yang kuat, mengingat apa yang dialaminya, tapi kemampuan memahami makna masih lemah. Akan tetapi, sekalipun mereka belum atau tidak mengerti apa yang dihafalkannya itu, seiring dengan bertambahnya usia maka kemampuan memahami mereka akan bertambah. Pada usia 7 atau 8 tahun sampai dengan 11 atau 12 tahun, santri mulai belajar dengan menggunakan kitab-kuning tingkat dasar, tidak jauh berbeda di setiap pesantren materi pelajaran yang diajarkan: fiqh dengan kitab standar *Fath al-Qarib, Fath al-Mu'in* atau *I'anat al-Thalibin*, tauhid dengan kitab standar *Kifayat al-'Awam* dan *Al-Hud hudy*, tasawuf dan akhlak dengan kitab standar *Ta'lim al-Muta'alim* atau *Risalah al-Mu'awanah*, dan nahwu-sharaf (gramatika Bahasa `Arab) dengan kitab standar *Lughat al-Takhatib, Ta'lim al-Lughat al-'Arabiyah* dan *Qatru al-Nida*.

Temuan penelitian merupakan ringkasan hasil temuan melalui wawancara, studi dokumentasi dan observasi yang dilakukan di tiga pesantren tempat penelitian dilaksanakan.

1. Kurikulum yang berlaku di pesantren

Komponen kurikulum seperti dikemukakan pada Bab II seyogyanya dimulai dengan merumuskan tujuan pendidikan, menentukan materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan evaluasi.

Secara formal di ketiga pesantren tidak ditemukan tujuan pendidikan secara tertulis dan terdokumentasikan, namun secara konkrit di lapangan diperoleh petunjuk tujuan pendidikan secara instruksional. Misalnya anak usia *tamyiz* (taraf mengerti) harus sudah diajari melaksanakan wudhu dengan baik, mulai belajar baca tulis Al-Quran, menghafal surat-surat pendek atau surat-surat *Juz 'Ama* dengan tartil (ada yang sekaligus dengan mempelajari ilmu tajwid dan ada pula tanpa belajar tajwid), kaidah-kaidah akhlak dan do'a-do'a harian. Anak usia 7 sampai 10 tahun yang sudah *khatam* Al-Quran diberi hafalan do'a-doa sholat dan wirid setelah sholat fardlu, tujuannya pada usia 10 tahun mampu melaksanakan sholat dengan baik dan benar baik *berjamaah* maupun *munfarid* dengan segala syarat dan rukunnya. Hal ini setidaknya sebagai sarana mempraktikan ajaran Rasulullah SAW, seperti hadits[165]:

حدثنا محمد بن عيسى يعني ابن الطبَّاع ثنا إبراهيم بن سعد، عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "مروا الصَّبيَّ بالصَّلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها" (رواه أبو داود) .

[165] Al- ‘Usaimin, Muhammad bin Shalih, *Syarhu Riyadhish- Shalihin Min Kalami Sayyidil Mursalin*, (Riyadh: Madarul Wathan, 1426 H) jilid : III, hal. 173. Lihat: Sunan Abu Daud, *Hadits ke 494*, http://www.islamspirit.com/ di akses tanggal 15 Desember 2012

Artinya : *Suruhlah anak-anakmu untuk shalat ketika mereka telah berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka apabila mereka malas atau meremehkan shalat ketika mereka telah berumur sepuluh tahun, serta pisahkanlah di antara mereka di tempat tidur*.

Hadits tersebut menunjukkan bagaimana seharusnya seseorang mengajarkan, membimbing dan mengarahkan dengan tegas kepada seorang anak di usia tertentu untuk memperhatikan shalat. Dalam hadits yang lain disebutkan pula:

حدثنا سليمان بن داود المهري، ثنا ابن وهب، أخبرنا هشام بن سعد حدثني معاذ بن عبد اللّه بن حبيب الجهنيّ قال: دخلنا عليه فقال لامرأته: متى يصلّي الصَّبيُّ؟ فقالت: كان رجل منا يذكر عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ذلك فقال: "إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصَّلاة"[166].

Rasulullah bahkan menjelaskan bahwa jika seorang anak dapat mengerti dan membedakan antara kanan dan kiri, maka anak itu sudah saatnya disuruh melaksanakan shalat.

Menurut hasil observasi dan wawancara, metode yang digunakan adalah wetonan; cara penyampaian materi ajar/kitab yaitu ustadz membacakan dan menjelaskan isi bahan ajar/kitab tersebut, sementara santri mendengarkan, memaknai dan menerima. Namun dalam beberapa kesempatan; karena sesuatu

[166] *Ibid*, Lihat: Sunan Abu Daud, *Hadits ke 497*, http://www.islamspirit.com/ di akses tanggal 15 Desember 2012

dan lain hal, digunakan pula metode sorogan; seorang atau beberapa santri datang kepada ustadz dengan kitab yang dikajinya. Ustadz membaca berulang-ulang dan diikuti oleh santri seorang demi seorang sampai hafal. Lalu ustadz memberi penjelasan dan contoh-contoh. Selanjutnya diikuti dengan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab berdasarkan materi yang dikajinya. Setiap ustadz paling banyak mengasuh 5 orang santri. Dalam beberapa kesempatan ustadz dapat mempercayakan pembelajaran kepada *santri* yang dipilih dari para santri senior, sebagai upaya latihan bagi para santri senior namun tetap dibawah pengawasan ustadz yang bersangkutan. Menurut Ustadz Baidawi metode ini diberikan kepada mereka yang baru belajar kitab kuning[167]; namun metode ini dirasa cukup efektif karena dengan cara ini pengajaran maupun pelimpahan nilai-nilai sebagai "*delivery culture*" berlangsung dengan cukup intensif.

Namun menurut Ustadz Husni, H. Ladi Nawidi dan Ustadz M. Yusran, bahwa santri yang belajar kitab kuning usia tingkat Wustha lebih efektif digunakan metode ceramah, *muhadatsah* dan diskusi, yang dilaksanakan secara klasikal dalam kelompok yang kecil agar lebih efektif[168]. Untuk santri usia 11 atau 12 tahun sampai usia 14 atau 15 tahun kitab-kitab standar **fiqh** yang digunakan adalah kitab *Fathul Qarib, Kifayatu A1 Akhyar, Bulughul Maram, Subulu As-Salam, Matan Fath al-Mu'in* dan **tauhid-akhlaktasawuf** dengan kitab standar *Kifayatu Al-Awam, Nashaihu Al-Ibad, Syu'ubul Iman, Minhaju A1-Abidin,* dan *Thaharatu Al-Qulub,* dan **nahwu-sharaf** dengan kitab *Nazmu Aj-Jurumiyah* dan

[167] Baidawi, HMA, *Pimp. PPS Al-Amin*, Wawancara pribadi, Desa Beringin: Tanggal 12 Mei 2012

[168] Ustadz Husni dkk, *ustadz PPS Tarbiyatul Furqan, Nurussalam dan Al-Amin*, Wawancara: Tanggal 12, 19 dan 26 Mei 2012

Nazmu Maksud. Di Pesantren Al-Amin dan Tarbiyatul Furqan kitab *Nazmu Aj-Jurumiyah* dan *Nazmu Maksud* kitab dasar *nahwu* dan *sharaf* yang disusun dalam bentuk *nazm* (*syiiran*) harus hafal di luar kepala. Pada pesantren Al-Amin malah pernah di-*mushabaqah*-kan khususnya menjelang seleksi peserta Musabaqah Qira'atul Kutub tingkat kabupaten. **Tafsir Al-Qur'an** mulai diajarkan di tingkat ini kitab *Tafsir Jalalayn*, **Al-Hadits** pun mulai di ajarkan dengan kitab standar *Mukhtaru Al-Hadits* dan *Riyad Ash-Sholihin*. Di Pesantren Al-Amin dan Tarbiyatul Furqan yang memiliki santri tingkat 'Ulya diajarkan *fiqh mu'amalat* tentang perekonomian termasuk perdagangan, *fiqh munakahat* tentang pernikahan, *fiqh jinayat* tentang hukum, *fiqh faraidl* tentang waris, dan *fiqh syiyasah* tentang politik kenegaraan.

Sebelum mendapat kepercayaan sebagai PPS Penyelenggara Wajar Dikdas 9 Tahun, evaluasi pembelajaran umumnya masih menggunakan evaluasi lisan dengan tanya jawab sebelum dan sesudah proses belajar mengajar (PBM), ustadz atau santri senior menilai jawaban santri tersebut secara kumulatif dan tidak tertulis, tapi hanya dalam ingatan ustadz atau santri senior. Setelah tamat menyelesaikan pengajian sebuah kitab, santri diizinkan atau tidak untuk melanjutkan kepada pengajian kitab selanjutnya yang uraiannya lebih kompleks; sehingga terkesan tidak ada kenaikan kelas secara resmi. Namun seiring perkembangan sistim pembelajaran, terlebih setelah diakui sebagai PPS Penyelenggara Wajar Dikdas 9 Tahun; maka evaluasi pembelajaran sudah menggunakan ulangan tertulis dan perkembangan belajar mengajar didokumentasikan dalam buku rapot.

Di Pesantren Nurussalam, selain dikembangkan pendidikan keterampilan pertanian dan perkebunan, pesantren ini secara khusus diberi kepercayaan untuk memelihara sapi oleh Dinas Peternakan kabupaten. Di Pesantren Al-Amin dikembangkan peternakan ikan air tawar; sudah lebih dari 5 tahun terakhir hasilnya dipasarkan bahkan sampai ke pelosok Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur dengan mobil *pick-up* milik yayasan. Seperti dikatakan Junaidi; orang kepercayaan pesantren untuk memasarkan, *"kami tulak sampai ka Teweh, ka Samarinda…maantari iwak patin, malaran gasan manambah biaya pondok"* ("Kami menjual patin, bahkan sampai ke Muara Teweh (Kalteng) dan ke Samarinda (Kaltim), lumayan untuk menambah pendanaan pesantren")[169]

Untuk olah raga, dalam kondisi sederhana, disiapkan lapangan bola voli, lapangan badminton dan sarana tenis meja. Kendala yang paling menonjol dalam masalah keterampilan tersebut para santri beraktivitas seadanya tanpa bimbingan khusus, sehingga misalnya dalam masalah olahraga mereka lebih mengandalkan bakat alam tanpa polesan seorang pelatih. Karena ketiadaan tenaga ahli inilah sehingga dalam prestasi olahraga misalnya, beberapa santri yang cukup potensial kalah bersaing dalam kegiatan pekan olahraga santri, hanya karena kekurangtahuan tentang aturan dan tatatertib permainan. Sehingga, menurut Ustadz Baidawi[170]: "*Jaka kawa, pamarintah tu mandatangakan guru negeri gasan kami-kami, guru olahragakah atau guru umum nang lain kah…."* (Kalau bisa, oleh pemerintah, tolong carikan guru PNS untuk pesantren, apakah guru olahraga atau guru bidang studi yang lain").

[169] Junaidi (*Pelaksana Ketatausahaan PPS Al-Amin*), Desa Beringin: Wawancara tgl 17 Mei 2012
[170] Baidawi, HMA, *Pimp. PPS Al-Amin*, Wawancara pribadi, Desa Beringin: Tanggal 12 Mei 2012

Penggunaan kitab-kitab klasik sebagai kitab standar tidak selamanya sama, walaupun ada beberapa kitab yang digunakan sama[171]. Dari hasil pengamatan dan wawancara, di setiap pesantren ada kitab-kitab tambahan yang digunakan dan ini sangat tergantung pada ustadz yang mengajar, umumnya para ustadz mengikuti bahan ajar atau kitab yang digunakan oleh pesantren tempat mereka dahulu pernah belajar. H. Ladi Nawidi berpendapat; "kami merasa lebih mudah mengajarkan kitab yang sudah sering kami pelajari dulu"[172].

Dari hasil pengamatan dan wawancara, para ustadz memulai dengan menentukan materi ajar dan kitab rujukan yang akan digunakan, artinya pada periode tertentu hanya dipelajari satu kitab untuk satu materi ajar tertentu. Penggunaan kitab-kitab kuning yang tadinya sebagai kitab rujukan akhirnya menjadi tujuan pendidikan. Selesai menempuh pendidikan pada tingkat satuan pendidikan tertentu, santri harus memahami kitab-kitab standar tersebut yang berarti memahami *materi* yang dikajinya.

Kitab yang digunakan harus jelas riwayatnya (berkesinambungan), dari mulai pengarang sampai guru dan arah silsilah kependidikannya. Hasil wawancara dengan para ustadz, santri pemula tidak diperkenankan asal baca kitab tapi harus kitab yang dirujuk oleh ustadz berdasarkan hasil musyawarah pesantren. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan kemungkinan berkembangnya pemahaman yang berbeda, terutama dalam ilmu *fiqh* dan *tauhid*; karena santri pemula dikhawatirkan belum siap menerima perbedaan sehingga bisa menyesatkannya.

[171] Daftar kitab (terlampir)
[172] Ladi Nawidi, *Ustadz PPS Nurussalam*, Wawancara pribadi, Tinggiran: Tanggal 19 Mei 2012

Sementara untuk santri senior diperbolehkan malah diharuskan sebagai penambah wacana dan wawasan, dengan tetap dibawah asuhan para ustadz.

Pada waktu-waktu tertentu diadakan studi *ziarah* ke makam-makam *Waliyullah* atau orang yang telah berjasa dalam menyebarkan agama. Ziarah ke makam para pendiri dan penerus pesantren yang sudah wafat dilaksanakan paling tidak setahun sekali. Tujuannya untuk lebih mengenal, mengenang dan menghargai sejarah para penyebar agama Islam, yang *side efect*-nya terhadap santri ada keinginan untuk berlaku dan bersikap seperti beliau. Study wisata (ziarah) menurut Ustadz Husni[173]: *"Mudahan kawa mamantapakan jiwa kita, balatih sabar, baisi pengalaman badapat urang banyak, salajur malihat bamacam-macam kakuasaan Allah Ta'ala"*, (Memiliki dampak besar dalam rangka menyempurnakan jiwa manusia, melatih kesabaran, memperoleh pengalaman karena bertemu dengan berbagai jenis manusia, dapat menyaksikan aneka ragam ciptaan Allah swt). Ustadz Ajidan Thalib[174], menambahkan; *"Dengan ziarah ni, mudahan kita tatap ingat mati, mangganang jasa almarhum dan bahimat mudahan kawa manuruti kashalihan sidin"*, ("ziarah kubur selain dapat mengingatkan akan akhirat, juga mengenang atas jasa jasa almarhum dan bertekad untuk dapat mengikuti jejak beliau sebagai orang shalih." Hal ini sejalan dengan hadits Rasulullah; bahwa para ulama adalah pewaris para nabi, sehingga menghormati, mengenang jasa, serta meniru sikap dan akhlaq para ulama diharapkan dapat membentuk watak dan kepribadian santri

[173] M. Husni, *Ustadz PPS Tarbiyatul Furqan*, Wawancara pribadi, Tanjung Harapan: Tanggal 26 Mei 2012

[174] Ajidan Thalib, *Pimp.PPS Nurussalam*, Wawancara pribadi, Tinggiran: Tanggal 19 Mei 2012

وإنّ العلماء ورثة الأنبياء (رواه أبو داود والتّرمذيّ)[175].

Artinya : *Dan sesungguhnya ulama adalah para pewaris Nabi-nabi*.

Dijelaskan bahwa para ulama adalah pewaris para nabi, sehingga menghormati, mengenang jasa, serta meniru sikap dan akhlaq para ulama diharapkan dapat membentuk watak dan kepribadian santri. Adapula hadits lain tentang keutamaan para ulama:

العلماء أمناء الرّسل (رواه العقيليّ عن أنس)[176]

Artinya : *Ulama adalah orang-orang kepercayaan para Rasul*.

Sekalipun tidak tertulis, secara umum tujuan pendidikan di pesantren adalah untuk mencetak kader 'ulama dan pemimpin Islam yang shalih. Oleh H. Ladi Nawidi; ditambahkan bahwa tujuan pendidikan pesantren adalah membentuk manusia beriman, bertaqwa, mampu hidup dengan kekuatan sendiri[177]. Motivasi pendidikan di pesantren, menurut masyarakat dan sebagian ustadz; terjadi sejak awal berdirinya pesantren yang mandiri, bebas dan tidak ada campur tangan pemerintah sehingga tidak mengenal istilah kurikulum. Hasil wawancara dan pengamatan; dari awal di pesantren tidak mengenal adanya silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Tidak ada tuntunan khusus bagi pesantren dalam menentukan kurikulum, namun diserahkan pada kebijakan dan kepentingan santri menurut pertimbangan pimpinan pesantren dan para pengajar. Kesepakatan awal hanya pada kitab apa yang akan dikajinya sesuai dengan tingkatan satuan

[175] Al- Khin, Mushthafa Sa'id, dkk, *Nuzhatul Muttaqin Syarhu Riyadhish- Shalihin Min Kalami Sayyidil Mursalin*, (Bairut : Muassasah Ar- Risalah, 1407 H) jilid : II, hal. 955-956.

[176] Bik, Ahmad Al- Hasyimi, *Mukhtarul Ahadis An-Nabawiyyah Wal Hikam Al-Muhammadiyyah*, (Surabaya : Syirkah Bungkul Indah, Ttp), hal. 115-116.

[177] Ladi Nawidi, *Ustadz PPS Nurussalam*, Wawancara pribadi, Tinggiran: Tanggal 19 Mei 2012

pendidikan pesantren dan penggunaan kitab dimaksud sebagian tertulis dan didokumentasikan.

Evaluasi kurikulum tidak pernah dilakukan. Menurut ustadz, alumni, santri dan masyarakat setempat pendidikan di pesantren lebih cenderung pada nilai kepercayaan masyarakat pada sistem dan dominanasi kharisma pendiri pesantren dan para ustadznya. Seorang tokoh masyarakat dan sekaligus orangtua alumni; Bapak HM. Said[178], menyatakan: *"Mun nya pasantren pina banyak muridnya, ba-arti cocok lawan masyarakat, lawan gaguruannya pina patut aja, tapi bila kada…ngalih bacari murid"*, ("Apabila pesantren banyak santrinya, berarti sistem pendidikan cocok dengan kehendak masyarakat dan kharisma kyainya dapat diterima, apabila tidak masyarakat akan meninggalkannya").

Hasil pengamatan dan wawancara dengan alumni dan masyarakat setempat, pada tiga pesantren tersebut jumlah santrinya cenderung bertambah; sekalipun peningkatannya dalam jumlah yang tidak sangat banyak. Menurut masyarakat setempat dan juga menurut keluarga pesantren, perjalanan pendidikan pesantren disamping terbentuk karena sosok pendiri pesantren dan/atau para ustadz, juga dipengaruhi oleh kesinambungan generasi penerus pengelola pesantren; khususnya dari kalangan keluarga pendiri pesantren atau keluarga para ustadz.

Menurut hasil pengamatan tentang metodologi pembelajaran, urutan pembelajaran pun berdasarkan pada fasal-fasal yang ada pada kitab tersebut. Kitab dimaksud sekaligus sebagai rujukan dan silabus sehingga pedoman proses belajar-mengajar mengacu pada kitab-kitab yang dikaji. Dalam pembelajaran, para

[178] HM. Said, *Ustadz PPS Al-Amin*, Wawancara pribadi, Desa Beringin: Tanggal 17 Mei 2012

ustadz, walaupun merujuk pada satu kitab kajian dalam menjelaskan bahasan kajiannya, dalam prakteknya sering pula menggunakan pula kitab-kitab lain yang sejenis, baik yang setara maupun yang lebih luas bahasannya; sebagai pelengkap.

Dalam hal waktu pembelajaran, karena ketiga pesantren yang diteliti adalah PPS Wajar Dikdas 9 Tahun; maka di pesantren tersebut dilaksanakan pula pembelajaran mata pelajaran umum, yaitu: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Pada dua PPS (Al-Amin dan Nurussalam) pembelajaran keagamaan atau pengajian kitab dilakukan pada pagi hari (08.00 s.d 12.30) dan mata pelajaran umum mengambil waktu siang hari (13.30 s.d 17.00 diselingi shalat Ashar berjamaah). Di PPS Al-Amin, memberlakukan hari libur pada hari Jum'at dan pemberian mata pelajaran umum tersebut dilakukan pada hari-hari tertentu di siang hari (antara pukul 13.30 sampai 15.00 dan pukul 16.00 sampai 17.30). Mata pelajaran Bahasa Indonesia dan PKn pada hari Senin, IPS dan Matematika setiap hari Rabu; sedangkan IPA dan Bahasa Inggris pada hari Sabtu. Sedangkan di PPS Tarbiyatul Furqan pelajaran pengajian kitab dan mata pelajaran umum dilaksanakan berselang-seling; sehingga mata pelajaran umum diberikan pula pada waktu pagi hari sesuai putaran waktu yang disusun[179].

Dalam hal materi ajar pada mata pelajaran umum, pihak pengajar di pesantren tidak mendapat kesulitan, karena mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pelajaran (SKL-SP), Standar Kompetensi Kelompok Mata Pelajaran (SK-MP) dan Standar

[179] Studi Dokumentasi, Sabtu, 12, 19 dan 26 Mei 2012

Kompetensi Lulusan Mata Pelajaran (SKL-MP) yang terangkum dalam Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Umum Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah.

Secara umum, hasil wawancara dengan para pemimpin pesantren dan para ustadz diperoleh beberapa pendapat diantaranya sistem pendidikan pesantren masih memiliki kelemahan dan kelebihan tersendiri. Kelemahan yang menonjol tidak adanya kurikulum yang tertulis karena tidak pernah dibuat sehingga sulit mengukur standar yang dikehendaki dalam kurun waktu tertentu. Menurut Ustadz Baidawi[180]: *"Pandangarku urang di pusat gin pina ngalih maulah standar, kurikulum bilang baganti-ganti saban tahun, buku-bukunya tapaksa baganti jua.."* ("Secara nasionalpun Negara kita belum memiliki standar, buktinya kurikulum gonta-ganti tiap tahun, otomatis diganti pula buku pagangannya"), pernyataan ini dibenarkan pula oleh H. Ladi Nawidi dan Ustadz H. Khairul Bahri. Bahkan Ustadz Husni menambahkan[181]: *"Kalo di pesantren ni, kitabnya ngitu-ngitu aja, paling-paling batambah mangaji kitab nang lain gasan manambah pamahaman"* ("Di pesantren tidak pernah ganti kitab, yang ada penambahan kitab pegangan untuk menambah wawasan"). Kelebihan pendidikan pesantren lainnya, ditambahkan oleh ustadz Muhammad Fauzi, yaitu adanya hubungan guru dan murid yang akrab terbatas, artinya hubungan guru dengan murid dekat tapi nilai-nilai ke-*tawadlu*-an masih tetap dipetahankan. Menurut santri senior, orang tua dan alumni, pesantren sampai saat ini masih merupakan benteng akhlak, layanan

[180] Baidawi. HMA, *Pimp. PPS Al-Amin*, Wawancara pribadi, Desa Beringin: Tanggal Wawancara: 12 dan 19 Mei 2012

[181] M. Husni, *Ustadz PPS Tarbiyatul Furqan*, Wawancara pribadi, Tanjung Harapan: Tanggal 26 Mei 2012

pendidikan berjalan selama 24 jam. Kelebihan lain hasil pengamatan penulis, di pesantren menganut sistem pembelajaran tuntas. Santri tidak akan bisa "pindah kitab" ketika menurut kyai belum menguasai penuh kitab yang dikajinya.

Dalam kaitan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara, misalnya kiprah pesantren dalam bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan lingkungan hidup; beberapa kyai dan para ustadz berpendapat bahwa; pesantren adalah lembaga pendidikan sekaligus lembaga dakwah yang populis, sehingga dapat menjadi potensi yang besar bagi pemerintah untuk mengajak pesantren dalam upaya mengembangkan program-program kerakyatan. Ustadz Ajidan Thalib menyatakan[182]; *"Sabagusnya pasantren harus siap pang bila ada masukan dari luar, pasantren kan disambat urang lembaga dakwah; jadi kada kawa tatutup banar"* ("Pesantren sendiri harus mulai membuka diri terhadap masukan dari luar. Sebagai lembaga dakwah pesantren tidak bisa menutup diri"). Namun demikian Ustadz Bakhran berharap bahwaPemerintah tidak mendekati pesantren hanya ketika ada masalah yang mendesak atau ketika ada maunya tapi tidak mendengar keluhan-keluhan pesantren. Ajak pesantren bicara. Sehingga pesantren tahu apa harapan pemerintah sehingga dapat bersinergi bersama. Optimisme warga pesantren ini dikuatkan pula oleh komentar Ustadz Baidawi[183]; *"Pangajian di pasantren tu urusan pendidikan wan sakaligus da'wah, maka bila da'wah harus pas lawan macam-macam nang ada di masyarakat"* ("Kurikulum pesantren adalah kurikulum pendidikan dan dakwah, kurikulum dakwah harus menyentuh berbagai aspek kehidupan"). Seorang pemimpin pesantren mengatakan bahwa

[182] Ajidan Thalib, *Pimp.PPS Nurussalam*, Wawancara pribadi, Tinggiran: Tanggal 19 Mei 2012
[183] Baidawi. HMA, *Pimp. PPS Al-Amin*, Wawancara pribadi, Desa Beringin: Tanggal 12 Mei 2012

ketika pesantren mensinyalir nilai-nilai budaya bangsa sudah terkikis, dekadensi moral terjadi di mana-mana dalam segala usia, disintegrasi bangsa sudah di depan mata. Pesantren tidak pernah di dengar suaranya, malah dicurigai anti Pancasila, ingin mendirikan negara Islam, para santri dicurigai sebagai teroris. Bahkan ada wacana tentang sertifikasi ulama, walau masih kontroversi karena muncul berbagai keberatan.

2. Kesesuaian kurikulum dengan kepentingan santri, harapan masyarakat dan stakeholder, dan kualitas hasil didik yang dihasilkan.

Akan halnya di pesantren tidak terdapat aturan kurikulum tertulis, dalam pengamatan penulis dan wawancara dengan para ustadz, maka dalam melaksanakan proses belajar mengajar berpedoman pada kitab-kitab rujukan yang ditentukan Dewan Pengajar (istilah yang digunakan penulis dalam karya tulis ini untuk menunjuk sekelompok orang yang bertanggungjawab dan mengurusi masalah pembelajaran di pesantren; meliputi Pemimpin pesantren, ustadz dan santri senior) baik yang standar maupun non standar. Untuk kitab-kitab non standar, menurut para santri, sebelum digunakan lebih dahulu dirembugkan dengan santri yang akan ikut mengaji kitab tersebut.

Materi pengajaran lebih diarahkan pada pendidikan keagamaan seperti: *Qira'at dan Ilmu Tajwid, Fiqh-Usul Fiqh, Hadits-`Ulum al-Hadits, Tafsir-`Ulumu al-Tafsir, Akhlaq-Tasawuf, Nahwu-Sharaf, Balaghah, Manthiq, Tarikh, Tarikh Tasyri* dan ilmu-ilmu lainnya sebagai pendukung seperti ilmu *Falaq.* Santri hanya belajar kitab rujukan yang disodorkan Dewan Pengajar, tidak pada referensi lain. Pengawasan dan bimbingan pun sebatas penggunaan kitab-kitab

standar dan non standar yang jelas jaringan silsilah dan sanad yang musalsal (berkesinambungan). Kitab-kitab yang tidak jadi rujukan, sebagian besar berada di rumah dan merupakan koleksi pemimpin pesantren. Kebanyakan pesantren belum memiliki perpustakaan mandiri yang mencukupi kebutuhan studi santrinya, dan santri pun merasa cukup dengan rujukan yang ada yang disodorkan dewan pengajar.

Beberapa orang tua yang diwawancarai tentang harapan dan pengawasan terhadap anaknya yang *nyantri*, jawabannya bahwa pesantren-pesantren sudah memiliki kitab-kitab rujukan tertentu yang akan dikajinya sesuai dengan tujuan para puteranya dikirim ke pesantren tersebut. Adapun bimbingan dan pengawasan pendidikan puteranya sudah seratus persen diserahkan pada pesantren dan pemimpin pesantren. Jadi, kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan pesantren sudah cukup tinggi. Namun agar mendapat informasi berimbang, penulis sempat mewawancarai para orang tua yang tidak berkenan mengirimkan puteranya ke pesantren jawabannya karena pesantren tidak mengeluarkan ijazah, dan kurangnya pengetahuan yang umum sebagai penunjang kerja untuk bekal hidup masa yang akan datang. Ada yang menyatakan bahwa kehidupan di pesantren kurang memperhatikan lingkungan dan kesehatan, tapi walau demikian sebagian masyarakat sekitar pesantren tetap mengirimkan puteranya untuk belajar mengaji Al-Qur'an atau mengikuti majlis taklim.

Menurut masyarakat dan alumni yang sempat ditemui dalam penelitian ini, alumni pesantren banyak yang memiliki kemampuan di atas rata-rata yang diperlukan oleh masyarakat setempat. Ini karena ditopang oleh kesiapan mereka terjun ke

masyarakat, mengingat selama di pesantren interaksi santri dan masyarakat sudah terbina. Tidak sedikit mereka diminta masyarakat untuk jadi pemimpin formal atau nonformal. Kalau pada waktu sebelumnya, harapan dan permintaan masyarakat terkendala karena alumni pesantren tidak memiliki ijazah formal maka ketika diminta untuk menjadi pimpinan formal, misalnya kepala desa atau bahkan bakal calon anggota legislatif, biasanya terbentur masalah ijazah. Namun setelah pemerintah membuat kebijakan berupa Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun, yang selanjutnya diperluas dengan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah (PPS), berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama RI, No. 1/U/KB/2000 dan No. MA/86/2000 tentang Pondok Pesantren Salafiyah Sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, maka pondok pesantren salafiyah berhak mengikuti Ujian Nasional dan karenanya berhak pula mendapat ijazah Wustha setingkat SMP atau Madrasah Tsanawiyah.

Pendapat sebagian santri yang ditemui di tiga pesantren hampir senada, bahwa mereka datang ke pesantren untuk mencari ilmu agama dalam rangka menegakkan *kalimah* Allah sedangkan urusan rezeki sudah diatur oleh-Nya. Sebagian lain menambahkan bahwa mereka datang di pesantren tidak hanya datang untuk mengaji tapi mereka juga siap mengerjakan apa saja yang ada urusannya dengan kepentingan pesantren.

Orang tua yang sempat ditemui; dalam kondisi saat ini mengharapkan selain belajar keagamaan sebaiknya di pesantren diajarkan pula keterampilan yang akan

bermanfaat bagi santri sepulangnya ke kampung. Ditambahkan oleh salahsatu dari mereka, M. Syarif (orangtua dari Amrina Rosada santriwati Pesantren Al-Amin): bahwa sekalipun bukan untuk kepentingan.mencari kerja, keterampilan itu diperlukan karena lulusan pesantren sering juga diminta pendapat, pemikiran dan peranan tidak hanya pada masalah keagamaan tapi juga dalam persoalan lain. Oleh karenanya, sebaiknya pesantren membuka cakrawala ilmu pengetahuan umum walau terbatas[184].

Pendapat para orang tua dan masyarakat lainnya ketika disodorkan pertanyaan tentang kesesuaian pendidikan pesantren dengan kebutuhan masyarakat diwaktu yang akan datang, jawabannya cukup variatif. Sebagian besar menyatakan bahwa kebutuhan masyarakat diwaktu yang akan datang akan lebih mengarah kepada kebutuhan rohani, ini akan sangat dimungkinkan bisa diimbangi oleh kemampuan para alumni pesantren. Sebagian lagi menyatakan kemampuan alumnus pesantren semestinya ditingkatkan dengan pengetahuan lainnya, sebab walaupun kebutuhan masyarakat menyangkut masalah kebutuhan rohani, tapi kondisinya sudah sangat berbeda. Sebagian bertahan bahwa pesantren tetap harus mengusahakan membuka pendidikan keterampilan, karena tidak semua lulusan pesantren menjadi alumni yang cuma berkiprah dalam bidang spiritual.

Ketika hal ini dikonfirmasikan kepada para pemimpin pesantren dan ustadz, mereka menyatakan bahwa tidak cukup mudah untuk merekrut tenaga ahli yang khusus untuk pendidikan keterampilan yang bersedia mengabdi di pesantren dengan sistem pembelajaran dan pola penggajian yang khas pesantren. Menurut

[184] M. Syarif, o*rangtua santriwati PPS Al-Amin*, Wawancara pribadi, Desa Beringin: 18 Juli 2012

mereka, sekalipun sebagai pesantren penyelenggara Wajar Dikdas yang mendapat dana pembiayaan melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dana tersebut sebagian besar diperuntukkan untuk membayar honorarium para guru yang direkrut dari sekolah/madrasah lain untuk mengajarkan mata pelajaran umum yang wajib diajarkan di PPS.

Namun demikian, sekalipun pesantren tidak bisa mendatangkan para ahli atau praktisi dibidang keterampilan; namun dalam kesederhanaan, secara tidak langsung pesantren melakukan pembinaan keterampilan melalui pembiasaan, seperti ketika musim penggarapan sawah baik dari mulai pembersihan lahan sampai panen para santri sering dilibatkan. Begitu pula dengan kegiatan lainnya, misalnya di Pesantren Al-Amin para santri terlibat dengan kegiatan penambakan ikan patin. Di Pesantren Nurussalam, santri terlibat dalam bidang pertanian dan penggemukan sapi. Di Pesantren Tarbiyatul Furqan, kegiatan-kegiatan tersebut tidak kelihatan kecuali beberapa santri membantu pekerjaan rutin pemimpin pesantren atau ustadz. Pendidikan keterampilan di pesantren lebih pada implementasi di lapangan.

Sebagian alumni menyatakan merasa beruntung pernah jadi santri yang merasakan pribadinya ditempa dalam menghadapi "gemblengan" selama *nyantri*. Di pesantren dilatih untuk hidup mandiri tidak tergantung pada orang lain sehingga segala sesuatunya harus dilaksanakan sendiri dan mandiri. Kebersamaan antar santri terasa akrab dan pergaulan ini memudahkan hubungan selanjutnya. Pelajaran-pelajaran tambahan yang diperoleh, yang lebih pada tataran praktek di lapangan seperti bertani, beternak, dan mengurus koperasi, merupakan modal

yang cocok bagi pekerjaan maupun kehidupannya; merupakan nilai plus yang tidak diperoleh orang lain yang tidak pernah nyantri. Beberapa kesulitan yang dikemukakan oleh sebagian alumni, bahwa setelah tamat dari pesantren tidak memiliki kesempatan meneruskan pendidikan yang lebih tinggi. Namun demikian, sebagian besar mereka melakukan kegiatan yang bermanfaat positif sesuai dengan kemampuan.

Permasalahan kitab-kitab kuning yang dikaji; menurut hasil pengamatan dan wawancara dengan berbagai pihak, lebih banyak masalah 'ubudiyah rubbubiyah atau ibadah makhdlah termasuk di dalamnya munakahat, had, dan mawarits; namun tetap pula menyentuh masalah 'ubudiyah mu'amalah. Menurut beberapa pemimpin pesantren, masalah 'ubudiyah rubbubiyah atau ibadah makhdlah itulah yang sering muncul di masyarakat, daripada masalah 'ubudiyah mu'amalah, misalnya bidang tarikh (sejarah), perekonomian, syiyasah atau kenegaraan. Bidang-bidang ini sebenarnya dikaji dalam wilayah fiqh yang lebih menekankan pada tataran idealisme, tidak diperdalam apalagi sampai tingkat implementasi. Kalaupun ada pesantren yang memiliki koperasi, lebih berjalan pada apa adanya. Ilmu kealaman yang banyak dikaji adalah ilmu falak yang lebih ditekankan pada bagaimana menentukan jadwal sholat dan menghitung awal bulan dalam kalender hijriyah, walaupun ada pendalaman ilmu falak dalam keperluan tertentu.

Jadi di pesantren, menurut hasil pengamatan, semuanya serba praktis, tujuan pendidikan sesuai dengan kitab-kitab yang dikaji, mengaji fiqh agar mampu berbicara tentang fiqh dari berbagai domain, kognitif, apektif, dan psikomotor.

Untuk tingkat `ubudiyyah rububiyyah dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari (*life skill*) tapi tidak atau kurang untuk tingkat 'ubudiyyah mu'amalah. Belajar nahwu-sharaf dan ilmu Bahasa `Arab lainnya agar santri bisa membaca dan memahami kitab kuning. Walau di Pesantren Tarbiyatul Furqan mulai dilaksanakan, namun pesantren lain jarang mempraktikan muhadatsah (percakapan), karena menurut salah seorang ustadz pengampu pelajaran Bahasa `Arab; percakapan banyak merusak ilmu (gramatika) Bahasa `Arab. Begitu pula dengan kajian lainnya; semua yang dikaji adalah yang banyak digunakan dalam peribadatan keseharian atau yang sering muncul sebagai persoalan keagamaan di masyarakat. Tampaknya di pesantren, apa yang dikaji langsung dipraktekkan sejak dini, tidak sebatas diajarkan di dalam ruangan kelas.

Materi pelajaran yang disampaikan terdiri dari tiga macam; pertama: semata-mata materi kitab, ini berlaku untuk yang masih belajar di tingkat wustha-ula. Kedua, materi kitab dengan sedikit penjelasan ustadz untuk santri yang wustha-tsani, dan yang ketiga materi kitab dengan penjelasan yang lebih luas untuk santri yang sudah di tingkat wustha-'ulya. Terhadap materi yang diajarkan, para santri diperkenankan menggali sendiri dari berbagai kitab yang dikajinya, termasuk dari buku-buku agama yang berbahasa Indonesia. Tidak sedikit yang memasukkan pendapat-pendapat para modernis yang mereka peroleh dari buku-buku mutakhir.

Tenaga pengajar, menurut hasil wawancara dan pengamatan di berbagai pesantren, terdiri dari tiga golongan; Pemimpin Pesantren, para ustadz dan santri senior terpilih, selanjutnya penulis istilahkan dengan Dewan Pengajar.

Penunjukkan dan pengangkatan dewan pengajar tidak cukup mudah dan sesederhana yang disangkakan. Calon pengajar harus benar-benar menguasai ilmu yang akan diajarkannya, dan harus sudah terlatih mengajar dari mulai saat mereka masih di tingkat tsanawi. Selain kemampuan materi yang diajarkan kemampuan mengajar juga dinilai, sejauh mana dapat diikuti santri-santri yunior yang diajamya. Makin banyak santri yunior yang mau belajar kepadanya, diartikan yang bersangkutan mampu mengajar dengan baik. Selama itu santri terus dimonitor kemampuan keilmuan dan mengajamya dan akhimya dibawa ke dewan pengajar untuk menentukan bahwa santri tersebut dipercaya dan direkomendasi untuk mengajar. Di pesantren tidak diajarkan dan tidak diharuskan mengerti ilmu mendidik, semuanya dilakukan berdasarkan pada pengalaman dan dengan *uswah* terhadap Ustadz senior. Kitab tentang pendidikan dan etika yang banyak digunakan adalah kitab *Ta'lim-Muta'alim* karangan Asy-Syaikh Ibrahim bin Isma'il Al-Zarnuji yang menyangkut hubungan murid guru, tata cara mencari ilmu, dan ilmu apa saja yang sebaiknya dipelajari. Kitab ini lebih fokus pada kewajiban seorang santri atau murid. Ada beberapa kitab yang membahas masalah pendidikan baik yang dikarang oleh para 'ulama salaf seperti *Ihya `Ulumu Al-din* karangan Al-Ghazali atau 'ulama mutaakhirin, seperti *Tarbiyatul Awlad* karangan 'Abdullah Nashih Ulwan atau *Ushulu Al-Tarbiyatu Al-Islamiyah Wa Asalibuha* karangan Abdurrahman An-Nahlawi, dan lain-lainnya lagi. Namun kitab-kitab pendidikan tersebut bisanya hanya merupakan referensi yang hanya ada pada Pemimpin Pondok atau ustadz senior. Adapun administrasi pesantren dikerjakan oleh para ustadz atau santri senior yang belum memiliki pengetahuan

ketatausahaan yang baik. Kebanyakan berdasarkan pada pengalaman sehari-hari di pesantren; kecuali di Al-Amin yang menugaskan seorang karyawan nonguru dengan segala keterbatasan untuk membantu dibidang administrasi.

Sistim pembelajaran di pesantren yang dinyatakan oleh para ahli pendidikan Barat sebagai pendidikan satu arah, bahwa para santri tidak memiliki kesempatan untuk mengajukan pendapatnya. Pada kenyataan di lapangan di pesantren yang diteliti kebiasaan diskusi berjalan dengan baik, cuma kebiasaan sifat tawadlu dan rasa sungkan santri kepada kyainya yang mungkin membatasi diskusi.

Evaluasi terhadap komponen-komponen kurikulum baik hasil pengamatan maupun wawancara, tidak pernah dilakukan. Tidak ada indikator keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan, tidak ada uji kelayakan materi kurikulum, begitu pula dengan strategi belajar mengajar. Kurikulum pesantren, sampai saat ini tidak pernah berbicara dengan dunia kerja, sehingga tidak pemah melakukan evaluasi kesesuaian kurikulum dengan dunia kerja.

Orang tua santri berpendapat bahwa mereka mengirimkan anak-anak ke pesantren tujuannya mampu belajar agama dengan baik. Bapak Gusti Saifullah (ayah dari Gusti Rini Agustina santriwati Pesantren Tarbiyatul Furqan) misalnya berharap: “Semoga anak-anak kami dapat melaksanakan `amalan hariannya, dan berakhlak baik untuk bekal kehidupan akhirat kelak. Selain dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat yang menjadikannya anak sholeh”[185]. Seperti Bapak Umar Baqi (orangtua dari Maria Ulfah santriwati Pesantren Nurussalam), berkeyakinan: “ Mengharap para santri ini menjadi anak shaleh yang dapat mendoakan orang

[185] Gusti Saifullah, o*rangtua santriwati PPS Tarbiyatul Furqan*, Wawancara pribadi, Desa Tanjung Harapan: 24 Juni 2012

tuanya baik selama masih hidup maupun setelah orang tuanya meningal dunia, dan kenyataannya anak yang pemah *nyantri* setidaknya kenakalannya banyak berkurang"[186].

Namun, hasil pengamatan penulis dan pendapat beberapa ustadz serta masyarakat setempat, dengan maraknya listrik masuk desa ditambah dengan penawaran masuknya TV kabel ke desa-desa dapat berdampak negatif terhadap kegiatan rutinitas para santri. Pada beberapa kesempatan, santri mencuri-curi waktu istirahat untuk menonton TV di rumah masyarakat tetangga pesantren, dan hal ini diakui pula oleh para pemimpin pesantren, ustadz, santri dan masyarakat setempat. Untungnya, sebagian besar mereka adalah santri kalong; yaitu santri yang pada malam hari pulang ke rumah orangtua/wali. Padahal banyak acara di televisi pada malam hari yang menggoda para santri usia anak baru gede (ABG), seperti pertandingan sepak bola dan olahraga lainnya yang menjadi kesenangan mereka, disamping berbagai sinetron dalam dan luar negeri yang juga menjadi tontonan santri.

Harapan pemerintah, setidaknya diwakili oleh pendapat salah seorang pejabat Pemerintah Kabupaten Barito Kuala[187]: "Pesantren diharapkan seperti saat lahimya, selain sebagai lembaga pendidikan; tempat trasformasi Ilmu, juga sebagai benteng budaya dan agen perubahan sosial berdasarkan syari'at dan itu bisa dilakukan karena pesantren merupakan lembaga pendidikan yang sangat dekat dengan rakyat. Posisi pimpinan pondok yang lebih merakyat sehingga lebih

[186] Umar Baqi, o*rangtua santriwati PPS Nurussalam*, Wawancara pribadi, Desa Tinggiran: 16 Juni 2012

[187] Wirdan Wahdani *(Kabid Pendidikan Dasar dan Menengah – Disdik Barito Kuala*), Wawancara khusus, Marabahan: tanggal 16 Juni 2012

didengar pendapatnya. Kelemahan pesantren banyak yang merasa cukup dengan kondisi yang ada dan kurang terbuka dengan perubahan-perubahan global. Padahal dengan kondisi pesantren yang lebih terbuka, pesantren bisa menjadi tujuan pendidikan altematif disamping sekolah-sekolah yang saat ini dianggap sebagai sekolah favorit."

Dalam bidang dakwah, hasil pengamatan dan wawancara dengan para Pemimpin pesantren, ustadz, santri senior, alumni, dan masyarakat; berbagai cara yang dilakukan dalam melaksanakan dakwah baik oleh santri yang masih di pesantren maupun para alumni, yaitu dengan mengadakan pengajian dirumah-rumah, di masyarakat umum, di kantor pemerintahan, atau bahkan membuka secara mandiri madrasah diniyah sebagai cikal bakal pondok pesantren. Pelaksanaan dakwah juga banyak dilakukan pada pada moment peringatan hari besar nasional dan hari besar Islam. Sebagian alumni melakukan dakwah bukan saja dengan bi al-lisan tapi juga dengan bi al-hal. Jenis pekerjaan yang menjadi mata pencaharian alumni ada yang jadi ustadz, guru, dosen, tani, pedagang, pegawai negeri, pegawai swasta, da'i, tentara, dan polisi.

3. Penerapan prinsip-prinsip manajemen dan pengembangannya dalam pengelolaan kurikulum persantren.

Hasil pengamatan penulis, pendidikan di pesantren berjalan tanpa perencanaan tertulis, namun perencanaan pembelajaran lebih berdasarkan pada instuisi. Otoritas Pemimpin pesantren cukup tinggi dalam menentukan arah pendidikan; mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan pendidikan tidak terdokumentasikan, sehingga tidak cukup mudah untuk meneliti dokumen

pesantren. Beberapa data yang bisa diperoleh antara lain: catatan data santri, laporan pemasukan keuangan bulanan dari santri, kitab rujukan sebagai pegangan, dan jadwal kegiatan harian, itu pun tidak selengkap yang diperlukan. Sebagian Pemimpin pesantren menyadari kelemahan ini sebagai kelemahan manajemen, walau sebagian lain merasa cukup berjalan apa adanya.

Permasalahan manajemen bagi pesantren, menurut para pimpinan pesantren yang dihubungi, terletak pada masalah SDM dan dana. Untuk melakukan pembenahan manajemen diperlukan dana yang tidak sedikit baik untuk pelatihan sumber daya manusianya, maupun untuk keperluan peralatan administrasinya. Sementara saat ini, pesantren penyelenggara Wajar Dikdas mendapat bantuan operasional dari pemerintah, namun semua pendanaan itu lebih banyak terkuras untuk membayar jasa para guru mata pelajaran umum, sebagian untuk biaya operasional dan sebagian lain untuk keperluan membeli kitab dan buku. Adapun pungutan bulanan dari santri yang disebut dengan uang *iuran*, itu merupakan pungutan yang diperlukan untuk keperluan santri sendiri. Misalnya untuk membayar listrik, air bersih, dan pemeliharaan sarana-prasarana; itu pun lebih sering tidak mencukupi. Pembangunan dan penyediaan sarana-prasarana dilakukan keluarga pesantren, baik merupakan dana keluarga maupun dana yang diperoleh melalui sumbangan-sumbangan para donatur. Para Pemimpin pesantren, ustadz dan pengajar lainpun, menurut keterangan para ustadz tidak mendapat upah atau honor yang tertentu jumlah dan waktunya.

Dari hasil penggalian data, bentuk dan jumlah pembayaran honorarium para ustadz di tiga pesantren yang diteliti, memiliki cara dan nominal masing-masing.

Pada pesantren Nurussalam dan Al-Amin, dibedakan antara guru mata pelajaran umum dan para ustadz internal. Guru pelajaran umum diberi honor dari dana BOS; yaitu Rp. 20.000,- perhari/datang atau Rp. 4.000,- per jam pelajaran; sedangkan para ustadz dibayar dengan padi yang diwakafkan santri 100 kaleng[188]; yang dibagi para ustadz (antara 5-6 orang) sesuai jam mengajar pada suatu kelas. Di pesantren Tarbiyatul Furqan, nilai 100 kaleng padi sering dikonversi menjadi dana tunai yang nilainya fluktuatif sesuai harga pasar padi; sehingga umumnya setiap ustadz menerima honor berkisar antara Rp. 65.000,- sampai Rp. 70.000,- perbulan.

Untuk keperluan biaya hidup sebagian para ustadz memiliki pekerjaan lain, ada yang membuka warung keperluan santri, memperoleh bagian untuk memasok keperluan makan, ada juga sebagian kecil yang menjadi pegawai negeri sebagai guru di lingkungan Kementerian Agama atau di Dinas Pendidikan, bekerja di Kantor Urusan Agama setempat atau guru pada madrasah swasta.

Kendala yang kedua yang dihadapi oleh pengembangan manajemen di pesantren adalah sumber daya manusianya. Menurut para Pemimpin pesantren dan ustadz, di pesantren belum ada pendidikan manajemen secara khusus; kecuali beberapa informasi tata administrasi yang diselipkan pada setiap pertemuan di kantor Kementerian Agama kabupaten; pertemuan yang dilakukan tidak lebih dari 2-3 kali setahun. Sesuai dengan sejarah sejak pendirian pesantren sampai sekarang, tujuan umum pendidikan pesantren adalah bagaimana agar santri dapat menjadi hamba (`*ibadu*) Allah dan *khlaifatu fil ardli* sesuai kehendak Allah

[188] Wawancara tanggal 24 Juni 2012 (Takaran padi yang lazim digunakan di Kalimantan Selatan, 1 kaleng setara 20 liter)

melalui tuntunan Rasul-Nya. Adapun tujuan pendidikan pesantren, bagaimana santri bisa memiliki akhlak yang baik serta melaksanakan *ibadah* dengan baik dan benar, artinya sesuai dengan syarat syah dan rukunnya. Tujuan kurikuler dan tujuan instruksional disandarkan pada kitab yang dikaji; karena diyakini bahwa kitab yang dikaji sudah menunjukkan tujuan dimaksud dan sudah teruji validitasnya serta dirasa mampu memecahkan berbagai persoalan sesuai dengan bahan ajar yang dibahasnya. H. Ladi Nawidi menambahkan; "Buktinya, penggunaan kitab bisa bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Sekalipun ada pendapat yang muncul diakhir-akhir ini yang menyatakan bahwa kitab kuning yang dikaji sudah tidak relevan lagi, dan ini tentu saja perlu kajian yang mendalam pada masalah mana ketidak-relevanannya"[189].

Strategi pembelajaran, menurut para Pemimpin pesantren dan ustadz lebih ditekankan pada kebutuhan santri memahami ilmu-ilmu keagamaan, bagaimana santri dapat memahami materi pembelajaran yang diperolehnya dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Keterampilan lainnya diperoleh dengan pengalaman bagaimana dapat mengerjakan sesuatu, tidak ada pembelajaran secara khusus. Evaluasi hasil pendidikan pesantren tidak mengutamakan ujian dan ijazah, tapi lebih cenderung pada apa mereka bisa diterima di masyarakat setempat, apakah mereka bisa mengamalkan ilmu yang diterimanya di pesantren. Tolok ukurnya menurut Pemimpin pesantren dan para ustadz; yaitu dengan melakukan *halaqah* alumni dalam periode tertentu dan/atau dari berbagai informasi tentang keberadaan alumni di tempat dia terakhir

[189] Ladi Nawidi, *Ustadz PPS Nurussalam*, Wawancara pribadi, Tinggiran: Tanggal 19 Mei 2012

bermukim. Disamping bidang keilmuan, dipantau juga tentang akhlaq, sikap dan perilakunya di masyarakat; bila tidak ada kesan negatif, hal itu bisa dimaknai bahwa hasil didik pesantren diterima di masyarakat.

Pada *halaqah* dapat diketahui sejauh mana penguasaan para alumni atau asatidz terhadap materi kitab kuning yang pernah dikajinya dan sejauh mana pengembangan pengetahuan tentang materi kitab kuning yang sedang digelutinya.

4. Rekonstruksi kurikulum dengan memperhatikan potensi pesantren dan potensi kekinian masyarakat.

Walaupun tidak pernah tertulis dan didokumentasikan, namun menurut para kyai; tujuan pendidikan di pesantren adalah untuk membentuk kader-kader masyarakat yang shalih. Pesantren membangun sistem pendidikan sesuai dengan ajaran Islam dengan memperhatikan budaya bangsa selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Menurut pengamatan penulis selama melakukan penelitian, pesantren dengan praktek pendidikan yang diwarisinya sebagai kekayaan tradisi memiliki peluang sinergi transformasi dan pemberdayaan masyarakat. Sisi strategis pesantren dengan kemampuan melayani pendidikan bagi segenap golongan umur merupakan bahan pertimbangan dalam merumuskan kurikulum pendidikannya. Demikian pula halnya dengan realitas sosial, ekonomi, budaya, dan intelektual masyarakat plural yang kelak dihadapinya.

Menurut hasil wawancara dengan para ustadz tentang pendidikan Islam, mereka menyatakan bahwa ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW mengajarkan dengan baik tentang ayat-ayat *Quraniyah* maupun *kawniyah*. Rasulullah mengajak umatnya sebagai pemimpin yang suci dan menyucikan diri,

mengajak sahabat untuk *ta'limu Al-Quran*, baik dalam *qira'at, tilawah*, dan memahami maknanya. Seorang ustadz, menambahkan bahwa; Rasulullah menyuruh sahabat apabila membaca Al-Quran agar membaguskan suaranya. Rasulullah sebagai uswatun hasanah mengajarkan hikmah, secara *qauli, fi'li* dan *takriri*, kepada masyarakat sehingga benar-benar menjadi bijak dan arif. Seorang ustadzah senior menyebutkan; bahwa Rasulullah mengajarkan ilmu perjalanan matahari, bulan, dan bintang walau sekedar untuk menentukan waktu-waktu beribadah shalat, puasa, menunaikan zakat dan naik haji. Tidak sedikit alumni pendidikan Islam sebagai penemu ilmu pengetahuan, matematik, kedokteran dan lain sebagainya. Ustadz yang lain berkata pula bahwa Rasulullah baik dalam memberi tugas maupun dalam mengajarkan materi kepada sahabat selalu mengukur kadar kemampuan mereka, melihat kepentingannya, visi-misinya serta bagaimana keberlanjutannya. Barangkali metode semacam ini merupakan cikal bakal manajemen dan strategi pendidikan.

Pendidikan pesantren menurut para Pemimpin pesantren, tidak mengabaikan keduniawian, karena merupakan bagian penting dalam kehidupan. Tapi garapan-garapan *ibadah kifayah* yang berhubungan dengan ke*kauniayah*an sudah ada yang menggarapnya, maka pesantren cukup bertoleransi pada garapan orang lain. Kemunduran ummat Islam, menurut Ustadz Husni, bukan semata-mata karena tidak memiliki ilmu pengetahuan atau karena kebodohan dan bukan karena kemiskinan, tapi karena sering lupa melaksanakan kewajiban dari Allah, termasuk diantaranya dalam hal menuntut ilmu. Pergeseran niat menuntut ilmu tidak lagi pada pewarisan nilai-nilai antar-generasi dalam rangka beribadah kepada Allah

SWT, tapi sudah mengarah pada nilai-nilai materialisme. Kekayaan memang harus dicari tapi bukan sebagai tujuan. Kebutuhan masyarakat sekarang bagaimana menyiapkan kader-kader ber-*akhlaku al karimah*, sebagai fondasi kehidupan yang cerdas[190]. Hal ini dapat membentuk sikap masyarakat untuk selalu siap menghadapi problem dan cobaan yang muncul dengan solusi terbaik yang dibenarkan agama.

Pesantren belum siap merekonstruksi '*kurikulum'* yang dihadapkan atas perubahan paradigma pendidikan dan sesuai dengan tuntutan masyarakat yang memang bervariasi. Di tiga pesantren yang diteliti tetap mempertahankan pendidikan keislaman dengan menggunakan kitab kuning sebagai rujukan. Malah masih ada kyai yang menganjurkan agar ciri khas pesantren dengan memakai kain sarungnya harus dipertahankan oleh para ustadz serta para santri pada hari-hari tertentu.

Pendidikan pesantren belum disangkutpautkan dengan dunia kerja. Ketika dipertanyakan bahwa tugas manusia itu adalah bekerja, dan bekerja dalam Islam merupakan ibadah; sehingga tidak ada salahnya pendidikan non-agama masuk pesantren. Jawaban salah seorang Ustadz senior, tergantung pada niatnya, artinya silakan saja kalau niatnya untuk kemajuan dan ketahanan Agama Islam.

Menurut para Pemimpin pesantren rekonstruksi kurikulum belum dikatagorikan sesuatu yang mendesak, karena materi keislaman yang terkandung dalam kitab kuning dirasa masih sangat relevan dengan situasi peribadatan saat ini. Pendapat ini ternyata dipengaruhi oleh pendapat yang mengatagorikan

[190] . Husni, *Ustadz PPS Tarbiyatul Furqan*, Wawancara pribadi, Tanjung Harapan: Tanggal 26 Mei 2012

kurikulum hanya pada materi pelajaran yang disampaikan. Ketika disampaikan bahwa kurikulum bukan hanya materi pelajaran, tapi ‘keseluruhan program, fasilitas, dan kegiatan suatu lembaga pendidikan atau pelatihan untuk mewujudkan visi dan misinya', banyak Pemimpin pesantren menanyakan dari mana pesantren harus mulai melakukan pembenahan kurikulum.

Hasil pengamatan lapangan, ketiga pesantren yang diteliti merupakan pendidikan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat yang kerangka pendidikannya tidak mengarah pada mencari kerja tapi lebih pada bagaimana mereka mampu bekerja. Ada beberapa hal, dalam pengamatan penulis dan diakui oleh beberapa ustadz, yang kurang mendapat perhatian pesantren adalah bergesernya paradigma dari pendidikan untuk *li-kalimatillah* menjadi pendidikan yang berorientasi memperoleh pekerjaan, sehingga tidak menutup kemungkinan konsekuensinya minat orangtua untuk mengirimkan anaknya ke pesantren menjadi turun. Ini perlu menjadi perhatian pesantren, walaupun bukan berarti pesantren harus terseret ke pergeseran paradigma tersebut.

Ketika ditanyakan tentang pendidikan seyogyanya mampu mengantisipasi kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman, beberapa Ustadz berbeda pendapat. Ustadz senior rata-rata menjawab bahwa pendidikan pesantren lebih ditujukan pada pengabdian kepada Allah SWT, kepentingan manusia tidak ditentukan oleh perubahan zaman tapi bagaimana manusia dapat beribadah kepada Allah dengan baik. Sementara pendapat ustadz lain, bahwa antisipasi terjadinya perubahan paradigma masyarakat terhadap pendidikan akibat perkembangan zaman memang diperlukan dalam menyusun kurikulum yang tujuannya untuk

kepentingan pesantren sendiri. Menurut para ustadz, kurikulum dibuat untuk memperoleh standar pendidikan pesantren ke depan.

Dalam menghadapi merasuknya pengaruh globalisasi, pesantren sejak dulu memiliki nilai-nilai *character building* pada nilai-nilai pendidikan dan pengajarannya. Menurut pengamatan para Pemimpin pesantren, kenakalan remaja bukan terjadi semata-mata salah pendidikan seperti yang selama ini selalu dituduhkan, tapi lebih karena terjadinya ketidak-harmonisan dalam keluarga. Bergesernya gaya hidup dari nilai gotong-royong dan kekeluargaan menjadi gaya hidup hedonistik, materialistik dan permisif. Gaya hidup semu yang banyak ditayangkan telenovela dan sinetron pada berbagai saluran TV, sedikit-banyak mempengaruhi karakter masyarakat yang semula berbudaya nasional dengan nilai-nilai agama. Di pesantren gaya hidup hedonistik, materialistik dan permisif diusahakan dihilangkan dengan nilai-nilai kesatuan yang dibina antara santri dan ustadz dengan dilandasi nilai-nilai *mawaddah wa rahmah*.

Harapan orang tua dan alumni, menjadi tantangan pesantren untuk tetap mempertahankan paradigma pendidikan tapi dengan memperhatikan kebutuhan orangtua dan peserta didik secara utuh. Menurut alumni dan orangtua serta masyarakat; seperti dikatakan Muhammad Subhan (alumni) yang dibenarkan pula oleh H. Abdul Hadi ayahnya; bahwa sudah waktunya pesantren memiliki konsep kurikulum modern, sehingga pesantren dapat diterima sebagai sebuah altematif pendidikan nasional, dan sudah saatnya pesantren menunjukkan kelebihannya[191]. Dalam hal ini, perlu penambahan wawasan untuk para santri dalam memaknai arti

[191] Muhammad Subhan, *alumni PPS Al-Amin*, Wawancara pribadi, Jl. Trans Kalimantan: tanggal 24 Juni 2012

keagamaan secara lebih luas. Hasil wawancara dengan berbagai pihak dan observasi di lapangan, menunjukkan pesantren masih kesulitan rekonstruksi kurikulumnya, tetapi bukan tidak mungkin kalau pesantren malah terlindas atau terjebak dalam pusaran arus modernisasi yang keliru. Menurut beberapa ustadz, perlu ada pencerahan bagaimana penerapan manajemen kurikulum di pesantren dalam upaya *Al-muhafazatu `ala al-qadimi ash-shalih wa al-akhdzu bi al jadidi al-ashlah.*

Ketika disodorkan pemanfaatan manajemen kurikulum dalam pengelolaan pendidikan di pesantren, semua pesantren menyambut baik, sekalipun ada yang masih melihat kemanfaatannya; jangan sampai terjadi malah pesantren kehilangan ciri khasnya. Alasan yang menyambut konsep manajemen kurikulum, karena sesuai dengan motto pesantren, memelihara tradisi dan pengalaman lama yang baik dan mengambil konsep dan strategi baru yang lebih baik; sekalipun masih perlu diuji coba terlebih dahulu. Untuk yang masih melihat kemanfaatan, alasannya belum ada tenaga ahli yang mau terjun ke pesantren, jadi ketika peantren menyambut dengan baik tapi belum difahami benar, malah ditinggalkan. Sampai saat ini, katanya, pesantren sering diberi pancing tapi tidak pernah diajari memancing. Tersirat nada pesimis terhadap keberhasilan pendidikan di Indonesia yang, menurutnya; sudah melaksanakan prinsip manajemen modern namun belum banyak menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.

Dalam hal tambahan mata pelajaran umum, sebelum menjadi PPS Penyelenggara Wajar Dikdas 9 Tahun, ada beberapa pendapat dengan alasan yang berbeda. Sebagian menyatakan setuju dengan syarat harus ada tenaga ahlinya;

bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan, direncanakan dengan matang dengan berbagai pertimbangan dan diberikan kepada yang berminat. Yang kurang setuju; beralasan bahwa beban pesantren terlalu berat, pesantren cukup mengajarkan 'agama' saja. Mata pelajaran lain diberikan kepada ahlinya saja, yaitu madarasah atau sekolah.

Pada awal adanya penambahan mata pelajaran umum, penolakan terjadi juga di kalangan santri. Ketika akan dilaksanakan pembelajaran, masih banyak santri yang berkeliaran di luar ruang belajar, bahkan di luar lingkungan pesantren hanya karena tidak mau mengikuti pelajaran tersebut. Tidak jarang para ustadz melakukan pendekatan untuk membujuk mereka agar bersedia masuk ke ruangan dan mengikuti pelajaran. Namun seiring perjalanan waktu, setelah dilaksanakan ujian akhir pertama, dan para santri yang lulus mendapat ijazah. Hal itu ternyata, sedikit demi sedikit membuka pemahaman mereka; bahwa mereka belajar di pesantren, selain menimba ilmu pengetahuan agama – mereka juga dapat mempelajari mata pelajaran umum, berhak mengikuti ujian dan berkesempatan memiliki ijazah, sama seperti teman-teman mereka yang belajar pada madrasah atau sekolah lain.

Demikian uraian Bab IV ini berupa hasil penelitian;berikutnya dalam Bab V penulis mencoba menganalisis beberapa hasil penelitian dalam kerangka pengembangan manajemen kurikulum di PPS Wajar Dikdas 9 tahun.

BAB V
PEMBAHASAN

Penyelenggaraan pendidikan nasional pada dasarnya merupakan pemberian layanan kepada siswa atau santri untuk mencapai kompetensi-kompetensi yang terkait dengan moralitas, akademik, vokasional, dan sosial pribadi secara kognitif, apektif, psikomotor dan *life skill.* Layanan pendidikan tersebut berlaku untuk setiap lembaga penyelenggara pendidikan. Pesantren sebagai satu jenis lembaga pendidikan di Indonesia, pada kenyataannya di lapangan telah memberlakukan layanan pendidikan tersebut sejak awal berdirinya. Seperti pengakuan Departemen Agama[192]:

1. Lembaga pendidikan pesantren melaksanakan pendidikan terpadu yaitu untuk kematangan *teoritis loguitif (kognitif/intuitif).* Sikap dan keterampilan khusus yang merupakan aplikasi dari teori tertentu, umpamanya ilmu tentang ibadah dalam arti kata ritual dan ilmu lain seperti ilmu matiq dalam ilmu logika, waris, hisab, perkawinan, kematian, pertanian dan sebagainya.
2. Tujuan pendidikan pesantren tidak hanya duniawi *(mondial)* dan sementara *(temporer),* akan tetapi sampai kepada alam ukhrowi untuk mencapai keridhaan Allah, baik dunia maupun akhirat.
3. Lembaga pendidikan pesantren merupakan pusat pertemuan antara ulama dan umat, antara ilmuwan *(expert)* dan masyarakat awam *(layman),* pusat pertemuan individu dengan masyarakat,pusat pertemuan antara pemimpin dengan rakyat, pusat pertemuan antara client dengan konsultan dan lain sebagainya.
4. Di samping itu lembaga pendidikan pesantren merupakan pusat konservasi (pengawetan), pendalaman, pengembangan, pemurnian nilai abadi dan budaya serta pusat pelaksanaan proses akulturasi.

A. Kurikulum di pesantren dan perkembangannya

Pembelajaran di pesantren dipastikan memiliki tujuan pendidikan seperti layaknya lembaga pendidikan lainnya; hanya belum berupa dokumen tertulis dan

[192] Departemen Agama, *Islam untuk Disiplin Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1996) hal. 207-208

belum distrukturkan. Seperti, misalnya, tujuan santri belajar kitab *Safinah* agar santri memahami hukum *fiqh* dasar; bahwa pelaksanaan praktik *fiqh* dasar lebih disandarkan pada contoh dan aplikasi dalam keseharian. Tujuan santri belajar kitab *Al-Jurumiyah* agar santri menguasai ilmu *Nahwu*, tujuan santri belajar *Sharaf-Kaylani* agas santri menguasai ilmu *Sharaf*, sehingga santri menguasasi dasar gramatika berbahasa Arab. Tujuan santri belajar *Akhlaq al-Banayn* agar santri ber-*akhlaku al-karimah* dan seterusnya.

Pembelajaran semacam ini, jika dilihat dari fokus pengajaran, disebut *Subject Centered Design;* maksudnya kurikulum dipusatkan pada isi atau materi yang diajarkan, tersusun atas sejumlah mata pelajaran yang diajarkan secara terpisah-pisah sehingga kurikulum ini disebut juga *Separated Subject Curriculum*. Subject Centered Design berkembang dari konsep pendidikan klasik yang lebih menekankan pengetahuan, nilai-nilai peninggalan budaya masa lalu yang berusaha mewariskan kepada generasi selanjutnya. Karena mengedepankan isi/bahan ajar atau *subject matter*, maka desain kurikulum semacam ini disebut juga *Subject Academic Curriculum*[193].

Padahal seyogyanya pembelajaran di pesantren harus memiliki tujuan pendidikan, seperti disebutkan pada Bab I Pasal 1 ayat 19 UU Nomor 20/2003; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman

[193] Nana Syaodih Sukmadinata (2010), *Op cit*, hal. 113-114

penyelenggaraan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu[194]. Senada dengan aturan tersebut, Ragan (seperti dikutip Malik) berpendapat bahwa kurikulum diartikan kumpulan subjek yang diajarkan di sekolah, atau arah suatu proses belajar[195].

Di pesantren, tujuan pendidikan secara kognitif tersirat pada kitab kuning apa yang dikaji oleh santri saat itu, sedangkan secara apektif dan psikomotor terlihat dalam pengamalan hidup sehari-hari. Tujuan pendidikan secara *lifeskill* dinyatakan dalam aktivitas keseharian yang dilakukan di pesantren.

Berbeda dengan kaidah pendidikan modern, yang dimulai dengan menentukan tujuan pendidikan umum, tujuan lembaga, tujuan pengajaran/ kurikuler, menentukan tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Meskipun demikian, menurut Tafsir antara tujuan pendidikan nasional dan tujuan pendidikan Islam berada pada posisi yang setara yang tidak perlu dipertentangkan, karena keduanya dapat dijabarkan menjadi tujuan institusional, tujuan pengajaran/kurikuler, dan tujuan instruksional[196]; seperti dijelaskan pula dengan Gambar 2 pada bab terdahulu.

Tujuan pendidikan nasional menciptakan manusia yang berakhlak mulia, beriman, bertaqwa serta meyakininya sebagai suatu kebenaran dan membuktikan kebenaran itu melalui akal, rasa, dan karsa di dalam seluruh perbuatan dan tingkah laku sehari-hari. Tujuan pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang

[194] Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

[195] William B. Ragan, *Modern Elementary Curriculum* (Revised Edition), (USA: Rinehart and Winston, Inc, 1960) Hal. 3, seperti dikutip A. Malik, *Inovasi Kurikulum Berbasis Lokal di Pondok Pesantren*, (Balitbang Departemen Agama: Jakarta, 2008) hal. 25

[196] Ahmad Tafsir, *Loc cit*, (1995)

beriman dan bertaqwa, shalih dan produktif, cerdas dan amanah sebagai *'abdullâh* yang mendapat *rahmat*, *inayah*, *ridla* dan *maghfirah* Allah SWT. Melalui hubungan dengan-Nya secara langsung dicapai melalui ibadah *makhdlah* dan melalui ibadah-ibadah *ghairu makhdlah* yaitu cipta, karsa, dan rasa sebagai manusia yang memiliki kepedulian terhadap sesama dan dengan makhluk lainnya atau amal shaleh sosial. Seperti dinyatakan dalam (Q.S. Al-Ashr, 103: 3):

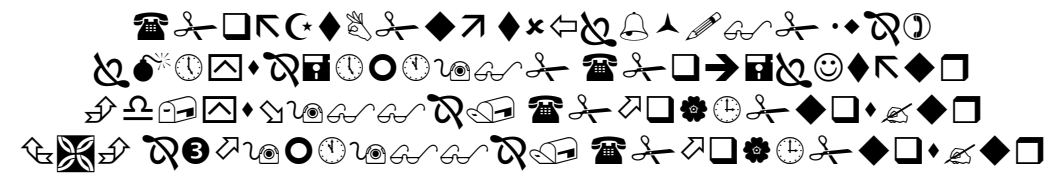

"Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran"

Menggunakan kitab kuning sebagai rujukan, sebenamya memiliki nilai plus dalam pendidikan pesantren yaitu mempelajari materi ajar sekaligus bahasa yang digunakan; tidak berbeda dengan sekolah yang berpredikat sebagai sekolah modern yang menggunakan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya sebagai bahasa pengantar. Secara tidak langsung praktek ini merupakan kebiasaan di pesantren yang menggunakan bahasa kitab tersebut sebagai bahasa pengantar, sehingga santri terbiasa dengan menggunakan Bahasa Arab yang juga merupakan Bahasa Al-Quran.

Untuk menentukan model mengajar dalam proses belajar mengajar di pesantren sebenarnya ditentukan oleh kondisi santri sendiri, model sorogan hanya digunakan untuk santri pemula dan anak-anak yang baru belajar membaca kitab kuning dan tidak diberlakukan untuk mereka yang telah menguasai kaidah-kaidah cara membaca kitab kuning kecuali untuk masalah-masalah khusus. Metode

sorogan ini banyak digunakan oleh para santri senior dalam mengajar santri pemula, dimaksudkan agar santri pemula lebih cepat menguasai cara membaca dan termotivasi untuk mempelajaro dan memahami kitab kuning.

Model pengajaran *wetonan/bandongan* sebetulnya merupakan cikal-bakal proses pembelajaran secara klasikal, cuma dengan cara yang berbeda. Di kebanyakan pesantren yang belum memiliki madrasah khusus untuk pengajian, model pengajaran ini bisa dilakukan di mesjid atau di rumah ustadz. Santri menyimak pelajaran yang disampaikan, dengan duduk lesehan, bersila, bahkan sambil menyandarkan tubuh di dinding; walaupun dalam perkembangannya sudah menggunakan tempat khusus (ruang kelas) dengan fasilitas kursi dan meja seperti di sekolah. Model *mudzakarah* serupa dengan model diskusi dan lebih cenderung pada model presentasi. Metode pembelajaran dimaksud merupakan metode pembelajaran yang dilaksanakan di pesantren; tergantung waktu dan bahan ajar yang disampaikan. Permasalahannya adalah semua metode tersebut belum terdokumentasikan, sehingga tidak ada evaluasi untuk pengembangan selanjutnya; padahal pendokumentasian pembelajaran merupakan alat *replanning* kurikulum selanjutnya. Jika mengutip pendapat Groundlund (yang dikutip Rusman); bahwa evaluasi kurikulum adalah proses yang sistematis meliputi pengumpulan analisis dan interpretasi informasi/data untuk menentukan sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran[197], maka akan lebih baik jika model pembelajaran tersebut tertata dengan pendokumentasian yang baik karena akan memudahkan untuk melakukan penilaian. Evaluasi dapat juga dimanfaatkan sebagai masukan

[197] Rusman, *Ibid*, hal. 93 – dari: Norman Groundlund, *Constructing Achievement Tes*, 3rd. (New York: Prentice Hall-Inc, 1982)

dalam penentuan pengambilan kebijakan dalam pengambilan keputusan tentang kurikulum dan pendidikan. Bahkan Rusman (mengutip Hopkins dan Antes), lebih jauh menyatakan bahwa evaluasi adalah kontinuitas pemeriksaan untuk mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, program pendidikan, dan proses belajar mengajar sehingga dapat diketahui dinamika siswa dan efektivitas program[198]. Sebagai salah satu komponen kurikulum, maka evaluasi bertujuan untuk menilai pencapaian kurikulum atau menilai proses implementasi kurikulum secara utuh yang pada akhirnnya dapat digunakan sebagai pertimbangan perbaikan dan penyempurnaan kurikulum di waktu yang akan datang. Hal ini berkaitan dengan pendapat Hamalik, bahwa kurikulum suatu pendidikan itu tidak statis, namun dapat berubah dan bersifat dinamis. Hal ini dapat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan yang mengharuskan penyesuaian karena adanya kebutuhan dari siswa dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.[199]

Pembelajaran dengan melakukan *Study tour* dan *tadabur 'alam* belum dilaksanakan; kecuali *ziarah* ke makam para *wali*, hal ini terbentur masalah keterbatasan dana. Padahal kegiatan ini sebenarnya cukup memiliki peran penting selain refreshing kejenuhan belajar, juga untuk merelevansikan hubungan ayat-ayat *kawniyah* dengan *Qur'aniyah*; seperti dinyatakan pada Gambar 3.

B. Kurikulum; antara kepentingan santri, harapan masyarakat dan kualitas hasil didik

Kurikulum pesantren walaupun tidak secara tertulis, secara konkrit di lapangan sudah dapat dianggap sesuai dengan kepentingan "orang tua santri" dan

[198] *Ibid*

[199] Oemar Hamalik, *Op.Cit*, hal: 20-21

"santri" yang datang ke pesantren untuk belajar ilmu dan nilai-nilai keagamaan. Keunggulan pesantren sebagai benteng akhlak dalam menangkis masuknya budaya yang merusak moral bangsa, ini diakui oleh berbagai pihak; seperti pendapat Azra bahwa pesantren sejak awal dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat bukan saja dalam masalah transformasi Agama Islam lebih jauh sebagai agen perubahan sosial, yang menurut Azra pesantren dapat disebut "sebagai *culture brokers* di masyarakat" pada umumnya[200]. Ditambahkan pula oleh Tafsir; bahwa pesantren disamping melakukan pendidikan, juga menanamkan keimanan dan ketaqwaan secara *makhdlah* dalam sikap hidup keseharian. Dengan keimanan dan ketakwaan yang menjadi landasan dan tujuan hidup, dapat menjadi filter dalam menilai mana yang baik dan mana yang buruk; dengan keimanan dan ketakwaan manusia dapat menerangi kehidupan zaman global yang ditempuhnya[201].

Sebagian besar pesantren masih bertahan dengan paradigma pendidikan yang tidak bergeser dari *li-kalimatillah* kepada pemahaman yang beranggapan bahwa pendidikan sekedar alat pencari kerja. Namun, kepentingan lain yang sifatnya lebih operasional dalam melaksanakan kehidupan kelihatannya belum tersentuh. Menyimak pernyataan Surjadi: "Dalam tugasnya sebagai khalifah itu ia selalu berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Petunjuk-petunjuk ayat dijabarkan menjadi operasional, sehingga dapat dilaksanakan langkah demi

[200] Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: *Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru*, (Jakarta: Kalimah, 2001) hal. 108

[201] Ahmad Tafsir, *op cit*, hal. 9

langkah sehingga hasilnya bermanfaat bagi rakyat banyak[202]". Hal ini menuntut kurikulum pesantren harus terdokumentasikan secara tertib sehingga mudah mengevaluasinya secara operasional; apalagi *Hidden curricullum* yang ada sekarang baru menyentuh pada nilai-nilai idealisnya.

Pergeseran paradigma sosial menuntut pesantren berbuat lebih banyak dan merupakan, sebuah beban yang cukup berat bagi pesantren itu sendiri, misalnya pendapat Surjadi[203]:

> Apabila khalifah harus memecahkan masalah-masalah, misalnya masalah sosial ekonomi, lingkungan hidup, pengangguran, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain, ia harus mampu mengidentifikasi dan merumuskan masalah tersebut. Kemudian dicarikan berupa ayat Al-Quran atau As-Sunnah. Selanjutnya ayat ini dikaji dijabarkan kedalam langkah-langkah teknis operasional seperti dikemukakan di atas.

Pesantren dituntut untuk dapat menyentuh banyak permasalahan sesuai dengan kepentingan *stakeholder* dengan tetap bersandar pada ayat Al-Quran atau As-Sunah. Dalam tataran idealis, Islam secara universal menyangkut segala unsur kehidupan; namun secara opersional nilai-nilai *li-kalimatillah* yang tercantum dalam (*hiden*) kurikulum belum terwujud secara operasional. Secara idealis, (misalnya) diyakini bahwa kebersihan adalah sebagian dari Iman, namun umat Islam belum mampu melaksanakan secara *kaffah*. Namun dalam masalah pendidikan keterampilan, yang dalam kurikulum pendidikan formal diistilahkan dengan *life skill*, maka sejak abad ke 19 *life skill* di pesantren sudah merupakan kegiatan rutin. Para santri membantu setiap kegiatan pembangunan pondok dan

[202] H.A. Suryadi, *Dakwah Islam Dengan Pembangunan Masyarakat Desa*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hal. 286

[203] *Ibid*

kegiatan lainnya di pesantren. Walaupun bukan pendidikan keterampilan yang diberikan secara teratur, tetapi pesantren telah memberikan contoh suasana hidup yang cukup baik untuk memulai pendidikan semacam itu[204].

Dalam program jangka panjang, pesantren sudah harus mulai mengubah makna *fardlu kifayah* dari makna yang sempit menjadi makna yang lebih luas. Jika masih ada sebagian pesantren yang menganggap *fardlu kifayah* baru pada tataran mengurus jenazah, belajar bahasa `Arab, atau belajar ilmu Tajwid; maka sudah saatnya pemaknaan *fardlu kifayah* itu termasuk pada pengembangan ayat kauniyah menjadi berbagai disiplin ilmu sebagai upaya mensejahterakan ummat manusia. Pondok Pesantren Salafiyah sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam memerlukan program masa depan yang dapat mengembangkan kapasitas santri sebagai pribadi yang menguasasi ilmu agama dan mampu berkontribusi dalam kehidupan sosial masyarakat[205]. Namun demikian, pendidikan di pesantren memiliki tujuan implisit seperti misalnya;

- penghargaan terhadap para Wali dan ulama, bertujuan agar para santri dapat menapaki jejak perilaku dan akhlaq beliau;
- penguasaan bahasa Arab, bertujuan agar memudahkan para santri mempelajari kitab-kitab keagamaan klasik yang menggunakan bahasa Arab;
- pembelajaran muatan agama, bertujuan mencetak kader-kader ulama yang siapa menjadi pemimpin yang saleh;

[204] Karel. A. Steenbrink, *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke 19*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hal. 162

[205] Departemen Agama, *Pedoman Pengembangan Kurikulum Pesantren*, (Jakarta: Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, 2009), hal. 18

- mengajarkan dan membiasakan kemandirian hidup, bertujuan agar semua santri dapat selalu survive dalam berbagai keadaan, ketika kelak terjun ke masyarakat.

C. Prinsip dan pengembangan manajemen dalam pengelolaan kurikulum persantren.

Beberapa pesantren mulai menyadari pentingnya manajemen kurikulum, walaupun belum memiliki target kapan manajemen kurikulum dapat dilaksanakan di pesantren. Beberapa pimpinan pesantren berusaha memulai mengembangkan model manajemen kurikulum dengan harapan lulusan pesantren bisa berkiprah lebih jauh berdampingan dengan lulusan lembaga pendidikan lainnya sehingga dapat mewujudkan lulusan pesantren yang shaleh dan produktif. Sekalipun disadari bahwa hal ini tidak mungkin dilaksanakan secara sendirian oleh pesantren, sangat diperlukan kerjasama yang bersinergi dengan pihak lain selaku partner yang seiring dan sejalan. Hal ini sesuai dengan pendapat Suhardan bahwa manajemen kurikulum adalah suatu proses atau sistem pengelolaan kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik agar tercapainya tujuan kurikulum yang sudah dirumuskan[206]. Tidak jauh berbeda dengan pendapat Hamalik yang menyatakan bahwa proses manajemen kurikulum tidak lepas dari kerjasama sosial antara dua orang atau lebih secara formal dengan bantuan sumber daya yang mendukungnya. Pelaksanaanya dilakukan dengan metode kerja tertentu

[206] Dadang Suhardan dkk, *Loc cit*, (2009)

yang efektif dan efisien dari segi tenaga dan biaya, serta mengacu pada tujuan kurikulum yang sudah ditentukan sebelumnya.[207]

Lulusan yang shalih dan produktif memiliki makna yang luas. Makna shalih selain tertuju pada hubungan manusia secara vertikal ke atas dengan Allah SWT; dan juga dengan posisi khalifah dalam melaksanakan hubungan horizontal sesama manusia serta hubungan vertikal ke bawah dengan makhluk yang lain, agar nilai-nilai keshalihannya menjadi lengkap dan tercapainya kesempurnaan hidup. Dengan nilai keshalihan yang lengkap umat Islam dapat menjadi insan yang paling produktif; yang tidak kehilangan jati diri. Surjadi[208] mengingatkan:

> Kaum muslimin mengokohkan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, menjadi pemecahan masalah kehidupan, maka Al-Quran menjadi pedoman hidup. Ia mengendalikan dan mengarahkan perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dikehendaki Al-Quran. Bukan sebaliknya, masyarakat muslimin berubah-ubah diayun gelombang sekularisme, hedonisme, dan budaya non Islam. ia menjadi permainan gelombang-gelombang perubahan yang tidak diketahui arahnya, akhirnya ibarat kiambang dihempaskan gelombang. Terkapar dipantai. Ia kehilangan identitas/jati dirinya ia bukan khalifah dan hamba Allah lagi.

Ketiga pesantren yang diteliti masih terbilang gagap teknologi, sekalipun bukan berarti enggan berhubungan langsung dengan perkembangan teknologi. Sifat apologetik terhadap Iptek di pesantren masih perlu sosialisasi yang mendalam agar mendapat pemahaman yang mendalam pula; karena sebagai suatu *sistem pendidikan*, pesantren merupakan sebuah lembaga formal, agen dan organisasi yang dapat *memindahkan* pengetahuan dan warisan kebudayaan yang mempengaruhi pertumbuhan sosial, spiritual dan intelektual masyarakat. Tilaar menyatakan bahwa jika berbicara mengenai inovasi pendidikan nasional untuk

[207] Oemar Hamalik, *Loc cit*, (2006)
[208] H.A. Suryadi, *Op cit*, hal. 288

melahirkan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat *(community-based management)* maka pesantrenlah model pendidikan tersebut; yang pada akhirnya *community-based management* dari pendidikan akan bermuara pada manajemen berbasis sekolah *(school-based management)*[209].

Model pendidikan pesantren adalah pendidikan berbasis agama (*religion based education*), yang jika dikaitkan dengan ruang dan waktu terkesan memiliki tiga model manajemen[210]; (1) model manajemen berbasis kitab kuning (MBKK), (2) model manajemen berbasis kyai (MBK), dan (3) model manajemen berbasis masarakat (MBMS).

- MBKK berlaku ketika pesantren menentukan materi pembelajaran, semua pihak menerima materi kitab kuning sebagai bahan kajian pendidikan pesantren.
- MBK berlaku ketika pesantren membuat kebijakan; semua subordinat dan warga pesantren akan taat kepada kebijakan yang ditentukan kyai.
- MBMS berlaku ketika pesantren melakukan pembangunan dan kegiatan yang berhubungan dengan fisik dan sarana-prasarana, maka para tokoh, alumni serta warga masyarakat di lingkungan pesantren akan terlibat dan dilibatkan dalam setiap kegiatan; mulai dari perencanaan, kepanitiaan sampai dengan pelaksanaan pekerjaan.

Sesungguhnya, secara fundamental akar keberhasilan pesantren dalam mendidik santri, bukan diukur dari keberhasilan hasil didik menerobos jajaran elit

[209] HAR. Tilaar, (2000), *Op cit,* hal. 153

[210] Djudju Nuzuluddin, *Kajian Model Manajemen Kurikulum di Pesantren: Studi Kepesantrenan di Kabupaten Garu*t, (Bandung: Uninus Press, 2007), hal. 156

pada jabatan politik, tetapi kiprah secara konkret dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Sejauh mana keteladanan moral *output* di tengah masyarakat yang tengah dihantui hedonism, konsumtivisme, dengan segala efek globalisasi-modernisme. Sebagai lembaga pendidikan yang menghasilkan hasil didik cerdas dan mampu memandang situasi masa yang akan datang, perlu menumbuhkan kesadaran sebagai anggota masyarakat yang memiliki komitmen terhadap masyarakatnya.

Sebagai lembaga pendidikan berbasis agama *(religion based aducation)* pusat penggemblengan nilai-nilai dan penyiaran agama Islam yang *makhdlah;* dengan wilayah garapan pada akselerasi mobilitas-vertikal (hubungan langsung dengan al-Khaliq). Cara pandang terhadap paradigma pendidikan tidak pernah berubah, yaitu mencari ilmu merupakan sebuah kewajiban *li-kalimatillah.* Rata-rata hasil didik pesantren mampu berusaha sendiri apa adanya. Sisi positif akar budaya yang masih bertahan adalah budaya kerja yang merupakan akar kokoh dalam mengembangkan kewirausahaan, menurut Surjadi: *"creating and innovating society based on iman and taqwa* agar berbahagia di dunia dan akhirat[211]".

D. Rekonstruksi kurikulum dari 'salafi' ke semi modern

Pesantren adalah bagian dari khazanah pendidikan yang memiliki nilai penting, sebagai asset berharga yang telah menyumbangkan begitu banyak perkembangan pendidikan. Pesantren sebagai subsistem pendidikan nasional memiliki nilai-nilai pendidikan yang relevan dengan pengembangan dan tujuan

[211] H.A. Suryadi, *Ibid*

pendidikan nasional. Terlebih lagi sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2001, dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 1/U/ KB/2000; beberapa pondok pesantren ditetapkan sebagai Pondok Pesantren Salafiyah Penyelenggara Program Wajib Belajar 9 Tahun dengan menerapkan beberapa mata pelajaran wajib seperti Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

Pesantren mulai dapat pengakuan sebagai lembaga pendidikan alternatif, sejak diundangkannya Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989, yang secara implisit posisi *pesantren* terakomodir dalam Bab IV pasal 11 ayat 6: "Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan". Baru pada Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab VI Bagian Kesembilan tentang Pendidikan Keagamaan Pasal 30 istilah *pesantren* tertuang dalam Pasal 30 ayat 4 sebagai pendidikan keagamaan.

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Bab XV pasal 91 menyatakan:

(1) Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.
(2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Pendidikan Nasional.
(3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

Untuk pendidikan keagamaan menurut pasal 92 ayat (2): "Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama mensupervisi dan membantu

satuan pendidikan keagamaan melakukan penjaminan mutu". Pasal 93 mengatur pendidikan yang tidak mengacu pada standar nasional pendidikan:

(1) Penyelenggaraan satuan pendidikan yang tidak mengacu pada Standar Nasional Pendidikan ini dapat memperoleh pengakuan dari pemerintah atas dasar rekomendasi dari BSNP.
(2) Rekomendasi dari BSNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada penilaian khusus.
(3) Pengakuan dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan menteri.

Kurikulum bukanlah substansi pendidikan, namun hanya alat pencapaian tujuan pendidikan. Sebagai alat, maka suatu kurikulum berisi uraian tentang; jenis program yang harus diselenggarakan, siapa yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraannya dan apa yang dibutuhkan pada saat diselenggarakan[212]. Pesantren sebagai subsistem pendidikan nasional yang paling otonom; *harus berani tampil* membenahi kurikulumnya. Hal ini sangat penting bagi PPS Wajar Dikdas 9 Tahun, karena dalam pembelajaran sehari-hari, PPS sudah mengenal dan cukup akrab dengan istilah Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (SKKD) mata pelajaran umum sebagai mata pelajaran wajib untuk disampaikan.

Dengan kemandiriannya, pesantren dapat fleksibel mengelola kurikulum sesuai dengan kepentingan peserta didik, masyarakat, pemerintah dan pengguna langsung ataupun tidak langsung jasa pendidikan. Pembentukan kerangka dasar dan struktur kurikulum diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; selanjutnya dikembangkan sesuai dengan tujuan pendidikan pesantren yang mengacu pada tujuan pendidikan Islam dan tujuan pendidikan nasional. Mengacu kepada fungsi manajemen; perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan

[212] Hendyat Sutopo, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum: Sebagai Substansi Problem Administrasi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hal. 18

pengontrolan serta mengadopsi prosedur proses penyiapan kurikulum dengan pendekatan administratif dari Sukmadinata[213] dapat dirancang modifikasi langkah sebagai berikut:

Tabel 1
Modifikasi Langkah Merancang Manajemen Kurikulum

Langkah	**Uraian**
Pertama	Pembentukan Tim Pengarah yang bertugas menyiapkan rumusan falsafah dan tujuan umum pendidikan, serta merumuskan konsep dasar dan garis-garis besar rumusan kebijakan. Tim ini dapat diminta dari pejabat pengambil keputusan, pengawas pendidikan, pemerhati /ahli kurikulum, dan dapat pula melibatkan tokoh masyarakat.
Kedua	Pembentukan Kelompok Kerja untuk menjabarkan kebijakan atau rumusan yang telah disusun oleh Tim Pengarah. Anggota Kelompok Kerja ini adalah ahli/Pemerhati kurikulum, para ahli disiplin ilmu, ditambah dengan guru-guru yang telah berpengalaman melaksanakan kurikulum. Tugas pokok tim ini adalah merumuskan tujuan-tujuan yang lebih operasional, memilih dan menyusun urutan bahan pelajaran, memilih strategi pembelajaran , memilih media dan alat pembelajaran, menyusun pedoman evaluasi, serta menyusun pedoman-pedoman pelaksanaan kurikulum bagi guru.
Ketiga	Apabila kurikulum sudah selesai disusun oleh kelompok kerja, selanjutnya hasilnya diserahkan kepada Tim Perumus untuk dikaji

[213] Nana Syaodih Sukmadinata, *Opcit*, (2000), hal. 161-162

	dan diberi beberapa catatan dan/atau direvisi. Bila dianggap perlu, kurikulum itu diujicobakan dan dievaluasi kelayakannya. Hasil uji coba itu digunakan sebagai bahan penyempurnaan.
Keempat	Menyebarluaskan serta memerintahkan kepada setiap sekolah untuk mengimplementasikan kurikulum yang telah tersusun ini.
Kelima	Memonitor implementasi kurikulum di lapangan, sehingga dapat menjadi bahan perencanaan atau perbaikan maupun pengembangan kurikulum selanjutnya.

Secara operasional, penulis mencoba merinci upaya pengembangan manajemen kurikulum pada PPS Wajar Dikdas 9 Tahun; seperti matriks terlampir.

Dari beberapa hasil temuan penelitian dapat tergambar bahwa pondok pesantren adalah model lembaga pendidikan paling pertama di Indonesia yang pada awalnya didirikan atas prakarsa masyarakat sebagai lembaga dakwah penyebaran agama Islam sekaligus lembaga pendidikan untuk memenuhi kebutuhan ilmu keislaman; sehingga menjadikan pesantren sebagai model manajemen berbasis masyarakat *(community based management)* yang pertama. Pendidikan pesantren yang menganut otonomi dan *indigenous* karena masyarakat pesantren sejak awal mempercayai eksistensi dan kompetensi Pemimpin Pesantren dalam penguasaan keagamaan serta kharisma Pendiri Pesantren; masyarakat turut dan taat terhadap kebijakan beliau, keadaan ini secara tidak langsung mendorong pesantren memiliki model manajemen yang diistilahkan sebagai manajemen berbasis kyai *(kyai based manajement).* Pada proses pembelajaran, tujuan pembelajaran, bahan ajar standar yang dikaji dan metodologi berbasis pada kitab kuning; maka secara kurikulum pesantren menganut manajemen berbasis kitab kuning (*clasic 'Arabic book based manajement).*

Pondok pesantren, termasuk PPS Wajar Dikdas 9 Tahun secara *de jure* diakui sebagai salah satu alternatif pendidikan nasional melalui pengakuan secara implisit tercantum pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; sekalipun secara *de fakto* ternyata masih ada beberapa kendala terutama menyangkut masalah kurikulum. Pesantren sebenarnya memiliki kurikulum yang baku, namun tidak pernah ditulis dan didokumentasikan sehingga terkesan pendidikan di pesantren status *quo.* Pendidikan di pesantren memiliki tujuan; walaupun hanya sebatas

instruksional di lapangan, ada bahan pelajaran yang dikajinya dan ada metodologi pembelajarannya, sekalipun evaluasi secara kuantitatif yang belum dilaksanakan.

Secara kelembagaan, pendidikan di pesantren disandarkan pada kandungan kitab kuning yang dikajinya. Jika santri telah memahami isi kitab kuning yang dikajinya dengan baik, berarti santri tersebut telah memahami kandungan materi kitab kuning tersebut dan tujuan pendidikan *kognitif* telah tercapai. Tujuan pendidian *apektif, psikomotorik* dan *life skill* diterapkan pada sikap hidup santri pada keseharian dibawah bimbingan pada kyai dan ustadz. Sistem pendidikan pesantren lebih ditekankan pada pendidikan keagamaan secara khusus yang berhubungan dengan ritual keagamaan yang lebih menekankan hubungan manusia dengan Sang Pencipta baik yang sifatnya *fardlu 'ain, fardlu kifayah* maupun yang *sunat* serta amal-amal yang meningkatkan keutamaan hidup *(fadlailul 'amal)*. Subpendidikan lain yang menekankan pada hubungan dengan sesama dan lingkungan baru pada sifat tatanan idealis; belum pada porsi operasional, meskipun beberapa pesantren menunjukkan upaya untuk lebih terbuka. Padahal secara tersirat stakeholders jasa pendidikan mengharapkan pesantren lebih berwawasan ke depan; dengan berpijak pada *hablum min Allah* yang kuat dan berpandangan *Hablum min an-nas* yang lebih maju. Dari segi pendidikan dan pembelajaran keagamaan; pesantren disebut sebagai *cultural broker*, sebagai benteng akhlak dan pembina moral santri; saat ini sudah memenuhi harapan dan kehendak masyarakat dan stakeholders lainnya.

Beberapa hal yang menjadi harapan masyarakat yang ditimpakan kepada pesantren dalam penyelenggaraan pendidikan adalah agar dapat memberikan

bekal keterampilan terhadap para santrinya yang dapat menunjang kehidupannya di masa yang akan datang. Sedangkan Pemerintah setempat mengharapkan agar pesantren dapat berpartisipasi dalam program pengembangan sosial dan ekonomi kemasyarakatan, sebagai penyambung lidah pemerintah terhadap masyarakat setempat; karena partisipasi pesantren dan alumni pesantren dalam dakwah yang tidak terikat oleh satu daerah, merupakan sarana efektif bagi penyampaian program pemerintah.

Pesantren masih merupakan satu-satunya lembaga pendidikan yang dekat dengan masyarakat dan memiliki sebuah keunggulan dengan masih bertahannya jaringan pendidikan atau *educational networks*. Hubungan antar ketiga lingkungan pendidikan, yaitu masyarakat, orangtua dan pesantren secara kontinyu masih terjalin melalui majelis taklim, pertemuan *haulan* dan hubungan dengan alumninya melalui *halaqah*. Hal ini dapat disebut sebagai bagian dari pendidikan karakter yang saat ini kurang terperhatikan orangtua dan masyarakat. Pesantren secara umum tidak hanya sebagai tempat untuk *transfer of knowledge*, tapi juga sebagai tempat *character building;* serta pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai *mawaddah wa rahmah.*

Demikian uraian Bab V ini sebagai analisis dan kajian dari hasil penelitian berikutnya dalam Bab VI penulis menarik kesimpulan dan merekomendasikan hal-hal yang perlu dalam pengembangan manajemen kurikulum di pesantren.

BAB VI

PENUTUP

Bab ini menyajikan simpulan dan saran tentang manajemen kurikulum PPS Wajar Dikdas 9 Tahun; sebagai hasil pemikiran penulis berdasarkan pembahasan sebelumnya. Lebih lengkapnya seperti uraian di bawah ini:

A. Simpulan

1. Pondok Pesantren Salafiyah Penyelenggara Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun; khususnya pada PPS Al-Amin, Nururssalam dan Tarbiyatul Furqan, belum menggunakan prinsip-prinsip manajemen (baik perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan maupun evaluasi) dalam tata kelola kurikulum; karena belum memiliki kurikulum secara tertulis, sehingga secara eksplisit belum ditetapkan tujuan pendidikan.
2. Pondok Pesantren Salafiyah masih mengutamakan pengajian kitab kuning; yaitu kitab keagamaan klasik sebagai bahan ajar, namun fokus dan perhatian tetap mengacu pada pembinaan akhlak dan kemandirian. Sedangkan Pembelajaran beberapa mata pelajaran umum diberikan sesuai aturan yang ditetapkan pemerintah.
3. Dengan keinginan kuat dan semangat memajukan sistem pendidikan kepesantrenan, maka kurikulum Pondok Pesantren Salafiyah Penyelenggara Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun; dari bentuk *salafi* masih dapat direkonstruksi menjadi kurikulum modern.

B. Saran-saran

Pesantren telah diakui sebagai lembaga pendidikan alternatif yang memiliki otonomi penuh, sehingga memiliki peluang untuk mulai menata dan mengelola kurikulum secara lokal dengan tetap mengacu kepada tujuan pendidikan. Untuk itu disarankan:

1. Pondok Pesantren Salafiyah Penyelenggara Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun; harus mulai membenahi manajemen kurikulum, melalui lompatan besar dengan membuat rumusan tujuan pendidikan pesantren; standar kurikulum yang jelas, tegas, terstruktur dan terdokumentasi; mulai dari tujuan, mata pelajaran, metodologi pembelajaran, dan evaluasi secara kualitatif dan kuantitatif; tanpa harus mengubah budaya yang mengakar pada dunia pesantren.
2. Pondok Pesantren Salafiyah Penyelenggara Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun; harus berani membuka sisi yang kurang banyak mendapat perhatian dalam sistem pendidikannya; yaitu kesejahteraan umat dengan implikasi terhadap pengembangan sosial kemasyarakatan melalui pengembangan ekonomi, lingkungan sosial serta ilmu pengetahuan dan teknologi; dengan upaya menawarkan pendidikan unggulan seperti yang diharapkan masyarakat.
3. Kementerian Agama serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan institusi yang paling bertanggungjawab dalam perkembangan pendidikan; diharapkan dapat melakukan pembinaan secara terencana dan berkesinambungan; termasuk didalamnya manajemen kurikulum, yang selama ini kurang sering tersentuh dalam pembinaan.

4. Pondok Pesantren Salafiyah Penyelenggara Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, dan pondok pesantren pada umumnya, sesungguhnya sangat menarik untuk tetap dikaji dan diteliti; sehingga secara khusus kajian ini bisa dilanjutkan dengan kajian kurikulum pesantren yang sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini, termasuk model-model pembelajaran, mata pelajaran, sistem evaluasi yang cocok akan lebih menukik pada tatanan operasional; termasuk tanggapan para kyai, ustadz dan seluruh komponen pesantren dan masyarakat tentang serba-serbi kurikulum pesantren, masih sangat mungkin untuk dijadikan bahan penelitian.

Demikian hasil penelitian yang dilakukan terhadap manajemen kurikulum pada Pondok Pesantren Salafiyah Penyelenggara Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kabupaten Barito Kuala, semoga dapat sedikit membantu peliknya persoalan kurikulum di pesantren walaupun baru pada tataran konseptual.

Wallahu a'lam.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Quran dan Terjemah Digital (Aplikasi) **.** *http://geocities.com/Al-qur'an_indo, E-mail Al-qur'an_indo@yahoo.com.*

Ainurrafiq, *"Pesantren dan Pembaharuan: Arah dan Implikasi"*, dalam Abuddin Nata, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia,* Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001.

al-Syaibany, Omar Mohammad al-Toumy, *Falsafah Pendidikan Islam*, Terj. Hassan Langgulung, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.

Azyumardi Azra,*Esei-Esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998, Cet. 1.

----------, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru*, Jakarta: Kalimah, 2001.

Basyuni, Maftuh, *Bangkitkan Tradisi Keilmuan di Pesantren*, Media Pembinaan, No. 08/XXXIII November, 2006.

Bawani, Imam, *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam* Surabaya: al-Ikhlas, 1998.

Black, James A, dan Dean J Champion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, (Terjemahan: E. Koswara dkk), Bandung: Replika Aditama, 2011.

Burns, Robert B, *Introduction to Research Method*, Melbourne: Longman Pty Ltd, 1995.

Cebtral, Clifton F, *The Undergraduate Curriculum : A Guide to innovation and refarm*, Colorado, Boulder, Westive Bless, 1978.

Dakir, H, *Perencanaan Pengembangan Kurikulum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Departemen Agama, *Pedoman Pengembangan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan*, Jakarta: Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pontren, 2004.

----------, *Pola Pembelajaran di Pesantren,* Jakarta: Ditjen Kelembagaan Agama Islam – Proyek Peningkatan Pondok Pesantren, 2001.

----------, *Pola Pengembangan Pondok Pesantren,* Jakarta: Ditjen Kelembagaan Agama Islam – Proyek Peningkatan Pondok Pesantren, 2001.

Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren : Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES, 1982.

Dimyati, dan Mudjiono, *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Djudju Nuzuluddin, *Kajian Model Manajemen Kurikulum di Pesantren: Studi Kepesantrenan di Kabupaten Garu*t, Bandung: Uninus Press, 2007.

Duhou, Ibtisam Abu, *School Base Management (Terjemahan: Noryamin Aini)*, Jakarta: Logos, 2002.

Echols, John M, dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1995.

Hadi, Amirul, dan Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan,* Bandung: Pustaka Setia, 2005.

Hamalik, Oemar, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, Bandung: PT Remaja Rosyda Karya, 2006.

----------,*Perkembangan Kurikulum: Dasar-dasar dan Perkembangannya* Bandung: Bandar Maju, 1990.

Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.

Hills, PJ., *A Dictionary of Education*, London: Routledge & Kegan Paul, 1982.

HS, Mastuki, dan M. IshomEl-Saha, *Intelektualisme Pesantren: Potret Tokoh dan Cakrawala Pemikiran di Era Keemasan Pesantren (seri I)*, Jakarta: Diva Pustaka, 2003.

Madjid, Nurcholis, *Bilik-Bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan* Jakarta: Paramadina, 1997.

Masyhud, Sulthon, et.al, *Manajemen Pondok Pesantren,* ed. Mundzier Suparta, Jakarta: Diva Pustaka, 2005, Cet. II.

Mochtar, Affandi, *Membedah Diskursus Pendidikan Islam,* Jakarta: Kalimah, 2001.

Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung; Remaja Rosdakarya, 1994.

Muchtarom, Zaini, *Santri dan Abangan di Jawa,* Jilid II, Jakarta: INIS, 1998.

Mulyasa, E, *Implementasi Kurikulum 2004; Panduan Pembelajaran KBK*, Bandung: PT. Rosyda Karya, 2005.

----------, *Menjadi Kepala Sekolah Propesional,* Bandung: PT. Rosyda Karya, 2004.

----------, *Manajemen Berbasis Sekolah,* Bandung: PT. Rosyda Karya, 2006.

Murgatroyd, Stephen, and Colin Morgan, *Total Quality Management and The School,* Birmingham-Philadelphia: Open University Press, 1993.

Nasution, Sarimuda, *Kurikulum dan Pengajaran,* Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

----------, *Metode Penelititan Naturalistik Kualitatif,* Bandung: Jemmars, 1988.

Pidarta, I Made, *Manajemen Pendidikan Indonesia,* Jakarta: Bina Aksara, 1988.

Poerwadarminta, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Purwanto, Ngalim, *Psikologi Pendidikan,* Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996.

Ragan, William B, *Modern Elementary Curriculum* (Revised Edition), USA: Rinehart and Winston, Inc, 1960.

Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam,* Jakarta: Kalam Mulia, 1992.

Robbin dan Coulter, *Manajemen (*ed. kedelapan*),* Jakarta: PT Indeks, 2007.

Rusman, *Manajemen Kurikulum,* Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009.

Sabda, Syaifuddin, *Konsep Kurikulum Pendidikan Islam Refleksi Pemikiran Al-Ghazali*, Banjarmasin, Antasari Pers. 2008.

Sallis, Edward, *Total Quality Management Dalam Konteks Pendidikan (Terjemahan Udin S. Saud)*, Bandung: Program Studi Administrasi Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, 2005.

Sanjaya, Wina, *Kajian Kurikulum dan Pembelajaran,* Jakarta : Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, 2007.

----------, *Kurikulum dan Pembelajaran, Teori dan Praktik Pengembangan Kuirkulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP),* Jakarta; Fajar Interpratama Offset, 2008.

Saridjo, Marwan, et.al, *Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia,* Jakarta: Dharma Bhakti, 1983.

Siagian, Sondang P, *Filsafah Administrasi,* Jakarta: CV. Mas Agung, 1990.

Steenbrink, Karel. A, *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke 19,* Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

----------, *Pesantren Madrasah Sekolah,* Jakarta: LP3ES, 1994.

Stoner, James AF, R. Edward Freeman dan Daniel R. Gilbert Jr, *Manajemen, (terjemahan Alexander Sindoro),* Jakarta: Prenhalindo, 1996.

Sudjana, Nana, dan Awal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi,* Bandung: Sinar Baru, 2002.

Suhardan, Dadang, dkk, *Manajemen Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Suharto, Bohar, *Pengertian, Fungsi, Format, Bimbingan Karya Ilmiah*, Bandung: Karsito, 1993.

Suherman, Ase, dkk. *Kurikulum dan Pembelajaran*, TIM Pengembang Kurikulum dan Pembelajaran, Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan. Fak. Ilmu Pendidikan-Universitas Pendidikan Indonesia : Jakarta, 2006.

Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.

----------, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.

Sulistyorini, *Manajemen Pendidikan Islam; Konsep, Strategi dan Aplikasi*, Yogyakarta: Teras, 2009.

Suryabrata, Sumadi *Metodologi Penelitian,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Suryadi, H.A, *Dakwah Islam Dengan Pembangunan Masyarakat Desa*, Bandung: Mandar Maju, 2005.

Tafsir, Ahmad, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.

Tilaar, H.A.R, *Manajemen Pendidikan Nasional*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.

----------, *Paradigma Baru Pendidikan Nasi*onal, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Wiryokusumo, Iskandar dan Usman Mulyadi, *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum,* Jakarta: Bina Aksara, 1988.

Yasmadi, *Modernisasi Pesantren : Kritik Nurcholis Madjid Terhadap Pendidikan Islam Tradisional*, Jakarta: Ciputat Press, 2002, Cet. I.

Zuhri, Saefuddin, *Pendidikan Pesantren di Persimpangan Jalan*. Dalam Marzuki Wahid dkk. (Ed). *Pesantren Masa Depan, Wacana Transformasi dan Pemberdayaan Pesantren*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.

http: //chandrawati.wordpress.com/2009/04/20/model-model-pengembangan-kurikulum-dan-fungsinya-bagi-guru/, Sri Rahayu Chandrawati, *Model-model Pengembangan Kurikulum dan Fungsinya bagi Guru*.

http://ebsoft.web.id, *Kamus Besar Bahasa Indonesia:* versi 1.1.

http://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen, Griffin, R, *Business*, 8th Edition. NJ: Prentice Hall, 2006.

http://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen, Online Etymology: Manage.

http://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen, Oxford English Dictionary.

http://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen, Robbins, Stephen dan Mary coulter. 2007. Management, 8th Edition. NJ: Prentice Hall.

http://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen, Vocational Business: Training, Developing and Motivating People by Richard Barrett - Business & Economics - 2003. - Page 51.

http://suji.student.fkip.uns.ac.id/2009/06/25/perjalanan-kurikulum-di-indonesia/, Suji,*Perjalanan Kurikulum di Indonesia*.

http://suji.student.fkip.uns.ac.id/2009/06/25/perjalanan-kurikulum-di-indonesia/, Bondi, J., dan Wiles, J. 1989. *Curriculum Development: A Guide to Practice*. (Columbus: Merril Publishing Company, A Bell & Howel Information Company, 1989).

www.muslim.or.id, Kamus Al-Mufid, Versi 1.0.

Lampiran 1
`

KITAB KUNING STANDAR YANG DIGUNAKAN
SEBAGAI KITAB RUJUKAN DI PPS WAJAR DIKDAS 9 TAHUN
(Modifikasi dari ketiga PPS yang diteliti)

No	Bidang Kajian	Nama Kitab	Pengarang
1	Fiqh/Ushul Fiqh	1. Bajuri	1. Syaikh Muhammad bin Muhammad Al-Bajuri
		2. Fathu al-Mu'in	2. Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary
		3. I'anat al-Thalibin	3. Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary
		4. Fath al-Qarib	4. Muhammad bin Qasim alGhazi
		5. Risalat Ushul al-Fiqh	5. Syaikh Yusuf bin Abi Bakr Asy-Syakafi
		6. Madkhal al-Ushul	6. Sayid Aly as-Salawy
		7. Syarh al-Waraqat	7. Ahmad bin Muhammad al-Dimyathi
		8. Kasyifat as-Saja	8. Syaih Muhammad Nawawi
		9. Mabadi 'ilmu Fiqh	9. Syikh Muhammad Sya'rani
		10. Sarah Sittin	10. Syaikh Ahmad Ramli
2	Lughat al-'Arabiyah	1. Al-Muhawarat al-haditsah	1. Al-Habib Hasan Baharun
		2. Qira-at al-Mufidat	2. Syaikh Muhammad Qari
		3. Lughat al-Mutakhatib wa al-Rasail	3. Syaikh Muhammad Qari
		4. Ta'lim al-Lughat al-Arabiyah	4. DR.D. Hidayat
		5. Takhatub	5. Umar bin Jabbar
		6. Mahadits al-Yaum	6. Umar bin Jabbar
		7. Qira-at al-Mufidat al-Haditsah	7. Umar bin Jabbar
3	Tauhid	1. Kifayat al-'Awwam	1. Syaikh Muhammad Fadlali
		2. Al-Hud-hudi	2. Syaikh Abdullah Syarqawi
		3. Kasyf al-Asrar	3.
		4. Tuhfat al-Murid	4.
		5. Kifayat al-Mubtadi-in	5. Abdurrahman bin Muhammad Ali
		6. Fath al-Majid	6. Muhammad Qasim bin Muhammad al-Ghazi
		7. Al-Dasuqi	7. Muhammad al-Dasuqi

No	Bidang Kajian	Nama Kitab	Pengarang
4	Akhlaq / Tashawuf	1. Al-Tahliyah	1. Syaikh Muhammad bin ‘Alawy al-Maliky
		2. Ta’lim al-Muta’allim	2. Syaikh Ibrahim bin Ismail al-Zarnuji
		3. Risalat al-Mu’awanah	3. Habib Abdullah bin Muhammad Alawy al-Haddad
		4. Al-Mahfuzhat	4. Umar bin Jabbar
		5. Muraqi al-‘Ubudiyah	5. Muhamad Nawawi al-Jawi
		6. Qathru an-Nida	6. Yasin bin Zainuddin
		7. Minhaj al-‘Abidin	7. Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad al-Gazali
		8. Al-Washaya al-Aba li al-Abna	8. Muhammad Syakir al-Iskandariyah
		9. Kifayat al-Atqiya	9. Sayyid Abu Bakar Ma’aruf
5	Al-Qur’an/ Tafsir/Ulum al-Qur’an	1. Jalalain	2. Jalaluddin bin Abdurahman bin Abu Bakar al-Sayuthi
		2. Ilm al-Tafsir	3. Jalaluddin bin Abdurahman bin Abu Bakar al-Sayuthi
		3. Qaul al-Matin	4. Syaikh Hasan Muhammad al-Masyathi
		4. Durus Ilmi Ushul al-Tafsir	5. Syaikh Ismail Utsman al-Yamani
		5. Murah al-Labid	6. Syaih Muhammad Nawawi
6	Hadits/Ulm al-Hadits	1. Riyadl al-Shalihin	1. Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Syarif al-nawawi
		2. Bulugh al-Maram	2. Ibnu Hajar al-‘Asqalany
		3. Al-Taqrirat	3. Hasan Muhammad al-Masyathi
		4. Tanwir al-Thulab	4. Syikh Muhammad Sya’rani
		5. Al-Targhib wa al-Tarhib	5. Syaikh Husin Mu’athar
		6. al-Arba’in al-Nawawiyah	6. An-Nawawi
		7. Nur al-Abshar	7. An-Nawawi
		8. Tanqih al-Qaul al-Hasyisy	8. Syaikh Muhammad Umar
		9. Tadrid al-Sharih	9. Abi Abas Zainuddin Ahmad
		10. Shahih Muslim	10. Imam Muslim bin Hajjaj
		11. Dafi’ al-Astar	11. Hasan al-Mas’ud
7	Ushul Fiqh	1. Mubadi Awwaliyah	1. Abdul Hamid Hakim
		2. Ushul al-Fiqh	2. Syaikh Yusuf bin Abu Bakr
		3. Al-Um	3. Abi Ishaq Ibrahim bin Ali
		4. Lathaif al-Isyarat	4. Abdul Hamid bin Ali
		5. Madkhul al-Wushul	5. Said Muhammad bin Ali al-Mashawi
		6. Al-Waraqat	6. Ahmad bin Abdul Latif

No	Bidang Kajian	Nama Kitab	Pengarang
8	Mantiq	1. Risalat Fi 'Ilmi al-Manthiq 2. Qaul al-Mu'allaq 3. Idlah Al-Mubham 4. Qaul al-Manthiq 5. Syarah al-Qusyairi	1. Muhammad Syukri Unus 2. Syaikh Salim bin Ma'ruf 3. Syaikh Ahmad Damanhuri 4. Imam Nawawi 5. Imam Qusyairi
9	Balaghah	1. Qawaid Lughat al-Arabiyah 2. Ilmu Balaghah 3. Al-Jawahir al-Maknun 4. Is'af al-Murid	1. Syaikh Musthafa Tamim 2. Muhammad Syukri Unus 3. Ahmad Al-Damanhuri 4. Muhammad Syukri Unus
10	Tarikh	1. Nur al-Yaqin 2. Khulashah Nur al-Yaqin 3. Anwar Muhammadiyah 4. Muhammad Rasulullah 5. Tarikh Khulafa	2. Muhammad al-Hadlry 3. Umar bin Abdul Jabbar 4. 5. Muhammad Ridla 6. Jalaluddin Al-Sayuthi
11	'Arudl	1. Ilmu 'Arudl 2. Mukhtash al-Syafi	1. 2. Muhammad al-Damanhuri
12	Falak	1. Mukhtash al-Waqaat 2. Durus al-Falakiyah	1. 2.
13	Faraidl	1. Is'af al-Haish 2. Tuhfat al-Saniyah 3. Takmilat Ziyadat al-Hadits 4. Nafhat al-Hasaniyah	1. Muhammad Syukri Unus 2. Sayyid Muhammad bin Ali al-Masawy 3. Habib Muhammad bin Hafiz al-Hadlry 4. Muhammad Hasan Masath
14	Nahwu	1. Al-Kawakib al-Dariyah 2. Taudlih 3. Al-Jurumiyah 4. Al-'Imrithi	1. Syaikh Muhammad bin Ahmad Abdul Bari al-Ahdal 2. Muhammad Syukri Unus 3. Muhammad bin al-Shunhaji 4. Al-'Imrithi al-Syafi'i
15	Sharaf	1. Silsil Madkhul 2. Al-Kailani	1. Muhammad bin al-Qasahi 2. Ali bin Hisyam al-Kailani
16	Materi Mata Pelajaran Umum	1. Bahasa Indonesia 2. Matematika 3. Ilmu Pengetahuan Alam 4. Bahasa Inggris 5. Ilmu Pengetahuan Sosial 6. Pendd. Kewarganegaraan	1. …. 2. 3. 4. 5. 6.

(Sumber : Dokumen/Perpustakaan Pesantren dan wawancara dengan Kyai, Guru dan Santri)

Lampiran 2a

PEDOMAN WAWANCARA

I. Umum

A. Sejarah/latar belakang berdirinya Pesantren :

1. Tanggal, bulan dan tahun
2. Pendiri pertama
3. Organisasi yang menaungi :
   a. Ormas :
   b. Yayasan :
4. Tempat pertama berdiri

B. Kiprah Pesantren dalam hubungannnya dengan masyarakat.

C. Visi dan misi Pesantren dalam hubungannya dengan tanggung jawab sosial.

D. Tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan di pesantren.

II. Kurikulum Pesantren

A. Tujuan Pendidikan di pesantren sebagai pengembangan tujuan pendidikan Islam dan tujuan pendidikan nasional.

B. Perumusan kurikulum di pesantren :

1. Tim pembuat/penyusun kurikulum
2. Standar kurikulum di pesantren
3. Pemahaman ustaz terhadap kurikulum

C. Pembuatan silabus pendidikan :

1. Pemahaman ustaz terhadap silabus pendidikan
2. Pengembangan satuan acara pembelajaran

D. Strategi belajar mengajar

E. Evaluasi terhadap pembelajaran

III. Manajemen Kurikulum

A. Faktor-faktor intern yang paling berpengaruh terhadap pengembangan kurikulum.

B. Faktor-faktor ekstern yang paling berpengaruh terhadap pengembangan kurikulum.
C. Profil Kurikulum pesantren pada umumnya.
D. Sasaran jangka panjang kurikulum pesantren.
E. Strategi dan kebijakan operasional pengembangan kurikulum pesantren

IV. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 Tahun

A. Kapan PPS mulai mengikuti Program Wajar Dikdas.

B. Kurikulum yang dipergunakan dalam pembelajaran mata pelajaran yang akan diujikan pada UN.

C. Keadaan Guru bidang studi;

1) Jumlah guru.
2) Latar belakang pendidikan/disiplin ilmu.
3) Sertifikasi Pendidikan guru.
4) Asal guru (dari internal atau dari lembaga pendidikan lain)

D. Waktu pembelajaran.

E. Ketersediaan Buku Pegangan dan/atau buku pelengkap per bidang studi.

F. Gambaran lima tahun (2008-2012) pelaksanaan Wajar Dikdas:

Lampiran 2b

PEDOMAN STUDI DOKUMENTASI

A. Mengenal Profil Pesantren

1. Sejarah/latar belakang berdirinya Pesantren
2. Kiprah Pesantren dalam hubungannnya dengan masyarakat.
3. Kiprah Pesantren dalam hubungannnya dengan masyarakat.
4. Biografi tenaga pendidik dan kependidikan di pesantren
5. Latar belakang santri (Buku Induk Santri)

B. Kurikulum Pesantren

1. Mengenal ‘kurikulum’ pengajian kitab dan pesantren
2. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (mata pelajaran umum)
3. Kajian utama/materi pendidikan di pesantren
4. Kajian-kajian pelengkap
5. Kitab-kitab yang umum dipergunakan di pesantren
6. Mata pelajaran lain yang dipergunakan (pendidikan keterampilan dll)
7. Struktur Organisasi Pesantren
8. Program pembelajaran :
    a. Program jangka panjang
    b. Program tahunan
    c. Strategi pembelajaran

Sumber Dokumen:

1. Program pembelajaran
2. Silabus pendidikan
3. Satuan acara pembelajaran
4. Kitab dan buku pegangan para ustadz
5. Kitab rujukan pesantren

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Marabahan pada hari Minggu, tanggal 3 Juli 1961; di Desa Baliuk - Kecamatan Bakumpai (sekarang Kecamatan Marabahan) sebagai puteri kedua (dari 11 bersaudara) dan diberi nama Hj. St. MAU'IZATUL HASANAH, dari pasangan orangtua H. ASRANUDDIN. G (ayahnda; meninggal tahun 2007) dan Hj. DJURMIAH (ibunda; meninggal tahun 2004).

Pendidikan tingkat dasar diselesaikan pada tahun 1974 pada SDN Orde Baru Marabahan, kemudian dilanjutkan pada MTsN Marabahan (lulus tahun 1977) dan MAN Marabahan (tamat tahun 1981). Jenjang pendidikan selanjutnya diteruskan di Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Banjarmasin; jenjang Sarjana Muda pada tahun 1984 dan Sarjana Lengkap diselesaikan pada tahun 1988.

Atas dasar disiplin ilmu yang didapat di perguruan tinggi, serta terinspirasi dari tugas keseharian kedua orangtua, paman dan kakak sulung sebagai guru, penulis membulatkan tekad menjalani profesi sebagai guru, ketika sejak tahun 1993 diangkat sebagai PNS yang ditugaskan sebagai pengajar pada MTsN Marabahan. Bertahun lamanya mengabdi di madrasah yang dahulu tempat menuntut ilmu, maka sejak tahun 2009 penulis dipercaya sebagai Kepala madrasah tersebut.

Penulis sangat berbahagia karena telah memiliki seorang putera yang diberi nama ADITYA HELMI MONTAZERI. ST (lahir di Marabahan pada tanggal 17 Juni 1989) yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan Strata-1 Fakultas Teknik Lingkungan pada Universitas Lambung Mangkurat, buah cinta dari perkawinan dengan Drs. H. SURYA ACHDIAT, M.Si lelaki terkasih yang menikahinya di tahun 1986.

Kebahagiaan penulis mencapai titik tertinggi, ketika keinginan melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata-2 mendapat persetujuan, dukungan dan motivasi dari keluarga kecilnya; sehingga ketika di tahun 2010 penulis berangkat dengan semangat penuh untuk mencoba peruntungan mendaftarkan diri sebagai calon mahasiswa pascasarjana pada IAIN Antasari Banjarmasin, penulis berangkat ditemani anak dan suami tercinta. Suatu hari nanti, penulis berharap dapat mengantar sang buah hati, anak tercinta, berangkat menuntut ilmu pada jenjang Strata-2 bahkan Strata-3, Insya Allah.